

SENIN, 21 FEBRUARI 2011
18 RABIUL AWAL 1432 H
NOMOR 46 / TAHUN KE-19

Rp 2.900 / 28 Halaman
LUAR P JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM

MAHAKA MEDIA

IKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169, e-mail: iklan@republika.co.id
SIRKULASI: Telp 021 791 84746 Faks: 021 791 98442 e-mail: sirkulasi@republika.co.id

analisis

Oleh **Iman Sugema**



Memaknai Kedaulatan Ekonomi

Sekitar sepuluh tahun lalu, saya begitu sakit hati ketika seorang pejabat dari sebuah lembaga internasional berkata bahwa Indonesia bagai kerbau yang dicocok hidungnya, mau menuruti apa saja yang diperintahkan oleh lembaga tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah wawancara di sejumlah media asing. Saat itu, memang kendali kebijakan ekonomi sepenuhnya berada di bawah ketiak para ekonom tangan IMF dan lembaga internasional lainnya.

Sekarang, nuansa seperti itu sekali-kali muncul kembali. Hasil produksi gas dari blok Donggi Senoro akhirnya dialokasikan bagi kebutuhan asing walaupun sebetulnya kita kekurangan pasokan gas. Tim dari sebuah lembaga asing juga tengah diminta untuk menyusun cetak biru pembangunan Indonesia ke depan. Baru-baru ini, teman-teman di DPR mensinyalir bahwa keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin adalah buah dari tekanan lembaga asing.

Bersambung ke him 11 kol 1-7

:: pro kontra ::

Baca selengkapnya di him 10

CHAND PARWEZ PRODUSER FILM

Bioskop Bisa Habis



Apa dampak regulasi pajak impor bagi perfilman di Tanah Air?

Aturan itu justru berdampak menghentikan film asing di Indonesia. Berhentinya film asing, berarti mematikan industri perfilman di Indonesia. Karena itu,

sangat sulit bagi kita untuk menerima kebijakan ini begitu saja. Kalau tidak ada film asing, bioskop akan sangat habis. ■

JERO WACIK MENBUDPAR

Kita tak akan Matikan Usaha



Pemerintah sudah memikirkan dampak regulasi ini?

Saya sebagai menteri mempertimbangkan *pro job*. Itu berlaku di mana-mana. Kalau gedung bioskop tutup semua, itu jadi pro pengangguran lagi. Tidak

boleh ada kebijakan yang sampai tidak menciptakan kehilangan lapangan kerja. Jadi percayalah, saya tidak pernah memiliki pikiran untuk mematikan usaha. ■

rehat

Prabowo: Kekerasan akibat pemuda mengganggu **Maksudnya, pemerintah tidak bekerja toh**

Guru makin semangat karena sertifikasi **Ada juga yang makin berkantong tebal tuh**

Raja Bahrain Melunak

Sefti Oktarianisa

Serikat pekerja tetap serukan mogok massal.

MANAMA — Setelah hampir sepekan didera unjuk rasa, penguasa Bahrain mulai melunak. Raja Hamad bin Isa Al Khalifa menunjuk putra sulungnya, Pangeran Salman, untuk memulai dialog guna menyelesaikan krisis di negeri Teluk tersebut.

Salman menjamin lewat dialog ini aspirasi warga dari segala golongan akan dikabulkan. Berbicara melalui siaran jaringan televisi *CNN*, Ahad (20/2), wakil komandan tertinggi militer Bahrain itu mengatakan krisis ini telah membawa Bahrain di titik persimpangan.

“Kini, saatnya untuk duduk bersama dan berunding, bukan saling bertarung,” kata Salman sambil meminta maaf atas jatuhnya korban jiwa.

Menurut pewaris takhta kerajaan itu, pintu dialog dibuka selebar-lebarnya untuk kelompok oposisi. Salman berjanji semua partai politik di negara tersebut diperbolehkan ikut andil dalam pembicaraan. Rencananya, dialog akan dilakukan pada Ahad (20/2). Pangeran Salman diyakini telah menjalin kontak dengan tokoh oposisi.

Tokoh oposisi di parlemen, Abdul Jalil Khalil, mengakui sedang mempertimbangkan tawaran kerajaan itu. “Tetapi, kami garis bawahi hingga kini belum ada pembicaraan langsung.”

Pihak oposisi lainnya menyerukan warga agar kembali mogok massal. Kelompok serikat pekerja mencoba menekan Pemerintah Bahrain untuk segera mengabulkan keinginan mereka. “Serikat pekerja perusahaan penerbangan telah meminta Persatuan Pekerja Bahrain untuk mogok bersama mu-

lai 20 Februari ini,” ujar satu anggota serikat pekerja.

Hingga kini, ratusan pengunjung rasa masih memadati Lapangan Pearl yang menjadi pusat aktivitas antipemerintah. Pasukan keamanan telah ditarik, Sabtu (19/2) lalu, setelah pada Kamis (17/2) mereka menyerbu alun-alun di tepi Pantai Manama, yang menyebabkan empat pengunjung rasa tewas dan 231 lainnya terluka.

“Kami tidak takut mati. Silakan tentara membunuh kami,” kata Umm Mohammed, seorang demonstran. Pangeran Salman sendiri akan membiarkan warga berkumpul di Lapangan Pearl.

Gempuran unjuk rasa melanda Bahrain sejak Selasa (15/2) lalu sebagai imbas dari gejolak politik di Tunisia dan Mesir. Warga Bahrain yang didominasi kelompok Syiah berdemonstrasi menentang pemerintah yang dikendalikan kelompok Sunni.

Warga menganggap pemerintah bertindak diskriminatif terhadap kaum Syiah dalam segala bidang. Namun, pengunjung rasa menghindari isu sektarian ini dengan slogan “Tak ada Suni atau Syiah, hanya ada warga Bahrain bersatu”.

Tuntutan massa pun semakin ekstrem. Dari semula reformasi politik, berubah menjadi desakan agar Perdana Menteri Khalifa bin Salman Al-Khalifa, paman dari Raja Hamad, mundur dari kursi yang telah didudukinya selama 40 tahun. Raja Hamad yang berkuasa sejak 6 Maret 1999 pun didesak turun takhta.

■ ap/reuters/bbc ed: rahmad budi harto

<div>Bahrain</div>		
<div>DEMOGRAFI</div>		
<div> <div><div></div></div> </div>		
<div>Luas wilayah : 760 km2</div> <div>Populasi : 735 ribu (termasuk 235 ribu warga asing)</div> <div>Agama : 81,2 persen Muslim (65 persen Syiah) 9 persen Kristen, lainnya 9,8 persen</div>		
<div>PEMERINTAHAN</div>		
<div>Kepala Negara :</div>	Raja Hamad bin Isa Al Khalifa (sejak 6 Maret 1999)	
<div>Putra Mahkota :</div>	Pangeran Salman bin Hamad Al Khalifa (lahir 21 Oktober 1969)	
<div>Kepala Pemerintahan :</div>	Perdana Menteri Khalifa bin Salman Al Khalifa (sejak 1971)	
<div>EKONOMI</div>		
<div> <div>PDB 21,73 miliar dolar AS</div> <div>PDB per kapita 39.400 dolar AS</div> </div>		
<div>SUMBER DAYA:</div> <div> <div>- minyak (70 persen pendapatan)</div> <div>- jasa keuangan (syariah)</div> </div>		
<div>MILITER</div>		
<div>Jumlah personel:</div>		9.000
<div>Belanja militer:</div>		4,5 persen PDB
<div>Sumber: CIA World Factbook</div>		

Menelisik Rusuh Cikeusik (Bagian 5)

Idris, Jawara Pita Biru Berjaket Hitam



● **Muhammad Fakhruddin**

Rohayah, 28 tahun, tidak menduga kalau pria dalam rekaman yang ditayangkan berulang-ulang di televisi nasional itu adalah suaminya, Muhammad Idris. Bahkan, ketika Idris pulang ke rumah pada Senin (7/2) malam, sehari setelah bentrokan di Cikeusik, Pandeglang, Banten, dia tak menanyakan apa pun kepada suaminya. Setelah memeluk dan mencium kedua anaknya yang telah tertidur lelap, Idris lantas pergi lagi. Rohayah sempat menanyakan

maksud kepergian Idris yang begitu mendadak. Idris hanya menjawab singkat. “*Udah, doain aja,*” ujar Rohayah menirukan perkataan suaminya saat berpamitan. Sejak saat itu, Idris belum kembali lagi ke rumahnya.

Baru kemudian Rohayah syok setelah tahu kalau pria dalam tayangan televisi tersebut adalah Idris. “*Nggak* sangka itu bapaknya anak-anak,” ucapnya lirih kepada *Republika* beberapa hari lalu.

Rohayah menceritakan, sehari sebelum bentrokan Cikeusik antara jemaat Ahma-

diyah dan warga, Sabtu (5/2) siang, Idris sudah meninggalkan rumah. Seperti biasanya, Idris

tidak pernah bicara apa pun mengenai tujuan kepergiannya. Rohayah memang sudah terbiasa ditinggal pergi Idris hingga sehari-hari.

Karena tidak ingin campuri urusan suaminya, Rohayah tak pernah menanyakan pekerjaan suaminya yang hanya tamatan sekolah dasar itu di luar rumah. Oleh masyarakat, Idris dikenal sebagai jawara yang disegani di kampongnya. Sejak tidak meng-

garap sawah milik mertuanya lagi, dia diketahui menjadi petugas keamanan yang merangkap *timer* di halte Cimayang, Kecamatan Menes, Pandeglang.

Sebagai jawara, Idris juga pernah dilibatkan sebagai petugas pengamanan Pemilu-kada Pandeglang di kampungnya. Mungkin karena itu pula, rumah Idris yang berada di RT 02/03, Kampung Kadutanggai Pojok, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, kerap didatangi tamu dari luar desa. “Sebagian saya kenal, sebagian lagi

Bersambung ke him 11 kol 1-7



Bea Masuk Film Impor

Pemerintah Jangan Gentar

Mohammad Akbar, Ratna Puspita

JAKARTA— Protes Motion Pictures Association (MPA), perwakilan produsen film Hollywood di Indonesia, dan Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (IPFII) terhadap aturan baru bea masuk atas hak distribusi impor film, dinilai terlalu mengada-ada. Produser film nasional, Deddy Mizwar, melihat ada upaya untuk mengadu domba antara masyarakat penonton film asing dan pemerintah yang berniat untuk memperbaiki aturan bea masuk (BM) itu. “Sebenarnya, sampai saat ini, masih belum ada sikap resmi dari pihak MPA, tetapi mengapa kita sudah ramai mempermasalahkannya,” kata Deddy kepada *Republika*, Ahad (20/2), di Jakarta.

Pemeran tokoh Nagabonar ini mengakui, hadirnya film asing di In-

donesia sangat dibutuhkan. Terutama, film asing berkualitas untuk memacu para pembuat film nasional untuk melahirkan karya yang berkualitas juga. Namun, dia mengatakan, jika melihat dari sisi pajak yang diberlakukan antara impor film asing dan produksi film nasional, sangat tidak adil.

Deddy menyebutkan, untuk mengimpor film asing, biayanya sangat jauh lebih murah dibandingkan pajak yang dikenakan kepada film Indonesia yang belum sampai diedarkan. Dia mencontohkan, dari biaya produksi sebuah film nasional yang mencapai Rp 5 miliar, pajak yang harus dikeluarkan untuk semua komponen produksi film itu bisa Rp 500 juta. “Sedangkan pajak yang diterima buat sebuah film impor itu, satu kopi hanya Rp 2 juta,” paparnya.

Bersambung ke him 11 kol 1-7

Secara harfiah atau etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, dan berkembang. Artinya, orang yang suka berzakat dipastikan hati dan pikirannya akan bersih, dan hartanya akan berkembang dengan penuh keberkahan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS at-Taubah [9]: 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Sejalan dengan makna tersebut, implikasi spiritual dan rohani dari kesediaan berzakat dan berinfak sangat signifikan pengaruh positifnya terhadap perilaku orang yang berzakat (muzaki). Pertama, muzaki dipastikan akan memiliki etos kerja yang tinggi, aktif dan produktif.

Selalu bekerja, ber-usaha, dan berikhtiar untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, dan memberi kepada orang yang membutuhkan (perhatian QS al-Mukminun [23]: 1-4).

Kedua, dalam mendapatkan penghasilan tersebut, muzaki akan selalu memperhatikan etika dan

akhlak dalam bekerja. Ia tidak mau menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya. Korupsi, menipu, mengambil hak orang lain, apalagi mengambil hak rakyat, tidak akan pernah ada dalam kamus kehidupan muzaki. Pada sisi ini, upaya membangun kesadaran masyarakat untuk berzakat hakikatnya adalah usaha

memberantas perilaku korupsi sampai ke akar-akarnya karena melalui pendekatan akidah syariah, di samping tentu saja melalui norma dan hukum.

Ketiga, muzaki akan memiliki jiwa sosial dan semangat empati yang sangat tinggi—memandang dan merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan dirinya.

hikmah

Oleh **KH Didin Hafidhuddin**

Nilai Spiritual Zakat

Rasa kasih sayang akan selalu terjaga dan terpelihara dengan baik. Kesediaan untuk mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk kepentingan bersama yang lebih besar akan masuk ke dalam struktur rohani dan kepribadiannya.

Inilah yang digambarkan sebagai semangat *taraahum* (saling menyayangi), sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda: “Kau lihat orang-orang Mukmin dalam membangun kasih sayang dan kecintaan di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sa-

kitnya pula, baik dalam panas maupun demamnya”.

Keempat, jika zakat-zakat para muzaki tersebut dikelola dan ditata melalui kelembagaan amal zakat yang amanah, terpercaya, dan profesional, akan melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat dalam membangun kesejahteraan bersama.

Sebuah bangunan kesejahteraan yang ditata atas dasar keimanan dan kepatuhan pada ketentuan syariah Islam, yang tentu saja akan relatif lebih lama dan langgeng. Karena itu, mari kita gali bersama kekuatan umat yang sangat indah dan luar biasa ini. *Wallahu a'lam.* ■

Bakteri Sakazakii

Abidar

Mantan Pegawai Kementerian Kesehatan.

Belakangan ini banyak orang tua yang sempat panik karena susu formula yang mengandung bakteri *Enterobacter (E) Sakazakii* tidak segera diumumkan sesuai hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB). Sampel susu yang diteliti IPB sebenarnya diambil pada 2003-2006. Meskipun demikian, wajar saja jika keresahan itu juga dialami orang tua yang baru memiliki bayi.

Temuan dari IPB bahwa 13,5 persen di antara 74 sampel susu formula mengandung bakteri *E Sakazakii* tidak terlalu mengejutkan. Sebab, Food and Drug Administration (FDA) telah melansir sebuah penelitian prevalensi kontaminasi susu di sebuah negara; di antara 141 susu bubuk formula didapatkan 20 (14 persen) kultur positif *E Sakazakii*.

Berbagai pihak telah memperoleh informasi yang tidak lengkap. Bahkan, diperparah dengan *broadcast* BlackBerry Messenger (BBM) yang menyebutkan nama-nama susu formula yang disebut mengandung bakteri *E Sakazakii*. Dari mana asal mula berita berantai tersebut menjadi tidak penting, tapi dampak buruknya, yakni keresahan dalam masyarakat.

Timbulkan penyakit

Bakteri *E Sakazakii* memang merupakan salah satu jenis bakteri patogen yang bisa menimbulkan penyakit. Sesuai dengan namanya, *enterobacter*, bakteri ini juga ditemukan dalam saluran pencernaan manusia dan hewan.

Masyarakat perlu mewas-

padai *E Sakazakii* karena bakteri jenis ini berpotensi menyebabkan radang selaput otak (meningitis). Masalahnya, bakteri ini bisa masuk dalam darah (bakteremia), penyebaran bakteri patogen dalam jaringan darah (sepsis), radang usus halus dan usus bear (enterokolitis), hingga kematian sel (necrosis).

Meskipun bakteri ini dapat menyerang berbagai kelompok usia, bayi adalah kelompok paling rentan. Risiko makin besar pada bayi berumur kurang dari 28 hari, bayi lahir prematur, bayi dengan berat lahir kurang dari dua kilogram, atau bayi berimunitas rendah. Publikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 13 Februari 2004 menyebutkan, sejak 1961-2003 hanya ditemukan 48 bayi yang sakit karena terinfeksi *E Sakazakii*.

E Sakazakii bukan mikroorganisme normal pada saluran pencernaan hewan dan manusia. Telah ditengarai bahwa penelitian prevalensi kontaminasi susu di sebuah negara; di antara 141 susu bubuk formula didapatkan 20 (14 persen) kultur positif *E Sakazakii*. Berbagai pihak telah memperoleh informasi yang tidak lengkap. Bahkan, diperparah dengan *broadcast* BlackBerry Messenger (BBM) yang menyebutkan nama-nama susu formula yang disebut mengandung bakteri *E Sakazakii*. Dari mana asal mula berita berantai tersebut menjadi tidak penting, tapi dampak buruknya, yakni keresahan dalam masyarakat.

Jarang

Walaupun berbahaya, ternyata kejadian infeksi *E Sakazakii* sangat jarang. Di Amerika Serikat, angka kejadian infeksi *E Sakazakii* yang pernah dilaporkan adalah satu per 100 ribu bayi. Angka kejadian itu meningkat menjadi 9,4 per 100 ribu pada bayi dengan berat lahir sangat rendah (<1,5 kg). Bayi prematur dengan berat badan lahir rendah (kurang dari 2.500 gram) dan penderi-

ta gangguan kekebalan tubuh adalah individu yang paling berisiko mengalami infeksi tersebut. Pada anak sehat belum pernah dilaporkan terjadi infeksi bakteri itu.

Berbagai temuan itulah yang mungkin menjelaskan mengapa di Indonesia belum ada laporan terjadinya korban terinfeksi *E Sakazakii*, meskipun sudah ditemukan banyak susu terkontaminasi. Para peneliti IPB mendapatkan 14 persen, FDA menemukan 13,5 persen produk susu yang mengandung bakteri *E Sakazakii*. Namun, tidak satu pun anak Indonesia yang dilaporkan terinfeksi bakteri tersebut.

Infeksi akibat *E Sakazakii* sangat jarang dan relatif tak mengganggu anak sehat. Tapi, terhadap kelompok anak tertentu dengan gangguan kekebalan tubuh, infeksi bakteri itu bisa mengakibatkan penyakit yang sangat berbahaya, bahkan dapat mengancam jiwa.

Tiga cara

Badan Kesehatan Sedunia (WHO) menjelaskan, ada tiga cara susu formula untuk bayi bisa terkontaminasi *E Sakazakii*. *Pertama*, melalui materi mentah yang digunakan untuk memproduksi susu formula. *Kedua*, melalui kontaminasi dari lingkungan tidak bersih pada saat *caregiver* (baik ibu, suster, maupun lainnya) menyiapkan susu formula sebelum diberikan kepada bayi. *Ketiga*, melalui kontaminasi setelah pasteurisasi.

Karena keterbatasan pengawasan dan sistem pelaporan *E Sakazakii* di banyak negara, besaran masalah akibat bakteri ini pun tidak diketahui. Sebuah literatur di Inggris melaporkan bahwa pada 1961-2003 terdapat 48 kasus bayi sakit akibat *E Sakazakii*. Hasil survei *The US FoodNet* 2002 menunjukkan, angka invasi infeksi *E Sakazakii* pada bayi di

bawah satu tahun sebesar satu per 100 ribu.

Saatnya pemerintah secara tegas mengeluarkan rekomendasi bahwa susu komersial memang bukan produk steril seperti yang direkomendasikan WHO dan FDA. Tindakan preventif ini pasti berisiko lebih ringan karena masyarakat akan lebih waspada dalam pencegahannya. Rekomendasi itu merupakan hal yang wajar karena beberapa negara maju pun melakukan hal yang demikian. Sebaliknya, bila susu bubuk komersial tetap dianggap aman, masyarakat menjadi lengah dalam proses penyaljiannya.

Rekomendasi lainnya adalah cara penyajian susu bubuk formula untuk bayi dengan baik dan benar. Dengan pemanasan air di atas 70 derajat Celcius, bakteri yang ada dalam susu dipastikan akan mati. Kepada anak yang berisiko seperti bayi prematur dan anak dengan gangguan fungsi kekebalan tubuh berat, direkomendasikan memberi susu bayi formula cair siap saji. Susu siap saji dianggap sebagai produk komersial steril karena proses pemanasannya cukup.

Namun, dari berbagai penelitian seperti yang dilakukan WHO dan FDA, jelas bahwa susu bubuk formula bayi bukanlah produk komersial yang steril. Penelitian yang dilakukan BPOM menyebutkan, susu bubuk komersial adalah aman, tetapi sebenarnya hal itu semata-mata disebabkan oleh perbedaan dalam sensitivitas dan spesifikasi alat serta metode identifikasinya.

Heboh temuan IPB tentang susu formula yang mengandung *E Sakazakii*, sekali lagi mengingatkan para ibu yang masih memiliki bayi agar kembali menggunakan air susu ibu (ASI). ASI telah terbukti kehebatannya sebagai anugerah Tuhan untuk menjaga kesehatan. ■

Tajuk

Kongres PSSI: Legitimasi atau Pembaruan?

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan menggelar kongres pada 26 Maret 2011 mendatang di Bali. Awalnya, kongres dilaksanakan pada 19 Maret 2011 di Pulau Bintan. Perubahan yang tampak mendadak ini memunculkan kecurigaan banyak pihak. Bernarkah pemindahan itu karena saran Presiden Asian Football Confederation (AFC), Muhammad bin Hammam, atau karena faktor lain?

Publik Indonesia sangat berharap kongres PSSI kali ini bisa menghasilkan kepengurusan yang berkualitas dan memahami sepak bola nasional serta punya orientasi memajukan persepakbolaan Indonesia. Sebab, dalam dua dasawarsa terakhir, kejayaan sepak bola nasional seakan jalan di tempat. Tak pernah lagi gelar juara singgah ke Tanah Air. Publik sangat merindukan gelar juara dan prestasi yang membanggakan, baik di level Asia Tenggara, Asia, maupun dunia.

Kerinduan akan gelar bergensi inilah yang membuat publik Tanah Air berkali-kali menyerukan Ketua Umum PSSI saat ini, Nurdin Halid, untuk mundur dari kursinya. Sebab, selama dua periode kepemimpinan Nurdin di PSSI (2003-2007 dan 2007-2011), yang akan berakhir April 2011 mendatang, tak ada satu pun prestasi yang dibanggakan. Kemenangan melawan Libya U-23 dan menjadikan Indonesia Juara Piala Kemerdekaan 2008 silam, seakan tak berarti apa-apa. Mengingat, prestasi itu diraih karena lawan mengundurkan diri.

Berbicara prestasi sepak bola nasional selama rezim Nurdin Halid, rasanya tak ada yang bisa dibanggakan. Paling tinggi, hanya spesialis *runner-up*. Yang terbaru, kejuaraan AFF Cup 2010, timnas Indonesia taklur dari Malaysia di partai puncak.

Karena itulah, harapan untuk menyaksikan tim kebanggaan bangsa kembali berjaya minimal di level Asia Tenggara, ada di kongres PSSI kali ini. Perubahan struktur kepemimpinan, pola pembinaan pemain, sistem kompetisi yang berjenjang sehingga bisa menghasilkan pemain nasional yang andal, bisa diwujudkan. Namun, akankah harapan itu terwujud?

Hanya waktu yang bisa menjawab. Kongres PSSI bukan alat untuk melegitimasi ketua umum saja, tapi lebih penting lagi, bagaimana persepakbolaan nasional menjadi lebih baik dan bisa dibanggakan. Munculnya nama George Toisutta dan Arifin Panigoro dalam bakal calon ketua umum PSSI diharapkan ada perbaikan dalam persepakbolaan nasional.

Namun, belum lagi gong perhelatan kongres ditabuh, tim verifikasi PSSI sudah mencoret nama George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai bakal calon ketua umum PSSI. Alasannya, itu sudah sesuai dengan arahan Sekjen FIFA, statuta FIFA, dan statuta PSSI. Dua nama lain yang lolos, yakni Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie, adalah pengurus lama PSSI. Pencoretan nama Toisutta dan Panigoro tentu akan menuai protes dan kecaman. Mengingat mereka diajukan oleh pengurus provinsi (pengprov) dan daerah (pengda) PSSI.

Dua nama bakal calon ketua umum PSSI yang merupakan muka lama itu, membuat optimisme untuk menyaksikan kebangkitan sepak bola nasional semakin memudar. Mengingat, selama kepengurusan mereka, tak ada kemajuan berarti dalam tubuh PSSI terlebih persepakbolaan nasional.

Kehadiran Liga Primer Indonesia (LPI) diharapkan bisa mengangkat persepakbolaan nasional dan berjaya pada level tertinggi. Namun, kompetisi LPI dianggap ilegal. Ancaman pun disampaikan kepada pelatih, pemain, klub, dan wasit. Namun, ancaman itu tak menyurutkan semangat pemain untuk tetap berkompetisi di LPI.

Adakah kemajuan sepak bola nasional selama rezim Nurdin Halid? Henggangnya sejumlah klub ke LPI dari Liga Super Indonesia (LSI) merupakan salah satu bukti nyata, betapa gerahnya klub terhadap kepengurusan PSSI rezim Nurdin Halid yang dianggap gagal. ■

:: suarapublika ::

Jalan Setiabudi Rusak

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Sudah bertahun-tahun, Jalan Setiabudi Jakarta Selatan mengalami kerusakan. Namun anehnya, hingga saat ini tak juga ada perbaikan. Entah siapa yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Sebab, *developer* (pengembang) yang dulu pernah membuat bangunan di lokasi tersebut, dengan seandainya menebangi pohon yang tumbuh dengan rindang. Bahkan, saluran airnya kini mengalami kerusakan. Dan sampai sekarang, belum juga ada perbaikan di sekitar jalan tersebut.

Saya dan beberapa anggota masyarakat pengguna jalan tersebut berpikir ingin melakukan tuntutan hukum, atas kerugian yang dialami dan kenyamanan yang hilang, baik secara materi maupun moril. Sebab, setiap kali melalui Jalan Setiabudi Raya tersebut, hampir tidak ada kenyamanan lagi.

Karena itu, kepada *developer* atau kontraktor dan Gubernur DKI Jakarta, termasuk Wali Kota Jakarta Selatan, serta Camat Setiabudi, kiranya memperhatikan masalah ini. Kami, warga setempat, sangat mengharapkan perhatian bapak. Bila hal ini tidak ada perbaikan juga, kami terpaksa akan membawa hal ini ke pihak yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan, termasuk masalah hukum. Kami berharap, ada penasihat hukum yang mau membantu kami untuk menyelesaikan perkara ini.

Ir Ichwan Ishak MSI
Jl Setiabudi VII No 16 Jakarta Selatan

Jalan Warung Buncit

Perlu Tangga Penyeberangan

Saya membaca berita di harian ini pada 9 Februari 2011, tentang seorang anak yang tewas karena tertabrak *busway* ketika hendak menyeberang jalan. Berkali-kali saya mengingatkan agar pada Jalan Warung Buncit dibuat tangga penyeberangan jalan setiap 100 atau 200 meter. Bila seseorang akan menyeberangi jalan ini, harus melalui empat arus berbahaya, yakni dua jalur *busway* dan dua jalur kendaraan lain.

Bisa dibayangkan akibatnya, apabila seorang kakek, nenek, ibu hamil hendak menyeberangi jalan ini. Bukankah nyawa manusia harus diutamakan?

Supriyo Subagyo
Beji Timur, Depok

Dr O Hasbiansyah

Dekan Fikom Universitas Islam Bandung

Pada masa perjuangan kemerdekaan India, kaum Muslim dan Hindu bahu-membahu bekerja sama menentang kolonialis Inggris. Di antara para pejuang itu, ada Viyaya Lakshmi Pandit, gadis Hindu yang cantik, adig Yawaharlal Nehru dan seorang pemuda Muslim, Dr Said Husain. Keduanya berpendidikan tinggi; keduanya menjalin asmara.

Di samping terlibat perjuangan membela negara, dua sejoli itu juga terlibat upaya memperjuangkan hak asasi mereka untuk bisa bersatu dalam cinta. Kendalanya begitu besar. Semua keluarga Viyaya menentang hubungan cinta mereka. Namun, kedua pemuda yang dimabuk asmara itu tetap bertahan.

Akhirnya, Gandhi, Bapak India itu, turun tangan. Dia bertiara di bawah kaki putri jelita itu. Dia berkata, ia tidak akan mengangkat kepala sebelum Viyaya berjanji bahwa perkawinan itu tidak akan dilangsungkan. Di hadapan tokoh yang sangat berwibawa dan legendaris itu, Viyaya pun patah! Gadis itu akhirnya terpaksa menerima pemuda pilihan Gandhi yang seagama dengannya.

Islam, seperti agama lain pada umumnya, menuntut pengikutnya memiliki keyakinan penuh pada ajarannya. Keyakinan itu akhirnya akan membawa konsekuensi: mempertahankan keyakinan itu dan jika mungkin menyebarkan keya-

kinan itu kepada orang lain.

Islam mengajarkan, mempertahankan keyakinan agama tidak hanya sekedar memperkukuh keimanan pribadi, tetapi juga mempertahankan komunitasnya dari tarikan ajaran lain yang berbeda.

Kasus Ahmadiyah

Ahmadiyah pada awalnya muncul di India dengan tokoh sentralnya Mirza Ghulam Ahmad yang membawa sebuah pemahaman tentang Islam. Setelah tokoh ini wafat tahun 1908, putranya, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, mendeklarasikan bahwa bapaknya adalah nabi. Gerakan ini berpusat di Qadian sehingga sering disebut Ahmadiyah Qadian.

Sementara itu, sebagian pengikut Mirza Ghulam Ahmad yang lain menolak penobatan sang tokoh itu sebagai nabi; ia dipandang sekedar pembaru (mujadid). Kelompok ini berpusat di Lahore sehingga sering disebut Ahmadiyah Lahore.

Di Indonesia, Ahamdiyah Qadian dikenal dengan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sedangkan Ahmadiyah Lahore dikenal dengan nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Dalam kehidupan agamanya, pengikut Ahmadiyah Qadian membangun komunitas eksklusif dan tidak mau berbau dengan komunitas Muslim lainnya. Masjidnya pun tersendiri, sedangkan Ahmadiyah Lahore bisa berbaur dengan komunitas Muslim pada umumnya, termasuk dalam menjalankan ibadah. Kehadiran Ahmadiyah (Qadian) tentu saja menimbulkan kegelisahan bagi sebagian besar ulama Islam.

Melalui kajian mendalam, berbagai lembaga Islam yang

memiliki otoritas telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah (Qadian) adalah ajaran menyimpang, sesat, dan menyesatkan. Lembaga-lembaga yang telah mengeluarkan fatwa itu adalah Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) pada tahun 1974, Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1985, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980, dan dikukuhkan kembali pada tahun 2005. Lalu, muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tahun 2008 yang mengatur keberadaan Ahmadiyah.

Di Pakistan, Ahmadiyah diakui sebagai agama ter-sendiri, tetapi di luar Islam. Di Malaysia dan Brunei Darussalam, Ahmadiyah dilarang sama sekali. Sementara itu, di Indonesia, meskipun sudah ada fatwa MUI dan SKB, eksistensi Ahmadiyah masih kukuh dan bisa berkembang.

Kita memang sangat prihatin dengan munculnya berbagai tindak kekerasan atas nama agama yang terjadi belakangan ini. Kita belum menemukan solusi yang tepat. Usul-an yang dilontarkan tampaknya belum komprehensif karena lebih cenderung hanya menggunakan satu kacamata: pendekatan hukum untuk pelaku tindak kekerasan dengan memprosesnya secara hukum atau pendekatan HAM bagi korban tindak kekerasan, yaitu memberikan perlindungan kepada mereka. Pendekatan ini tentu saja benar, tetapi masih belum lengkap. Pendekatan seperti ini tidak menyentuh akar masalahnya.

Dari berbagai peristiwa kekerasan agama, memang ada kesan terjadinya pembiaran oleh aparat. Amuk massa begitu saja mengalir terjadi. La-

lu, pelaku kekerasannya pun tidak segera ditangani. Kehadiran dan peran negara di sini nyaris tidak ada, atau sangat minimal. Konds seperti ini akhirnya bereskalasi lebih luas, massa makin sering menyelesaikan konflik agama dengan kekerasan.

Negara memang harus menunjukkan kehadirannya melalui aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum dan sebagai “wasit” menengahi berbagai kepentingan warganya.

Di sisi lain, para penganut agama pun butuh perlindungan dari pihak pemerintah. Perlindungan yang dibutuhkan mencakup rasa aman dari gangguan agresivitas penyebaran agama yang berbeda, aman dari pelecehan dan penodaan keyakinan agama oleh pihak mana pun, dan terpeliharanya keyakinan agama dari kemungkinan pemahaman menyimpang.

Dalam hal hadirnya sebuah “keyakinan baru” agama, memang sesuatu yang sangat problematik. Dalam perspektif hak asasi manusia, kemunculan agama apa pun bukanlah persoalan. Ekstremnya, bila pada masa sekarang muncul orang yang mengaku nabi, itu tidak masalah. Orang boleh memiliki keyakinan apa pun. Dari sisi “doktrin” agama, pembiaran yang demikian dapat menimbulkan *chaos* dalam beragama.

Oleh karena itu, penanganan kekerasan agama tidak cukup hanya berdasarkan perspektif hukum dan HAM, tetapi juga harus melibatkan perspektif ajaran agama itu sendiri berdasarkan pemahaman para penganutnya. ■

:: dinamika ::

KPK dan Polri Didesak Minta Temuan PPA TK

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Gayus Lumbuun menyalskan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang hanya menunggu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyerahkan data 42 transaksi mencurigakan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. “Tidak sepatutnya KPK dan Polri bersikap pasif seperti itu,” kata Gayus saat dihubungi *Republika*, Ahad (20/2). Berdasarkan undang-undang, menurutnya, memang PPA TK yang menyerahkan adanya temuan

data mencurigakan di sebuah lembaga negara kepada lembaga penegak hukum. Namun, KPK dan Polri harus meminta data yang sangat penting itu untuk kepentingan penyidikan. Menurutnnya, KPK dan Polri berhak meminta data itu kepada PPA TK. Karena, kalau mereka tidak meminta dan menindaklanjuti temuan itu, kedua instansi tersebut dianggap tidak menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dengan baik. PPA TK juga diminta untuk tidak menunda-nunda memberikan laporan itu kepada KPK dan Polri. Karena, undang-undang juga memerintahkan supaya PPA TK segera memberikan laporan transaksi mencurigakan kepada lembaga penegak hukum. ■ muhammad hafid ed: joko sadewo

Proyek Jalan Sebabkan Pengidap ISPA Meningkat

JAMBI — Proyek pelebaran dan hotmik ruas jalan Tanjung Pauh-Lempur sepanjang 60 km di Kabupaten Kerinci berdampak pada meningkatnya penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) di desa-desa yang dilalui proyek tersebut. Kepala Puskesmas Lempur, Afiandri, mengakui adanya kecendrungan peningkatan penderita ISPA selama proyek pengerjaan jalan dimulai awal 2011. Ada indikasi peningkatan penderita ISPA dari catatan pasien yang berobat ke puskesmas. Setiap hari, kini

rata-rata 3-5 orang mengeluhkan terkena ISPA dengan gejala seperti sesak napas, batuk dan bersin, demam, bahkan mata pedih. “Padahal, sebelumnya amat jarang terjadi, paling dalam seminggu hanya ada satu warga, bahkan lebih sering tidak ada,” kata Afiandri, seperti dikutip *Antara*, Ahad (20/2). Ia mengatakan, proyek pelebaran dan hotmik jalan tersebut mengakibatkan debu tebal sepanjang ruas jalan yang tengah dalam pengerjaan tersebut. Apalagi, faktor perubahan cuaca dari musim hujan ke kemarau membuat tanah yang terus-menerus dilewati kendaraan tersebut menjadi kering dan beterbangan menjadi debu. ■ ed: joko sadewo

KPK tak Wajibkan Mega Datang

Muhammad Hafid

Tim Hukum DPP PDIP akan mewakili Megawati ke KPK.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya akan sekali memanggil mantan presiden sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Seperti telah dijadwalkan, hari ini (21/2), KPK meminta keterangan Megawati sebagai saksi dalam kasus cek perjalanan terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia periode 2004-2009. “KPK menyerahkan segala keputusan kepada Megawati untuk menghadiri atau tidak menghadiri an itu,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, kepada *Republika*, Ahad (20/2).

Johan menegaskan, jika pada Senin (21/2) Megawati tidak memenuhi panggilan penyidik, KPK tidak akan melakukan pemanggilan ulang. Johan mengakui, KPK tidak memerlukan keterangan Megawati dalam proses penyidikan kasus cek perjalanan. Pemanggilan Megawati, kata Johan, untuk memenuhi hak beberapa tersangka yang meminta diadikarkannya saksi meringankan. Sejumlah tersangka kasus

cek perjalanan dari Fraksi PDIP, yaitu Max Moein dan Poltak Sitorus, pernah meminta KPK menghadirkan Megawati sebagai saksi meringankan. Selaku pimpinan PDIP, Megawati dianggap mengetahui soal aliran dana cek perjalanan itu. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua KPK Haryono Umar menyatakan tetap mengharapkan kehadiran Megawati memenuhi panggilan penyidik. “Kita akan tunggu kedatangan Megawati besok (hari ini—Red),” kata Haryono, kemarin.

Haryono menjelaskan, KPK telah mengirimkan undangan secara resmi kepada Megawati untuk hadir sebagai saksi meringankan terkait kasus cek perjalanan. Namun, PDIP menyatakan, yang akan datang memenuhi panggilan KPK hari ini adalah Tim Hukum DPP PDIP.

Jika memang yang datang adalah Tim Hukum DPP PDIP, Haryono mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan soal ketidakhadiran Megawati. KPK akan mendengar dan mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil dari penjelasan Tim Hukum DPP PDIP itu.

Ketua Departemen Hukum DPP PDIP, Gayus Lumbuun, yang dihubungi kemarin, menyatakan, Megawati tidak akan memenuhi panggilan KPK. Gayus menegaskan, Megawati tidak memiliki hubungan apa pun dengan kasus cek perjalanan. “Pemanggilan Megawati penuh unsur politis,” kata Gayus.

Menurut Gayus, permintaan dua tersangka, yakni Max Moein dan Poltak Sitorus, agar Megawati diperiksa KPK sebagai upaya membalas sakit hati keduanya kepada PDIP. Alasannya, Max dan Poltak dianggap bukan kader asli PDIP. Max pernah diberhentikan sebagai anggota DPR oleh Fraksi PDIP, sedangkan Poltak adalah orang yang pernah keluar dari PDIP. “Coba kita cermati, hanya mereka berdua yang meminta Megawati sebagai saksi meringankan, sedangkan kader-kader asli PDIP seperti Panda Nababan dan yang lainnya tidak memintanya.”

Ketua Tim Kuasa Hukum para tersangka cek perjalanan dari PDIP, Petrus Selestinus, menilai ketidakhadiran Megawati sebagai upaya menghalangi KPK dalam pemberantasan korupsi. Petrus meminta KPK tegas dalam merealisasikan rencana pemanggilan terhadap Megawati.

Terkait pemanggilan Megawati, ribuan kader PDIP Kota Cilegon hari ini berencana mendatangi KPK. Ribuan kader yang dikumpulkan pihak DPC PDIP rencananya akan berangkat ke KPK dengan menggunakan bus dari tol Cilegon Timur dan Barat. “Kami menolak pihak KPK memanggil dan memeriksa ketua umum kami,” kata Sekretaris DPC PDIP Kota Cilegon, Agus Suparman, seperti dikutip *Antara*, kemarin.

■ ed: andri saubani



TAHTA AIDILLA

PKS Jateng Usul Sultan Jadi Capres 2014

Bowo Pribadi

SEMARANG — Jelang Musyawarah Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (Mukernas PKS) tanggal 24-27 Februari di Yogyakarta, PKS Jawa Tengah usulkan nama Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menjadi salah satu kandidat presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang.

Ketua DPW PKS Jawa Tengah, A Fikri Faqih, mengatakan pemunculan nama-nama calon presiden harus dimulai sejak dini untuk menumbuhkan kaderisasi kepemimpinan nasional. Untuk itu, PKS Jawa Tengah akan usulkan agar DPP segera melakukan komunikasi politik kepada tokoh-tokoh nasional agar bersedia diusulkan sebagai calon presiden (capres). “Salah satu nama atau figur tokoh nasional yang kami rekomendasikan dan layak diusulkan adalah Sri Sultan,” ucap Fikri di Semarang, Ahad (20/2).

Selain karena faktor ketokohan, Sri Sultan dinilai Fikri mampu menyelesaikan berbagai masalah tanpa konflik. Pascagempa besar Yogyakarta tahun 2006, misalnya, Sultan mampu memimpin rekonstruksi dengan tata kelola yang profesional. Demikian pula dengan isu keistimewaan Yogyakarta. Tanpa kapasitas dan ketokohan Sultan, mungkin persoalannya akan berbeda. Gejala masyarakat bisa disikapi dengan arif dan ditangani dengan damai.

Sultan juga dinilai meru-

pakan tokoh nasional yang mempunyai peluang untuk mempererat kembali persatuan bangsa. “Oleh karena itu, nama tokoh nasional ini kami usulkan,” lanjut Anggota Majelis Syuro PKS Jawa Tengah ini.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendi, melihat bahwa PKS semakin matang dan dewasa dalam berpolitik. Itu terlihat dari pilihan sikap PKS yang makin terbuka. “PKS semakin lama semakin dewasa karena mulai menyadai bagaimana konteks politik dalam lingkai keindonesiaan,” kata Bachtiar.

Pada 1999 dan 2004, menurut dia, PKS belum seperti ini. Saat itu, identitas basis tradisional PKS yang lebih menonjol dibanding men-

gusung nilai-nilai keindonesiaan. “PKS mulai melakukan ‘pribumisasi’ dengan memunculkan nilai-nilai keindonesiaan dalam berpolitik. Itu yang saya maksud PKS semakin matang dan dewasa.”

Pengamat politik Alfan Alfian mengatakan, sudah ada upaya dari elite-elite PKS bahwa mereka entitas politik yang tidak eksklusif sehingga mau menerima masukan-masukan dari eksternal partai. “Tak hanya itu, mereka juga menunjukkan tidak lagi bernuansa transnasional, tapi lebih mengedepankan nilai kultural Indonesia dan itu terlihat dari penampilan fisik maupun materi pemikiran dua tokoh PKS, Anis Matta dan Fachri Hamzah.” ■ ed: joko sadewo

Muchdi PR ‘Merapat’ ke PPP

Eric Purnama Putra, Agung Budiono

SURABAYA — Tiga partai politik akan segera menyusul Partai Bintang Reformasi (PBR) untuk bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pemilu 2014.

“Sudah ada tiga parpol yang melakukan pembicaraan secara matang dengan kami,” kata Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Prabowo Soebianto, di Surabaya, Ahad (20/2).

Namun, Prabowo tak bersedia menyebutkan nama parpol mana yang bakal bergabung. Ia mengaku tidak enak kalau harus menyebutkan nama, mengingat masih

dalam proses pembicaraan. “Saya pasang target setinggi-tingginya. Dengan bergabungnya beberapa partai, seharusnya Gerindra bisa mendapat 10 sampai 12 persen suara dalam Pemilu 2104,” kata Prabowo.

Ironisnya, saat sejumlah partai merapat ke Gerindra, Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Muchdi PR justru berpindah ke PPP. “Rencana kepindahan itu ibarat haliilantar di siang bolong (mengagetkan—Red),” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy menyambut baik sejumlah tokoh Islam yang saat ini san-

ter dikabarkan akan bergabung dalam wadah PPP. “PPP sangat terbuka karena pada dasarnya PPP adalah rumah besar bagi politik Islam,” kata Chozin, saat Muswil PPP Provinsi Maluku Utara, dan peringatan hari lahir ke-38 PPP di Ternate, Maluku Utara, Ahad (20/2), seperti dikutip *Antara*.

Chozin menyebutkan, selain KH Hasyim Muzadi dan Muchdi PR, juga muncul nama mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan menteri pemuda dan olahraga Adyaksa Dault, dan mantan menteri pemberdayaan perempuan Khofifah Indar Parawansa. “Masih dalam tataran wacana, selain Pak Kiai Hasyim Muzadi dan Muchdi

PR, juga ada Pak Jimly, Adyaksa Dault, dan Khofifah Indar Parawansa. Meski masih wacana, semoga akan menjadi nyata,” ucap dia.

Ketua DPP PPP Akhmad Muqowam mengatakan, berpartai merupakan hak setiap warga negara. Namun, menurut dia, pihaknya akan mengonsultasikan terlebih dahulu dengan beberapa pihak di internal terkait latar belakang Muchdi. “Kita pertimbangkan dulu, tapi kami nunggu apa benar-benar ada berkas pendaftaran bergabung dari dia,” kata Muqowam. Ia mengaku belum mengetahui motif sesungguhnya kepindahan Muchdi ke PPP.

■ ed: joko sadewo

Amien Menduga Banyak Mafia Hukum di KPK

SEMARANG — Mantan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penuh dengan mafia hukum dan makelar kasus. Akibatnya, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi terhambat.

Pernyataan keras ini disampaikan Amien Rais, sesuai pelantikan pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Semarang, seperti dikutip *Antara*, Sabtu (19/2). “Terserah jika orang lain mau menganggap KPK itu sebagai malaikat, tapi saya yakin kalau lembaga yang digadagadag dapat memberantas korupsi itu penuh dengan mafia,” kata Amien.

Menurut dia, saat ini, keberadaan KPK perlu dikaji ulang, terkait dengan kinerjanya yang terkesan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. “KPK hanya menangani kasus korupsi yang kecil-kecil, sedangkan korupsi yang besar dan melibatkan sejumlah pejabat negara tidak ada kejelasan.”

Kritik serupa sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin (Partai Golkar) dan Gayus Lumbuun (PDIP). Mereka mendesak KPK tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan beberapa politisi. “Yakni, dipilih-pilih dulu sesuai keinginan, terus baru ditebangi. Segera

hentikan,” kata Aziz Syamsudin seperti dikutip *Antara*. Jika KPK ingin menegakkan hukum, harus berdasarkan skala prioritas yang dianggap paling merugikan negara. “*Kan* masih ada kasus Century, Damkar. Dan, untuk kasus suap terhadap Johnny Aleen (Politikus Demokrat) juga sudah ada fakta persidangan. Semua kasus itu lebih merugikan negara karena diduga ada uang negara yang hilang,” kata dia.

Aziz mendesak agar KPK segera memanggil Miranda Goeltom sebagai pihak utama yang diduga melakukan penyuapan. “Ini aneh, yang disuap ditangkapi, tetapi yang menyuap malah belum diungkap. Untuk itu, periksa

saja dulu Miranda, dan untuk Bu Nunun menyusul kemudian,” ucapnya.

Anggota Komisi III lainnya, Gayus Lumbuun, meminta KPK jangan tebang pilih. “KPK terkesan tebang pilih dan diduga telah menjadi alat kekuasaan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pejabat dan politisi,” kata Gayus.

Ia mencontohkan dugaan kasus korupsi pemilihan deputy Bank Indonesia, Miranda Goeltom. KPK hanya menyerjat politisi PDIP dan Golkar. Sedangkan, kasus-kasus mega korupsi yang diduga melibatkan pejabat, politisi, dan partai penguasa sama sekali belum tersentuh hukum. ■ ed: joko sadewo

Innalillahi Wa Innailaihi Raji’un

Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan/Karyawati dan Keluarga Besar Perum BULOG menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya :

Bapak Letjend TNI (Purn) H. Bustanil Arifin, SH
dalam usia 85 Tahun
di RS Cedars Sinai Los Angeles, AS
pada hari Minggu, 13 Februari 2011

**Teriring Doa :
Semoga Allah SWT menerima amal baiknya, memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Dan kepada Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.**



FESTIVAL BUDAYA JATINEGARA
Warga menyaksikan kesenian tarian naga saat berlangsungnya ‘Festival Budaya Jatinegara’ di kawasan Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Ahad (20/2). Selain tarian naga, arak-arakan pawai sepanjang 700 meter ini juga dimeriahkan kesenian ondel-ondel, reog Ponorogo, calung, dan kesenian dari sejumlah daerah lain.

EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA

MUI: Ahmadiyah Kuda Troya Pemecah Belah

A Syalaby Ichsan

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ichwan Syam menilai, ajaran Ahmadiyah dapat menjadi kuda troya yang memecah belah kerukunan bangsa. Menurutnya, terdapat indikasi adanya kepentingan-kepentingan yang membongceng aliran yang dianggap sesat ini. “Ahmadiyah menjadi kuda troya untuk melonggarkan kerukunan Indonesia. Mereka memecah belah,” kata Ichwan saat dihubungi *Republika*, Sabtu (19/2). Ichwan menganggap banyak kepentingan seperti kebebasan tanpa batas, demokrasi, hingga kekerasan yang mengais kasusnya Ahmadiyah. Oleh karena itu, Ichwan menolak jika Ahmadiyah diizinkan hidup sebagai or-

ganisasi. Ichwan pun mengungkapkan, MUI menawarkan penyelesaian yang bisa dibenarkan secara agama dan secara hukum negara. Untuk penyelesaian agama, Ichwan mengajak Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Namun, jika menolak, MUI meminta Ahmadiyah untuk menjadi agama di luar Islam sehingga bisa hidup berdampingan dengan umat Islam secara damai. Sementara itu, Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM), Mahendradatta, menilai Presiden SBY memiliki andil dalam terjadinya insiden Cikeusik. Hal ini karena pemerintah tidak membekukan Ahmadiyah yang melanggar Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Padahal, menurutnya, Undang-Undang PNPS 1/1965 memberi wewenang Presi-

den untuk melakukan hal itu. “Kita sedang mendalami pembiaran yang dilakukan Presiden,” kata dia, Ahad (20/2). Insiden Cukeusik, menurut Mahendra, merupakan dampak dari tidak digunakannya wewenang pembubaran Ahmadiyah oleh Presiden. Ia menambahkan, akibat perbuatan itu, masyarakat yang menjadi korban, baik korban terungkap maupun korban bentrokan. Mahendra mengutip data MUI Cikeusik yang menyatakan penambahan pengikut Ahmadiyah di sana. “Dari delapan orang, menjadi 25 orang dengan melakukan dakwah *door to door*,” jelas Mahendra. Padahal, SKB melarang Ahmadiyah mendakwahkan ajarannya. Sekjen DPP PPP Irgan

Chairul Mahfiz meminta agar polisi juga menindak provokator dari Ahmadiyah. “Polisi harus adil. Polisi harus usut juga tiga provokator dari Ahmadiyah, yaitu Deden, Suparman, dan Arif,” kata Irgan. Ketiga orang Ahmadiyah ini yang justru menjadi provokator dan pemicu terjadinya bentrokan di Cikeusik, Banten. “Deden *kan* justru yang minta pada polisi saat itu agar terjadi bentrok saja. Kemudian, Suparman yang rumahnya menjadi tempat kegiatan Ahmadiyah dan Arif yang merekam gambar kejadian bentrok itu,” tambah Irgan. Saat ditanya bagaimana sikap PPP terhadap Ahmadiyah, Irgan mengungkapkan bahwa sikap PPP tegas mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah. ■ c42 ed: joko sadewo

Mayoritas Publik Ingin Ahmadiyah Dibubarkan

Kekerasan antarumat beragama di Indonesia kembali terjadi. Dalam dua pekan, kekerasan beruntun terjadi di sejumlah daerah. Pertama, kekerasan di Cikeusik, Pendeglang, Banten (6/2); kedua, di Temanggung (8/2); ketiga, penyerbuan sekelompok massa di pesantren Yapi, Bangil, Pasuruan (15/2); dan keempat, penyerangan tempat pengajian sebuah tarekat di Indramayu (16/2). Konflik yang melibatkan Ahmadiyah sudah sering terjadi. Tidak saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri, seperti Pakistan dan India. Karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam, yakni mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Liga Dunia Islam (Rabithah ‘Alam Islami/RAI) pada 1974 mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang sesat dan menyesatkan.

Pada 2008, Menteri Agama bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang melarang Ahmadiyah menyebarkan ajarannya di Indonesia. Kenyataannya, keberadaan SKB ini pun tak banyak menghasilkan. Kekerasan di Cikeusik adalah buktinya. Tiga orang jemaat Ahmadiyah dinyatakan tewas, sementara sejumlah pelakunya sudah ditahan aparat kepolisian.

Bagaimana sebaiknya menyikapi keberadaan Ahmadiyah di bumi pertiwi ini? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Untuk mendapatkan jawabannya, *Republika Online* (www.republika.co.id) menyelenggarakan *polling*.

Jajak pendapat ini dilakukan sejak beberapa hari setelah terjadinya kekerasan pada jemaat Ahmadiyah di Cikeusik. Dimulai pada Kamis (10/2) dan berakhir pada Sabtu (19/2). Ada 21.003 pengunjung *Republika Online* yang ikut berpartisipasi dalam jajak pendapat ini. Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat, latar belakang agama, dan lintas wilayah.

Hasilnya, sebanyak 54,23 persen atau sekitar 11.389 orang menyatakan sebaiknya pemerintah membubarkan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari bu-

mi pertiwi ini dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Dari 21.003 pengunjung, sebanyak 1.655 orang atau sekitar 7,88 persen meminta supaya pemerintah melarang penyebaran Ahmadiyah di bumi Indonesia dengan cara apa pun. Dan, sebanyak 7.959 orang (37,89 persen) menghen-

daki agar pemerintah menjadikan Ahmadiyah sebagai aliran kepercayaan dengan menanggalkan atribut Islam.

Dari *polling* ini, tampak jelas bahwa mayoritas publik menghendaki agar pemerintah secara tegas membubarkan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan menyatakannya organisasi terlarang.

Berikut hasil *polling* yang dilakukan *Republika Online* melalui situs www.republika.co.id.

Hasil Jajak Pendapat

Konflik antara penganut Ahmadiyah dan umat Islam kembali terjadi. Manakah dari opsi berikut yang menurut Anda terbaik diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah?

Melarang penyebaran Ahmadiyah
7,88 persen (1.655 orang).

Menjadikan Ahmadiyah sebagai aliran kepercayaan dengan menanggalkan atribut Islam
37,89 persen (7.959 orang).

Membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan menyatakannya organisasi terlarang
54,23 persen (11.389 orang).

Bagi pembaca *Republika* ataupun pengunjung *Republika Online* dapat berpartisipasi mengikuti jajak pendapat (*polling*) yang diselenggarakan *Republika Online* melalui situs www.republika.co.id. Kami akan senantiasa melakukan *polling* atas berbagai persoalan aktual yang terjadi di masyarakat. Hasil *polling* akan dipublikasikan setiap Senin di *Harian Republika*. ■ syahrudin el-fikri

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

STMIK AMIKOM

YOGYAKARTA

MANAJEMEN INFORMATIKA (D III)

TEKNIK INFORMATIKA (D III)

MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA (S 2)

SISTEM INFORMASI (S 1)

TEKNIK INFORMATIKA (S 1)

“Satu-satunya dari Indonesia yang dijadikan Contoh oleh UNESCO sebagai Perguruan Tinggi Swasta Dunia Model Private Entrepreneur” *

*) Laporan UNESCO, A New Dynamic: Private Higher Education, World Conference on Higher Education 2009

20% dari Alumni ditargetkan jadi PENGUSAHA

8 PRESTASI DUNIA

4 ASIA PACIFIC INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AWARD

2 APEC DIGITAL OPPORTUNITY CENTER (ADOC) AWARD

1 ASEAN DEVELOPMENT CITRA AWARD

1 URBANIMATION INTERNATIONAL AWARD

SEKOLAH TINGGI NO.1 DI INDONESIA (Webometrics, Juli 2010)

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2011/2012

PENDAFTARAN

Gel. Khusus : 3 Januari 2011 s.d 26 Maret 2011

Gel. I : 28 Maret 2011 s.d 30 April 2011

Gel. II : 2 Mei 2011 s.d 25 Juni 2011

Gel. III : 27 Juni 2011 s.d 19 Agustus 2011

Tempat Pendaftaran:

Kampus Terpadu STMIK AMIKOM Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara Condong Catur Yogyakarta

Telp. (0274) 884201 ekstensi 101, Faks (0274) 884208

UTARA

Tempat Kuliah

ORANG BERDASI

pmb.amikom.ac.id

Apa kata Alumni ...

“Jujur saja, dulu saya tidak tertarik dg dunia komputer. Saya masuk AMIKOM cuma untuk mengisi waktu menunggu UMPTN berikutnya. Namun satu semester kemudian, saya menjadi benar-benar cinta dg dunia komputer. Ilmu-ilmu baru yang diberikan serta manajemen kekeluargaan yang diterapkan oleh Yayasan AMIKOM begitu berkesan sehingga saya tidak pernah bisa melupakan kampus kecil saya dulu yang kini telah menjadi megah. Thanks AMIKOM, you show me the way”

HERBIROWO ADJIE, S.KOM

System Analyst, PT Bukit Makmur

Mandiri Utama Jakarta

“... Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang dapat saya terapkan di dunia kerja, dan di AMIKOM saya mendapatkan ilmu kepemimpinan dan kemandirian sehingga lebih menambah kepercayaan diri saya di dunia kerja.”

SUSIH SETYOWATI

Business Manager

eStore Yogyakarta

“Dasi melambangkan profesionalisme, dengan mengenakan dasi membuat saya berperilaku professional setiap saat. Saya tidak pernah menyesali pilihan saya meninggalkan kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di yogyakarta untuk belajar di STMIK AMIKOM, karena STMIK AMIKOM membekali mahasiswanya tidak hanya dengan satu senjata saja untuk menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha...”

IWAN J. FIRMANSYAH, S.KOM

IT Support Call Center Telkomsel

Surabaya

“STMIK AMIKOM telah memberikan pendidikan sikap mental positif untuk menyiapkan pemimpin masa depan”

ARYANTO YUNIAWAN, S.KOM

General Manager

PT. Mataram Surya Visi

“Jujur sebelum masuk AMIKOM saya orangnya pendiam dan tidak percaya diri. Tapi semua berubah ketika masuk AMIKOM. Kepercayaan diri, semangat untuk berkembang dan kemauan serta kerja keras terbentuk. Saya merasakan betul perubahan dalam diri saya, dan ketika bekerja sungguh saya merasakan betapa beruntungnya pernah menjadi bagian dari AMIKOM. Bagi saya AMIKOM telah memberikan landasan dan pondasi yang kuat bagi karir dan pribadi saya”.

TE. ASEP NURDIN, M.Kom.

Puket I STMIK Serang Banten

“Pola Pikir dan ide kreatif yg dimunculkan oleh STMIK AMIKOM membuat saya bisa berusaha sendiri dan bertahan sampai sekarang.”

AGUS SETIAWAN, S.KOM, MBA

Pimpinan Chamber Training Center

Denpasar Bali dan arpatechnology.com

“Saya mendapatkan ilmu yang bisa dipraktekkan di dunia kerja, seperti Kepemimpinan dan Keyakinan Diri”

SARIMUN

Manajer/ Programmer,

Jakarta

“ Pendidikan di STMIK AMIKOM telah mempersiapkan jalur karir bagi mahasiswa...”

ASHI SUBAGYO

Chief Executive Officer

PT. Totalindo, Jakarta

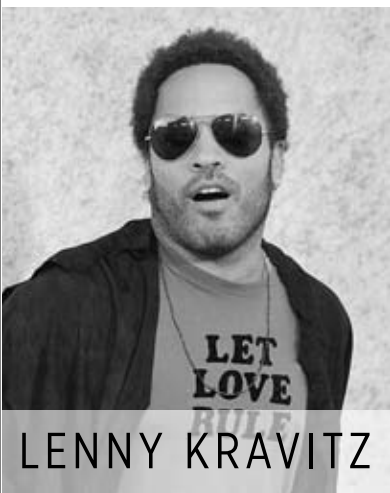
“AMIKOM telah memberikan pengetahuan dan skill/ hetrampilan yang saya butuhkan di dunia kerja. Dengan didukung fasilitas yang lengkap, suasana akademik (academic atmosphere) yang nyaman dan teknologi terkini (uptodate) proses belajar di STMIK AMIKOM terasa lebih menyenangkan.”

WAHYU SIGIT SANYOTO, S.KOM

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak,

DepartemenKeuangan RI

Untuk Warga Kulit Hitam



LENNY KRAVITZ

Setelah ‘menghilang’ selama tiga tahun, penyanyi dan musisi Lenny Kravitz siap merilis album terbarunya, “Black and White America”. Untuk album terbarunya ini, dia berjanji, album ini akan menjadi album yang paling kental musikalitasnya.

Pada *billboard.com*, Kravitz mengakui, judul album tersebut diambil dari pengalamannya sendiri yang tumbuh di antara dunia hitam dan putih. “Hidupku selalu berisi dengan pertentangan. Ini tak hanya merefleksikan hidupku dan apa yang telah aku alami bersama orang tuaku serta apa yang aku lihat sepanjang hidup, tetapi juga di mana tempat kita berpijak saat ini, di negara ini,” papar pria berusia 46 tahun itu.

Album ini akan menjadi album kesembilan Kravitz sepanjang kariernya. Rencananya, album tersebut akan rilis pada pertengahan 2011. ■ reuters/endah

Rindu Naik Panggung Festival

Penyanyi Ika Putri ternyata masih menyimpan kerinduan yang besar untuk kembali lagi naik panggung festival. Bagi Ika, panggung festival bukanlah tempat yang asing. Sebelum meniti karier sebagai penyanyi profesional, Ika pernah merengkuh gelar bergengsi dari pentas Shanghai Song Festival 2001.

Tampaknya, keinginan solois asal Surabaya ini akan terwujud lantaran pada pertengahan tahun ini dirinya akan tampil dalam sebuah kompetisi musik di Eropa. “Di sana, aku *kan* bakal bertemu banyak orang. *Nah*, di sana aku juga sekaligus mengukur kemampuan aku sudah di mana di antara para penyanyi lainnya,” katanya saat ditemui di Jakarta pekan lalu.

Selain mempersiapkan diri untuk kembali ke panggung festival, Ika juga tengah menggodok sebuah album baru. Album tersebut nantinya berisi sekitar 11 lagu. “Kebetulan, kemarin aku sudah menabung tujuh lagu. Selain itu juga, aku dapat dua lagu tambahan lagi dari Bebi Romeo. Aku berharap semoga semua rencana ini bisa berjalan sesuai harapan,” ucapnya. ■ mohammad akbar; ed: endah hapsari



IKA PUTRI

DOK REP



FOTO-FOTO: ANTARA

SECADAS BAJA

Tidak hanya menyajikan lagu-lagu, mereka juga piawai ‘mengolah’ panggung.

Oleh **Mohammad Akbar**

Matap. Satu kata ini mampu menggambarkan gebrakan Iron Maiden, band *heavy metal* legendaris asal Inggris, untuk Jakarta. Di depan puluhan ribu penggemar fanatik yang memadati Pantai Karnaval Ancol, Bruce Dickinson (vokal), Steve Harris (bass), Dave Murray (gitar), Adrian Smith (gitar), Jannick Gers (gitar), dan Nikko McBrain (drum) membawakan sekitar 16 lagu dengan total. Mereka tampil dengan prima meski usia para personelnya rata-rata sudah di atas 50 tahunan.

Ketika intro lagu terdengar sebagai musik latar dan cahaya panggung berpendar, Bruce Dickinson melantunkan nomor perdana *The Final Frontier*.

Namun, penampilan awal Iron Maiden terasa ‘garing’. Agaknya, lagu yang berasal dari album teranyar Iron Maiden itu belum

mampu langsung memancing para penggemarnya untuk bernyanyi bersama. Pekik para pemuja Iron Maiden ini hanya terdengar singkat di akhir lagu. Setelah itu, giliran *Elrorado* yang baru-baru ini berhasil meraih penghargaan Grammy.

Suasana terasa hangat lantaran 2 *Minutes to Midnight* yang diambil dari album *Powerslave* (1984) terdengar. Penonton seolah larut dalam lagu itu dengan bernyanyi bersama hingga lagu usai.

Untuk menyemangati terus penonton, sang vokalis tidak bosan-bosan meneriakkan yel-yel khasnya saat tampil di panggung. “*Scream for me, Jakarta!*” cetusnya kepada penonton untuk turut bernyanyi. Ajakan yang langsung disambut dengan histeria dari seluruh penonton.

Dickinson tampaknya kaget menyaksikan antusiasme penonton. Dengan hangat, pria berusia 52 tahun ini menyapa. Selanjutnya, lagu-lagu kondang Iron Maiden yang kerap tampil dalam konser-konsernya seperti *The Trooper*, *Fear of The Dark*, *The Evil That Men Do*, dan *Iron Maiden* mengalun.

Saat membawakan *The Trooper*, *hits* yang berasal dari album keempat, *Piece of Mind* (1983), Bruce Dickinson berganti kostum. Ia tampil dengan seragam tentara Inggris berwarna merah sambil mengibarkan bendera Britania Raya. Koor massal lainnya juga kembali terdengar lantang ketika memasuki lagu *Fear of The Dark*.

Lantunan lagu-lagu rock itu juga kian menarik dengan *backdrop* panggung yang terus berganti di antaranya *backdrop* yang mengambil sampul album *The Final Frontier*.

Konsisten

Di pengujung penampilannya, ‘Eddie the head’, yang menjadi maskot panggung dalam setiap kali konser Iron Maiden, tampil pula ke atas panggung.

Selama hampir 2,5 jam tampil, seluruh personel tampak mampu menjaga konsistensi staminannya di atas panggung. ‘Energi penyanyinya kelihatan sekali. Loncat sana, loncat sini. Atraktif sekali,’ kata Jikun, gitaris grup band rif memberikan komentarnya soal penampilan Iron Maiden.

“Memang, di bagian akhir sudah terlihat *ngos-ngosan* juga. Apalagi, pas membawakan *encore* (lagu tambahan,red) *Number of The Beast*, artikulasi menyanyi sudah berkurang. Sepertinya sudah capek sehabis *nyetir* pesawat,” Jikun kembali berkelakar.

Namun, “Secara keseluruhan, penampilan mereka memang oke. Mereka tidak hanya menjual lagu, tetapi juga piawai mengatur *blocking* panggung, menata *gimmick* di atas panggung,” ujar Jikun kembali.

Konser Iron Maiden di Jakarta ini merupakan rangkaian dari tur album baru, ‘The Final Frontier World Tour 2011’. Konser diawali di Moskow, Rusia, pada 11 Februari lalu dan Singapore Indoor Stadium pada 15 Februari. Setelah Jakarta, mereka akan melanjutkan ke Bali pada 20 Februari.

Selama 66 hari, mereka akan berkeliling dunia ke 13 negara, mengunjungi 26 kota, sekaligus menggelar 29 konser kolosal di sana. Tur *leg* pertama ini ini direncanakan bakal berakhir di St Petersburg, Rusia, pada 10 Juli 2011 mendatang. ■ antara; ed: endah hapsari

:: acara tv ::

TV ONE

12.00 Kabar Siang
13.30 Nuansa 1000 Pulau
14.00 Yang Terlupakan
14.30 Jendela Usaha
15.00 Kabar Pasar
16.00 Local Documentary
17.00 Bang One Show
17.30 Kabar Petang
19.30 Suara Keadilan
20.30 Apa Kabar Indonesia Malam
22.30 Documentary One
23.30 Kabar Arena

TVRI

12.00 Warta Siang
13.00 Jendela Dunia
14.00 Kuis Anak SMU
15.00 Percik Renungan
16.00 Dialog Aktual
17.00 Kuis Anak SMP Aja Tahu
18.00 Jendela Dunia
19.00 Warta Malam
20.30 Suku Suku
21.00 Indonesia Bermusik
22.00 Bincang Malam
23.30 English News Service

RCTI

12.00 Seputar Indonesia Siang
12.30 Sergap
13.00 Sinema Siang
15.00 Kabar Kabar
16.00 Minta Tolong
17.00 Seputar Indonesia
17.30 Lagu Cinta Nirmala
19.30 Sinetron: Putri Yang Ditukar
21.00 Mega Sinetron
22.30 Mega Sinema
00.30 Box Office Movie

SCTV

12.00 Liputan 6 Siang
12.30 FTV Siang
14.30 Status Silebritis
15.00 Cinta dan Uya
17.00 Liputan 6 Petang
17.30 Uya Emang Kuya
18.00 Islam KTP
21.00 Pesantren & Rock n Roll
22.30 Sinema Utama

MNC TV

12.00 Cerita Siang
13.00 Layar Spesial
14.30 Cerita Sore
16.00 Lintas Petang
17.30 Disney Club
18.30 Animasi Spesial
19.00 Sinema Utama
20.30 Sinema Utama
22.30 Cerita Pilihan
23.00 Demi Bangsa

INDOSIAR

12.00 FTV Siang
14.00 Happy Song
15.00 KISS Sore
15.30 Fokus Sore
16.30 Cruel Temtation
17.00 Arti Sahabat
18.00 Dia Anakku
19.00 Nada Cinta
20.00 Cinta Fitri Season 7
21.00 Antara Cinta dan Dusta
22.00 Mega Asia
00.00 Angling Dharma

METRO TV

13.05 Zero to Hero
13.30 Jakarta Jakarta
14.05 Metro Xin Wen
15.05 Bisnis Hari Ini
15.30 Public Corner
16.05 Discover Indonesia
16.30 Metro Highlight
17.05 Metro Hari Ini
19.05 Suara Anda
20.30 Prime Interview
21.05 Top Nine News
21.30 Sentilan Sentilun
22.05 Ecinomic Challenges
23.05 Metro Realitas
23.30 Metro Sports

GLOBAL TV

12.00 Awas Ada Sule
13.00 Momon
14.00 Petualangan Panji
15.00 Hand Made
15.30 Fokus Selebriti
16.00 Berita Global
17.00 Mong
19.00 Super Hero Kocak
20.00 Belly of The Beast
22.00 The Faculty

ANTV

12.00 KLIK!
13.30 Sinema Siang
15.30 Sinema Spesial
17.30 Katakan Katamu
18.30 Super Game
20.05 Ripleys Believe It Or Not
21.00 Petir Express
22.00 Topik Kita
22.30 World Most Amazing Video
00.00 Topik Malam

TRANS TV

12.00 Reportase Siang
12.30 Jelang Siang
13.00 Bingkal Berita
14.30 Extravaganza Pilihan
16.00 Kejara Tayang
17.00 Reportase Sore
18.00 Jika Aku Menjadi
18.45 Sketsa
19.15 3 Sahabat
21.15 Bioskop TransTV
23.15 Bioskop TransTV

TRANS 7

12.00 Selebrita Siang
13.00 Laptop Si Unyil
14.00 Dunia Air
15.00 Koki Cilik
16.00 Jejak Petualang
16.30 Redaksi Sore
17.00 Mancing Mania
18.00 Wara-Wiri
19.30 On The Spot
20.00 Opera Van Java
21.45 Bukan Empat Mata
23.30 Jam Malam

JakTV

16.00 Medika Natura
17.00 Mahakarya Agung Sedayu
17.30 Sendok Garpu - Asian Food
18.30 Jakarta Petang
19.30 Apa Kata Dunia
20.30 Mereka Berkarya
21.00 B-Jak
22.00 Jakarta Malam
23.00 Obrolan Malam
23.30 C Musik

SYAFIRIL ERMAN

MEGAT



Kami berdua berjalan menyusuri jalan dengan perasaan aneh. Di sebuah perempatan yang di salah satu ujungnya berdiri Gedung Pos, pandangan kami terpa-ku pada sebuah jalan kecil. Bukan jalan kecilnya yang sesungguhnya telah menarik perhatian kami melainkan sebuah bangku kayu panjang sederhana yang sedikit tersembunyi di balik bentangan kain putih bertuliskan: Kedai Nasi.

Itulah kedai kami. Kami mengambil menu paling hemat. “Djid,” kataku, “kau bilang punya beberapa famili di sini.” Madjid mengangguk-angguk dengan mulut penuh nasi. “Kau tak ada rencana atau keinginan menjumpai familimu itu di sini, Djid?” “Ada ... ada ...” jawab Madjid, masih dengan mulut penuh nasi. “Kau punya alamatnya *kan*, Djid?” “*Iyo*. Aku ada. Baiknya nanti kitaanyakan pada Bang Sulaeman.”

Sambil makan kami terus berbicara. “Astaga! Djid.” “Apa astaga?” Madjid menghentikan kunyahan sambil menatapku dengan sungguh-sungguh. “Ini Malaysia, *kan*?” kataku. “*Iyo*. Lalu, ada apa dengan Malaysia?” “Uang kita rupiah, sedangkan Malaysia, ringgit, bukan?” Kini Madjid benar-benar berhenti mengunyah. Matanya keras menatapku, lalu menatap penjaga kedai yang tengah asyik dengan korannya. *Nah*. Bahkan, permasalahan telah menghadang kami pada jam pertama di negeri orang ini. Aku dan Madjid saling berpandangan. “*Ba’a* kini, Gat?” Aku tak bisa menjawab. Saling pandang. Hanya itu yang bisa kami lakukan, sambil sesekali menatap penjaga kedai. “Rileks saja,” kata penjaga kedai tiba-tiba mengejutkan kami. Kini kami saling pandang dengan

berkerut kening. Rupanya penjaga kedai tahu kegelisahan kami. “Indonesia? Dari mana?” katanya sambil melipat koran dan meletakkannya di atas meja kasirnya. Saat itu kebetulan tak ada tamu lain di sana kecuali kami berdua. “Bukittinggi, Bang,” jawabku. “Bukittinggi? Hahaha,” penjaga itu tiba-tiba tertawa lebar. Perasaanku menjadi sedikit lapang. Tawa itu, semoga pertanda baik. “Aku dari Bukittinggi juga. Mandiangin!” kata penjaga kedai dengan bola mata berbinar. Kini perasaan kami benar-benar lega. Kami gembira. Aku dan Madjid pun tertawa lebar. “Di sini memang banyak pendatang dari Minang. Sebagian besar kedai nasi di sini pun adalah milik orang-orang *awak*. Tapi, kuusulkan agar rupiah kalian ditukar dengan ringgit,” kata abang penjaga kedai. Aku dan Madjid mengangguk. “Kalian bisa menukarkannya di

bank di ujung blok ketiga itu. Atau, sebentar. Mungkin aku bisa membantu kalian,” kata abang penjaga kedai sambil membuka laci dan menghitung uang yang ada di sana. Aku dan Madjid masih terdiam. “Berapa uang kalian?” tanya abang penjaga sesaat kemudian. Aku menyodorkan gundukan uang di telapak tanganku. Abang penjaga mengambilnya dan menghitung di atas meja kasirnya. “Uang kalian dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah,” katanya, “dengan kurs saat ini, maka uang ini akan menjadi sekitar 93 ringgit.” Aku memandang Madjid. Kali ini aku benar-benar ingin minta pendapatnya.

Korban Libya Capai 200 Orang

Yeyen Rostiyani

Penembak jitu turun tangan menghadapi massa.

TRIPOLI – Pasukan keamanan Libya menembak puluhan pengunjuk rasa di Benghazi, Sabtu (19/2). Data jumlah korban tewas bervariasi antara 100 hingga 200 orang. Sementara itu, 50 ulama menyerukan agar kekerasan dihentikan.

Seorang saksi mata di Benghazi menyebutkan, para penembak jitu meloskan timah panas ke arah massa dari sejumlah sudut kota. “Puluhan orang tewas. Kami berada di tengah pembantaian,” kata seorang warga yang menolak disebutkan namanya.

Sementara laman *Antiwar* dan harian *the Independent* menyebutkan, jumlah korban mencapai 200 orang sejak unjuk rasa berlangsung di Libya. Sedangkan korban yang cedera diperkirakan seribu orang.

Kekerasan ini juga mewarnai pawai oleh massa pendukung Ghadafi di Tripoli. Di kota inilah cengkeraman rezim pimpinan Moammar Qadafi masih kuat.

Pemerintah Libya juga menahan sejumlah besar “warga Arab” yang dinilai menghasut kerusuhan di negeri Afrika ini. Mereka yang ditahan, antara lain warga Mesir, Tunisia, Palestina, Suriah, dan sejumlah negara lain. Pemerintah juga menuding Israel terlibat dalam unjuk rasa ini.

Kantor berita Italia, *ANSA*, mengutip warga Italia yang menyebutkan bahwa Benghazi benar-benar tak terkendali. “Seluruh gedung pemerintah dan

Negara-negara yang Terkena ‘Demam’	
Demosia unjuk rasa melanda sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Berikut adalah masing-masing negara seperti diulas <i>CNN</i> dan sejumlah sumber lain.	
LIBYA	
BAHRAIN	
YAMAN	
IRAN	
MESIR	
YORDANIA	
IRAK	
KUWAIT	
DJIBOUTI	
ALJAZAIR	
SUDAN	
SURIAH	
TUNISIA	
PALESTINA	

lembaga serta sebuah bank telah dibakar, dan para ‘pemberontak’ menjarah serta menghancurkan segalanya. Tak ada orang di jalanan, bahkan polisi pun tak ada,” kata sang saksi.

Benghazi menjadi kota penyulut unjuk rasa. Namun, hal ini tak mengherankan bagi asisten profesor dari Dartmouth, Dirk Vandewalle, yang juga penulis *A History of Modern Libya*. Menurut-nya, Benghazi memang secara tradisional adalah kota yang tak terlalu setia pada Qadafi.

Libya tak memiliki konstitusi ataupun lembaga yang kuat untuk menyokong negara. Di Libya, kata Vandewalle, “Tidak ada yang melampaui Qadafi dan lingkaran terdekatnya.”

Salah satu tokoh yang dekat dengan Qadafi adalah Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi. Terkait kekerasan yang merebak



ABDEL MEGUID AL-FERGANY/AP

MASIH DIKUASAI PEMERINTAH

Tripoli tampaknya kota di Libya yang masih bisa dikuasai rezim pimpinan Moammar Qadafi. Tampak para pendukung pemerintah berkumpul di Lapangan Green di Tripoli, Libya, akhir pekan lalu.

di Libya, ia mengatakan, “Situasinya tidak jelas.” Dan, ia tak ingin “mengganggu” Qadafi untuk menanyakan soal pembantaian warganya.

Seruan ulama

Sementara itu, menurut kubu oposisi, sekitar 50 ulama Libya menyerukan ketenangan. Mereka juga meminta pemerintah menahan diri dan menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

“Ini ada seruan yang mendasak dari para ulama, cendekiawan, dan para sesepuh dari

Tripoli, yaitu Bani Walid, Zintan, Jadu, Msalata, Misrata, Zawiah, dan dari daerah lainnya di kawasan Barat,” demikian seruan yang ditandatangani para tokoh tersebut, seperti dikutip *Aljazeera*.

“Kami menyerukan kepada setiap Muslim, yang berada di dalam rezim atau membantu rezim berkuasa, untuk mengakui bahwa pembunuhan manusia yang tak berdosa adalah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan membunuh saudara-saudaramu sendiri. Hentikan pembantaian ini sekarang juga.” ■ *ap/reuters*

'Peserta Baru' dalam Gelombang Protes

Yeyen Rostiyani

RABAT – Gelombang protes di Timur Tengah dan Afrika Utara akhirnya menular ke sejumlah ‘anggota baru’, yaitu Maroko, Kuwait, dan Djibouti. Aksi massa besar-besaran dijadwalkan Ahad (20/2).

Di Maroko, ribuan warga diperkirakan turun ke jalan pada Ahad. Mereka menuntut, Raja Muhammad menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan yang baru dibentuk, dan membuat sistem hukum lebih independen.

Aksi jalanan ini diberi nama “February 20 Movement for Change” atau Gerakan 20 Februari untuk Perubahan. Lagi-lagi, aksi menggalang massa dilakukan lewat *Facebook*. Berita Sabtu lalu menyebutkan, gerakan tersebut telah menarik perhatian sekitar 19 ribu orang lewat laman jejaring sosial tersebut.

Maroko adalah monarki konstitusional yang memiliki parlemen dan dipilih lewat pemilu. Namun, konstitusi memberi kekuasaan pada sang raja untuk membubarkan parlemen, menetapkan status darurat, dan pemegang keputusan penting dalam penunjukan pos penting pemerintahan, termasuk perdana menteri.

Raja Muhammad naik takhta pada 1999. Namun, baru kali ini rakyat menggugat sistem pemerintahan yang selama ini dijalankan di Maroko. Raja Mohammad berasal dari dinasti Alaouite yang telah memerintah Maroko sekitar 350 tahun.

Peserta baru lainnya dalam aksi demo di kawasan adalah Kuwait. Jumat lalu, sekitar seribu orang turun menuntut hak menjadi warga negara. Aksi di Provinsi Aljahra ini bentrok dengan aparat keamanan.

Pengunjuk rasa yang dikenal sebagai suku Badui ini menuntut hak, antara lain pendidikan gratis, pekerjaan, dan jaminan kesehatan seperti halnya hak warga negara Kuwait yang sah. Kuwait diperkirakan memiliki 100 ribu warga yang belum menjadi warga negara. Hak-hak mereka telah dipertikaikan selama puluhan tahun.

Kerumunan massa diserang dengan meriam air. Menurut juru bicara pemerintah, Kol Adil Al Hashash, langkah itu dilakukan sebagai aksi bela diri setelah pengunjuk rasa mulai melempari aparat dengan batu.

Djibouti, negeri mungil di tanduk benua Afrika juga tak mau ketinggalan. Kantor berita Cina, *Xinhua*, menyebutkan dua orang tewas dalam demo yang berlangsung sejak Jumat dan berlangsung hingga Sabtu. Laman *Al Arabiya* menyebutkan, ribuan pendemo menyerukan agar Presiden Ismael Omar Guelleh (63 tahun) mundur. Guelleh, yang berkuasa sejak 1999, mengamendemen konstitusi pada 2010 yang memungkinkan ia berkuasa dua periode lagi, masing-masing enam tahun.

Kesejahteraan agaknya menjadi benang merah dari setiap aksi di masing-masing negara, mulai dari Tunisia, Mesir, Yaman, Sudan, Aljazair, hingga negara-negara yang baru bergabung dalam aksi protes. ■ *ap/reuters*



MUHAMMED MUHEISEN/AP

SETIA PADA PEMERINTAH

Seorang pengunjuk rasa yang propemerintah Yaman memegang foto Presiden Ali Abdullah Saleh di Sanaa, Yaman, akhir pekan lalu. Kubu propemerintah dan antipemerintah sempat bentrok di Sanaa dan menewaskan seorang pengunjuk rasa.

Kapal Perang Iran Akhirnya Lintasi Suez

Hiru Muhammad

KAIRO — Dua kapal perang Iran dijadwalkan berlayar mengarungi Terusan Suez menuju perairan Mediterania, Senin (21/2). Peristiwa itu adalah yang pertama kali dilakukan armada perang Iran sejak pecah revolusi Iran 1979 silam.

Menurut sejumlah pejabat, kapal perang itu masuk dari kawasan pintu selatan dari kanal yang berada di Laut Merah pada Ahad dan akan mencapai Mediterania, Senin sore. Sumber di militer Mesir menyebutkan, mereka telah menyetujui izin kedua kapal perang tersebut untuk melalui Suez.

Pemerintahan militer Mesir sempat menghadapi posisi serbasalah terkait perizinan kedua kapal perang Iran tersebut. Selama ini, Kairo telah menjadi sekutu utama AS dan terikat perjanjian damai dengan Israel. Hubungan Mesir dengan Iran terganggu sejak pecah revolusi Iran 1979.

Israel menilai Pemerintah Mesir tidak punya pilihan kecuali mengizinkan kapal perang itu melintas. Sebab, perjanjian yang disepakati kedua negara memperbolehkan kapal dari negara mana pun melintasi kawasan tersebut. Namun, Israel telah mengantisipasi apabila kedua kapal perang itu hendak menuju ke lepas pantai negara Zionis tersebut.

Kantor berita Iran, *Fars*, mengutip komandan senior AL Iran yang menyebutkan kapal perang itu adalah kapal pendukung logistik. Kharg berbobot 33 ribu ton dan fregat ringan Alvand berbobot 1.500 ton. Kharg diawaki 250 orang dan dapat membawa tiga helikopter, sedangkan Alvand dipersenjatai torpedo dan rudal antikapal.

Kantor berita Mesir, *MENA*, menyebutkan kedua kapal perang itu tidak mem-bawa senjata, nuklir, atau bahan kimia lainnya. “Dua kapal Iran telah melintasi Terusan Suez dan menuju pelabuhan Suriah,” kata *Al Alam*, jaringan televisi pemerintah Iran.

Israel yang cemas dengan

perkembangan politik di Iran mengawasi dengan cermat pergerakan kedua kapal perang tersebut. “Kita dapat melihat kondisi kawasan yang tidak stabil. Iran berupaya meraih keuntungan dari kondisi yang berkembang dengan mengirimkan dua kapal perangnya,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam rapat kabinet seperti dikutip laman *Haaretz*.

Rabu lalu, kapal induk ber-tenaga nuklir AS USS Enterprise melintasi Terusan Suez dalam perjalanannya ke kawasan Teluk. Keberadaan kapal perang itu juga menjadi isu mengangkat setelah terjadinya aksi demonstrasi massa.

Komandan Gugus Tempur Angkatan Laut AS, Laksamana

mada Muda Terry Craft, menyebutkan keberadaan kapal itu di Terusan Suez merupakan hal rutin dan menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas di kawasan itu. Kedatangan USS Enterprise setelah Presiden Husni Mubarak lengser dari jabatannya. Aksi itu telah meluas ke Bahrain, Libya, Yaman, Yordania, dan beberapa negara Arab lainnya.

Juru bicara Gedung Putih, Jay Carney, dalam penjelasan singkatnya menyebutkan pihaknya masih terus memantau kegiatan kedua kapal perang Iran tersebut. “Tapi, sejauh ini Iran tidak memiliki catatan buruk atas perilakunya di kawasan itu,” katanya. ■ *ap/reuters*, **ed:** yeyen rostiyani



VINCENT YU/AP

SERUAN MISTERIUS

Pengunjuk rasa di Hong Kong memegang gambar melati sebagai tanda mengikuti seruan Revolusi Melati, Ahad (20/2). Namun, seruan unjuk rasa secara *online* ini ternyata misterius tanpa diketahui pencetusnya.

Cina Tumpas ‘Revolusi Melati’

Hiru Muhammad

BEIJING — Pemerintah Cina terus berupaya membungkam setiap aktivitas gerakan massa yang menuntut kebebasan berpolitik yang lebih luas. Termasuk, seruan sejumlah aktivis kepada warga melalui jaringan *online* untuk berkumpul di 13 kota di Cina, yang disebut sebagai Revolusi Melati (*Jasmine Revolution*) pada Ahad (20/2).

Tidak diketahui secara pasti siapa yang mengajak warga Cina untuk berkumpul. Namun, sejumlah keluarga dan kerabat menyebutkan, sejumlah aktivis yang ditahan mengalami perlakuan tidak pantas. Warga lainnya telah diingatkan agar tidak terlibat pada kegiatan Revolusi Melati. Sejumlah aktivis sayap kanan dan pengacara telah ditahan sejak beberapa hari lalu.

Sejumlah aktivis seperti dikutip *the Washington Post* mengaku tidak mengetahui bila ada kelompok lain yang meminta warga untuk berkumpul dan berteriak, “Kami perlu

makanan, perlu pekerjaan, perlu perumahan, dan perlu kejujuran.” Warga lainnya juga terkejut, apakah seruan itu hanya berupa “pentas seni” atau kegiatan serius menyerupai yang terjadi di Tunisia, Mesir, Bahrain, atau negara lain.

Kata *Jasmine* (melati) di sejumlah situs, seperti Microblog, Boxun (*www.peacehall.com*) telah diblokir. Namun, pengelola situs yang pertama kali menampilkan informasi itu menampilkan bila situs mereka telah diblokir Pemerintah Cina. Situs Cina terbesar yang dikelola *Sina.com*, tidak dapat lagi membahas masalah Mesir. *Peacehall.com* telah diblokir sejak Sabtu malam waktu Beijing.

Presiden Cina, Hu Jintao, telah menyerukan upaya lebih ketat bagi Pemerintah Cina dalam mengawasi penggunaan internet di negara itu. Seruan itu disampaikan sejalan dengan derasnya tuntutan reformasi di sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Hu juga menyebutkan, meskipun

mengalami peningkatan kemakmuran, Cina menghadapi ancaman konflik sosial. Ancaman itu akan menjadi sarana uji coba bagi partai tunggal yang berkuasa di negeri terpadat penduduknya di dunia itu.

Hu tidak menyebutkan internet telah menjadi biang keladi dari maraknya aksi unjuk rasa di Timur Tengah dan Afrika Utara tersebut. Namun, Cina perlu mengawasi dengan ketat ‘masyarakat virtual’ di Cina yang jumlahnya mencapai 450 juta orang. “Saat ini negara kita telah mencapai posisi strategis untuk maju, tapi di saat yang sama akan menjadi potensi konflik,” kata Hu.

Komentar Hu itu disampaikan setelah merebaknya seruan warga Cina untuk berkumpul, mendesak reformasi pemerintahan. “Perlunya reformasi politik, diakhirinya kebijakan satu partai diktator, dan kebebasan berpendapat serta memperoleh informasi,” isi pesan yang mengajak massa berkumpul, termasuk mereka yang tinggal di Beijing dan Shanghai. ■ *reuters* **ed:** yeyen rostyani

AS Veto Resolusi Permukiman

Hiru Muhammad

Empat belas anggota DK PBB menyetujui resolusi.

NEW YORK — Amerika Serikat (AS) memveto resolusi yang isinya mengancam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina, Sabtu (19/2). Meski disetujui 14 anggota Dewan Keamanan PBB, veto AS menggugurkan rancangan resolusi yang dirancang negara-negara Arab.

Langkah AS ini sudah diperkirakan sebelumnya. Sejumlah resolusi DK PBB yang mengancam Israel dibatalkan karena veto dari AS.

Laman *BBC* menyebutkan, usulan DK PBB itu sebelumnya telah mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB dan disponsori 130 anggota PBB. Namun, AS sebagai anggota tetap DK PBB memiliki keistimewaan dengan hak veto yang dapat membatalkan lolosnya resolusi. Namun, Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, berkilah veto itu jangan diartikan bahwa pihaknya mendukung pembangunan permukiman.

AS tetap menilai sikap Israel di wilayah pendudukan tidak memiliki legitimasi. “Rancangan pembahasan itu membahayakan kedua pihak,” kilahnya. Resolusi itu antara lain menyebutkan pembangunan permukiman Israel di kawasan Palestina adalah ilegal dan mendesak negara Zionis itu untuk “segera menghentikan selu-

ruh” kegiatan pembangunan permukiman. Kalangan diplomat menyebutkan pandangan terkait resolusi itu seluruhnya mendapat dukungan dari pemerintahan Obama.

AS menolak apabila DK PBB melakukan intervensi dengan cara mengaitkan masalah resolusi tersebut dengan perundingan damai Israel-Palestina. Duta Besar Israel di PBB, Meron Reuben, mendesak Palestina untuk kembali berunding tanpa syarat pendahuluan (prakondisi).

Israel menilai langkah Palestina yang mematok sejumlah syarat sebelum berunding itu sebagai upaya untuk menghindari pembicaraan damai. Sikap prakondisi sebelum dilakukannya perundingan selama 17 terakhir memang tidak pernah dilakukan karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Duta Besar Inggris di PBB, Lyall Grant, yang bicara atas nama Inggris, Prancis, dan Jerman mengutuk sikap Israel tersebut sebagai sesuatu yang ilegal dan melanggar hukum internasional. Ketiga negara itu menegaskan pentingnya terbentuknya sebuah negara Palestina yang merdeka bergabung dengan PBB sebagai anggota baru mulai September 2011.

Mereka juga mendapat dukungan sejumlah negara anggota Uni Eropa seperti Portugal, Swedia, Slovenia, serta lebih dari 100 negara pendukung lainnya. Wakil Tetap Palestina di PBB, Riyadh Mansour, menyatakan veto AS dapat memberikan sinyal yang berbeda bagi

Israel.

“Kami khawatir sikap AS itu akan membuat Israel kian keras pendiriannya dan kebal hukum,” katanya.

Sementara itu, aktivis HAM Timur Tengah di New York, Sarah Leah Whitson, menuding veto itu mencerminkan sikap mendua AS yang menggabungkan hukum internasional dan munafik. “Kepada bangsa Arab, Obama mengaku menentang pendudukan, tapi menjatuhkan veto atas perbuatan Israel di wilayah pendudukan,” katanya.

Yang jelas, sikap AS itu mendapat sambutan hangat warga AS pendukung Israel. Selama ini, mereka menilai pemerintahan Presiden Barack Obama tampak tidak terlalu bergairah dalam mendukung Israel, sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Abed Rabbo, mengatakan veto AS sangat disayangkan dan berdampak pada kredibilitas Pemerintahan AS.

Netanyahu berterima kasih

Menanggapi veto AS, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan penghargaan mendalam atas keputusan Presiden Obama untuk memveto resolusi DKPBB, demikian dikutip laman *Ynet*. Netanyahu menekankan, “Jalur satu-satunya menuju perdamaian adalah melalui perundingan langsung dan tidak melalui keputusan badan-badan internasional,” katanya lewat pernyataan tertulis yang dikutip *Xinhua*. ■ *reuters* **ed:** yeyen rostyani

smp-sd-tk al-fath cirendeu-bsd

10 years we build happy children

with active learning method
english learning everyday
& islamic environment

www.alfath.net
call: 7415419 / 53157586

PROGRAM PASCASARJANA
ISLAMIC ECONOMICS and FINANCE
UNIVERSITAS TRISAKTI, JAKARTA

Penerimaan Mahasiswa Baru dan Ujian Saringan Masuk Program Magister (ME) dan Program Doktor (Ph.D)

1. Pendaftaran Sampai dengan Tanggal : 24 Februari 2011
2. Ujian Saringan Masuk
 - Ujian Tertulis : 25 Februari 2011
 - Interview : 26 Februari 2011
3. Awal Perkuliahan : Maret 2011

PENDAFTARAN :

Gedung " I " Lt.4 Ruang 4.07 Kampus A, Universitas Trisakti
Jln. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat
Telp. (021) 566 3232 Ext.8347 Fax. (021) 566 9178
Mobile : +62 813 98 566 577 / 62-21 4577 1997
(Jam Mobile aktif :Senin s/d Sabtu Pukul 08.00 - 17.00 WIB)
Website : www.ief-trisakti.ac.id

Buku Baru

MEMBAHAGIAKAN SUAMI SEJAK MALAM PERTAMA
Ali Ghufron, Lc

Apakah Anda ingin masuk surga? Bila Anda seorang istri, jalan menuju surga sudah ada di depan mata, bahkan selalu menyertai setiap hari: karena bagi istri, jalan menuju surga adalah suami. Rasulullah saw. bersabda, “Perhatikanlah sikapmu terhadap suamimu, karena sesungguhnya dia adalah surga dan nerakamu.” (HR. Ahmad).

236 hlm., ISBN 978-602-8689-30-4

SHAFAR & RABIUL AWAL
Memetik Hikmah, kebaikan, dan Kasih Sayang-Nya
Ibnu Rajab Al - Hanbali

168 hlm., 2011, cet. ke-1
EAN 978-602-8689-31-1

Rp 25.000,-

AMZAH
Inspirasi Oase Hikmah Islam

Dapatkan di toko-toko buku terdekat. Atau hubungi bagian pemasaran kami di:
Jl. Jelita Utara No.8 Rawamangun, Jakarta 13220. Telp. (021) 47869244, 47869446, Faks. (021) 47869244
email: info@bumiaksara.co.id
www.bumiaksara.co.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

Menerima Mahasiswa Baru
(Lulusan dari S1 Berbagai Disiplin Ilmu)
Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

MAGISTER ILMU HUKUM

AKREDITASI BAN-PT
SK NO : 005/BAN-PT/AK-VIII/S2/VI/2010

Konsentrasi :

1. Hukum Ekonomi
2. Hukum Tata Negara
3. Hukum Pidana
4. Hukum Islam

MAGISTER MANAJEMEN

AKREDITASI BAN-PT
SK NO : 005/BAN-PT/AK-VIII/S2/VI/2010

Konsentrasi :

1. Manajemen Sumber Daya Manusia
2. Manajemen Pemasaran
3. Manajemen Keuangan
4. Manajemen Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT

BERAKREDITASI SK DIKTI
SK NO : 50/D/7/2010

Konsentrasi :

1. Promosi dan Pendidikan Kesehatan
2. Manajemen Rumah Sakit
3. Gizi Kesehatan Masyarakat
4. Kesehatan & Keselamatan Kerja

MAGISTER STUDI ISLAM

AKREDITASI BAN-PT
SK NO : 011/BAN-PT/AK-IV/S2/2005

Konsentrasi :

1. Pendidikan Islam
2. Ekonomi Islam
3. Hukum Islam
4. Politik Islam

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

AKREDITASI BAN-PT
SK NO : 069/BAN-PT/AK-IV/S2/IX/2003

Konsentrasi :

1. Otonomi Daerah
2. Pengembangan Masyarakat

MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

BERAKREDITASI SK DIKTI
SK NO : 105/D/7/2005

Konsentrasi :

1. Komunikasi Bisnis
2. Komunikasi Politik

MAGISTER AKUNTANSI

BERAKREDITASI SK DIKTI
SK NO : 105/D/7/2005

Konsentrasi :

1. Akuntansi Manajemen & Pengendalian
2. Perpajakan
3. Akuntansi Sektor Publik/Pengawasan Keuangan Negara

MULAI KULIAH MARET 2011

INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI :

GEDUNG SEKOLAH PASCASARJANA
JL. KH. AHMAD DAHLAN GIPUTAT, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 749 2876, 749 3002, Fax : (021) 749 4932
Email : pascasarjana@gmail.com Website : www.umj.ac.id

95%

LULUSAN TELAH BEKERJA

BERHADIAH LAPTOP KEREN (NetBook)

TEPAT & CEPAT KERJA!

LP3I
SEJAK 1989

POTONGAN BIAYA PENDAFTARAN
Rp.100.000,-
Gunting dan bawa saat pendaftaran.

GABUNG SEGERA!

www.lp3i.ac.id

HUBUNGI KAMPUS LP3I TERDEKAT DI KOTA ANDA, ATAU MELALUI
SMS Center: 0815 1475 6666

Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail
Pembimbing Ibadah
Ketua Umum IKADI (Ikatan Dini Indonesia)

Kantor Cabang & Perwakilan Sragen Jawa Tengah
Dr. H. Agus Trijono. M. Kes :
HP : 0812 297 8607
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2
Sragen Jawa Tengah 57215
Telp. (0271) 8821189, 2027045

Pekanbaru Riau
Dr. H. Syafroni M. Samin :
HP : 0813 1750 9448
H. Hasyim :
HP : 0812 759 4641
Jl. HR. Subranta No. 200 abc,
Panam, Pekanbaru
Telp. (0761) 489 7313

Padang, Sumatera Barat
Ust. H. Zulfikar
HP : 0852 7282 4403
Jl. Bandung No. 5
Ulak Karang, Padang Utara
Telp. : (0751) 705 2885

Program Umrah :

- Umrah Reguler
- Umrah Ekonomis
- Umrah Ramadhan
- Umrah Liburan
- Umrah Plus
- Turki
- Mesir, dll

Jadwal Umrah :

Maret	: 15, 29
April	: 13, 24
Mei	: 11, 29
Juni	: 15, 26
Juli	: 6, 24
Agustus	: 3, 14

Contact Person :

- H. Mas'ud Naseli : HP 0811 841 2764
- H. Fardhol Suparlan : HP 0813 9840 4120

Akomodasi :

- Makkah :
- Shofwah
- Grand Zam-zam
- Madinah :
- Dallah Taibah
- Al Haram
- Movenpick

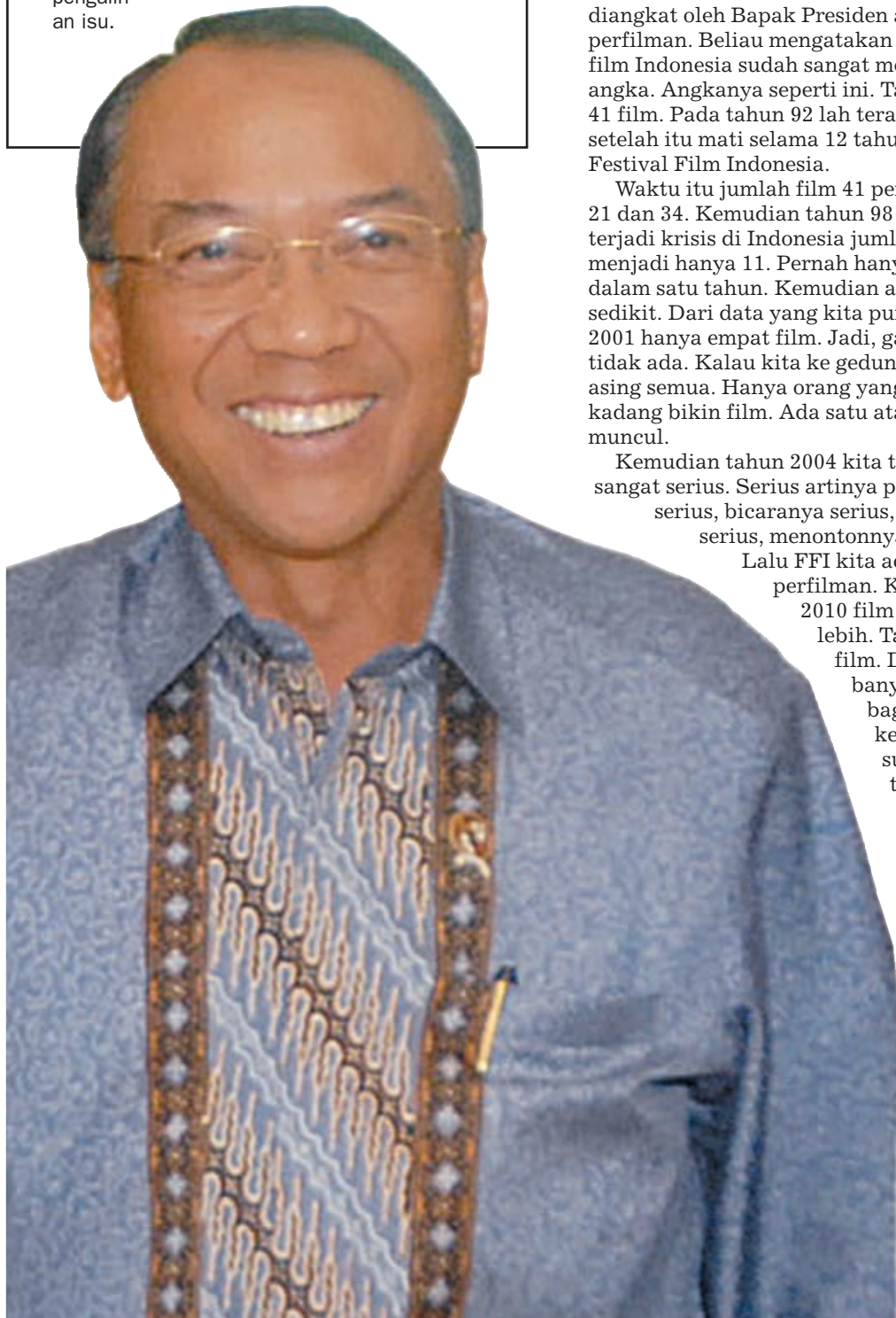
Kantor Pusat
Rukan Cempaka
Jl. Tanjung Barat Raya No. 81C Jakarta - Indonesia
Telp. (62-21) 7817563, Email : bim_tour@yahoo.co.id
www.bimtour-travel.com

Perwakilan-perwakilan :

Rokan Hilir Riau	: Ust. H. Nasarudin	HP : 0812 759 0528
NTT	: Ust. H. Sanu Bajuri	HP : 0813 3856 0497
Bengkalis - Riau	: Ust. H. Khairul Umam	HP : 0813 6538 2497
Kalleng & Kalsel	: Ust. H. Zulfikar Aly Akbar	HP : 0811 501 088
Samarinda	: Ust. H. Khoirul Alim	HP : 0813 333 99 878
Cilacap	: Ust. H. Arwani	HP : 0819 149 44 116
Surabaya	: Ust. H. M. Nidhom Anshori	HP : 0813 3647 8647
Al Azhar Bekasi	: Ust. H. Zaidun	HP : 0811 888 1968

Tiba-tiba saja, Motion Pictures Association (MPA), perwakilan produsen film Hollywood di Indonesia, dan Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (IPFI) mengeluarkan ancaman akan menghentikan pemutaran film-film asing di Tanah Air. Gara-garanya, mereka keberatan atas aturan pajak yang baru saja dikeluarkan pemerintah. Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi bioskop-bioskop di Indonesia jika ancaman itu benar-benar diwujudkan. Bioskop akan terasa hambar karena kehilangan film-film berkualitas yang belum bisa disediakan oleh para sineas lokal.

Namun, protes itu tak seluruhnya dianggap tepat. Sebagian pelaku industri perfilman nasional, termasuk pemerintah tentunya, menganggap regulasi baru itu justru sudah tepat. Lantaran selama ini masih terjadi ketimpangan pembayaran pajak antara film lokal dan asing. Ancaman yang terlonter itu pun dianggap hanya pengalih-an isu.



PANTA ADILLA

JERO WACIK MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Mereka Punya Film, Kita Punya Pasar

Apa latar belakang revisi pajak film asing?

Di samping masyarakat yang memiliki perhatian luas pada perfilman, Pak Presiden juga. Jadi, sebetulnya ini dimulai disidang kabinet kira kira sebelum akhir tahun. Salah satu yang diangkat oleh Bapak Presiden adalah mengenai perfilman. Beliau mengatakan akhir-akhir ini film Indonesia sudah sangat membaik. Tentu ada angka. Angkanya seperti ini. Tahun 92 film itu 41 film. Pada tahun 92 lah terakhir ada FFI, setelah itu mati selama 12 tahun. Tidak ada Festival Film Indonesia.

Waktu itu jumlah film 41 per tahun, menjadi 21 dan 34. Kemudian tahun 98 pada waktu terjadi krisis di Indonesia jumlah film turun menjadi hanya 11. Pernah hanya ada enam film dalam satu tahun. Kemudian ada yang paling sedikit. Dari data yang kita punya adalah tahun 2001 hanya empat film. Jadi, gairah perfilman tidak ada. Kalau kita ke gedung bioskop, itu film asing semua. Hanya orang yang nekat kadang-kadang bikin film. Ada satu atau dua film yang muncul.

Kemudian tahun 2004 kita tangani film sangat serius. Serius artinya pemikirannya serius, bicaranya serius, kegerahannya serius, menontonnya sangat serius.

Lalu FFI kita adakan, naiklah perfilman. Kemudian tahun 2010 film kita sudah 70-an lebih. Tahun ini akan 100 film. Dari 100 itu banyak yang bagus-bagus. Tema kepahlawanan sudah muncul, tema bela negara sudah muncul. Film anak-anak mulai muncul, tentang religius muncul. Artinya itu perkembangan perfilman. Tahun 2011 perkiraan saya lebih dari 100 film.

Apalagi dengan kebijakan yang akan kita ambil. Kemudian Undang-

Undang Perfilman sudah selesai tinggal kita kerjakan amanah UU Perfilman. satu persatu kita kerjakan. Akhirnya pada sidang kabinet Bapak Presiden mengangkat, karena perfilman sudah bagus tolong ditata semua.

Mengapa tercetus usulan revisi regulasi itu?

Kebetulan waktu itu ada pendorong. Tulisan teman kita, seorang sutradara, waktu itu menuangkan pikiran dari sutradara-sutradara bahwa merasa berat dengan pajak untuk film. Bagaimana film dibuat kalau pajak masih 10 persen. Katakanlah biaya Rp 5 miliar dengan pajak 10 persen berarti Rp 500 juta. Bagi industri yang sedang tumbuh, Rp 500 juta itu berat. Itu disambut oleh Presiden. Tentu di sidang kabinet ada menteri keuangan. Tolong perpakakan di bidang perfilman dibenahi.

Tujuannya apa?

Tujuannya adalah agar industri perfilman kita makin banyak. Kalau bisa menjadi 200 per tahun. Kemudian mutunya bagus, yang kurang bermutu agar belajar baik sutradaranya atau produsernya. Kemudian lapangan pekerjaan akan timbul, karena perfilman ini *pro job*. Bayangkan satu film dibuat maka ratusan orang bekerja. Menggerakkan ekonomi perfilman ini.

Yang kedua adalah perfilman itu karya budaya, bisa untuk membangun karakter, untuk membangun semangat bangsa. Itu pentingnya film. Karena itu, Presiden sampai ikut campur, karena diangkat waktu itu saya dan menteri keuangan langsung bekerja. Pertama yang saya minta karena perfilman Indonesia membawa mimpi membangun karakter maka perlu ada dorongan keras bagi si pekerja.

Caranya adalah tiga tahun lalu saya sudah lakukan bahan-bahan untuk membuat film, pajaknya saya minta nol. Kemudian pajak untuk membuat film, saya juga minta nol. Sampai di situ sudah oke. Semua insan film bersorak. Tapi ini SK- nya belum jadi. Ini belum final. Dia lebih bergairah. Ini untuk film dalam negeri.

Kalau dari sisi film impor?

Di sisi film impor tadinya ada pikiran, berapa film impor kena pajak, apa saja yang kena pajak, apakah sudah memproteksi film produksi dalam negeri. Tentu, saya juga berpikir importir film ini melengkapi film dalam negeri. Yang impor masih 200 film. Jadi masih lebih banyak film impor sekarang. Ini kalau mau film dalam negeri naik, yang impor pelan-pelan turun. Tapi kalau jumlahnya tetap, jumlah layar harus bertambah. Di sini baru 600 layar. Di India sudah 1.200

layar.

Jadi film impor ini sedang kita hitung berapa yang pantas dikenai pajak. Dulu ada pajak yang 0,25 dolar per meter. Itu yang lama, apa sudah memberi efek proteksi pada film dalam negeri. Yang saudara perlu ketahui bahwa produksi film nasional harus bertambah, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kemudian film impor harus tetap terpelihara. Saya setuju kalau ada film impor yang bagus menjadi inspirasi film Indonesia.

Jadi importir harus hidup. Tidak usah khawatir saya tidak akan mematikan importir. Sekarang ada beberapa importir. Eksportir di luar negeri juga boleh filmnya masuk. Jangan mengancam, kita cari jalan ke luar. Mereka punya film, kita punya pasar. Tinggal berapa pajak yang pantas.

Tadi saya rundingkan dengan menteri perekonomian, kalau perlu diringankan pajaknya juga, bukan ditambahkan. Kalau sudah kuat, industri dalam negeri mungkin yang impor film seperti aturan yang lama. Kalau perlu saya kurangi. Tentu pemilik gedung bioskop atau importir film punya tanggung jawab moral, mau tidak menambah layar.

Jadi belum selesai dibahas?

Ini memang era demokrasi, baru dibahas sudah bocor. *Kan* harus transparan, sehingga terus seakan sudah tidak bisa impor film lagi. Importir sudah takut. Kita sudah membangun perfilman sama-sama, sudah bagus maka kita jaga ini. Tenang, tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan.

Sekarang memang dirjen pajak, dirjen bea cukai, dan dirjen nilai budaya dan film sedang bekerja. Tentu mendengar masukan dari semua importir film, produser, sutradara, cukup belum segitu. Ini sedang dibahas. Target saya karena ini menjadi perhatian masyarakat, kita bereskan bulan depan harus beres, SK-nya sudah ke luar. Jadi perfilman Indonesia jumlahnya banyak.

Jadi nilai pajak impor dalam kisaran berapa?

Jangan pakai kira-kira, sedang dibahas. Kita cari solusi terbaik berapa yang importir minta, sama seperti kemarin atau lebih ringan.

Mengenai surat edaran Bea Cukai yang sudah ke luar, bagaimana?

Jadi itu sedang dijalankan, padahal belum kita rembukan secara matang. Itu sudah dijawab menteri keuangan, akan kita evaluasi. Kira-kira dua pekan lagi selesai ini semuanya. Kita cari jalan yang terbaik. ■ c42 ed: budi raharjo

CHAND PARWEZ PRODUSER FILM

Pemerintah Mestinya Turunkan Pajak Film Lokal

Oleh Ratna Puspita

Bagaimana pandangan Anda mengenai kenaikan bea masuk film asing?

Pemerintah seharusnya meringankan film nasional. Kita dari pelaku industri perfilman sudah menyampaikan kepada pemerintah agar film nasional diperlakukan berbeda. Tapi, bukan berarti menaikkan pajak film impor. Saya tidak tahu seperti apa hitung-hitungannya sampai pemerintah mengeluarkan aturan seperti itu.

Seberapa besar pasar film asing di Indonesia?

Menonton film itu butuh *habit* dan itu yang ikut ditumbuhkan oleh film impor. Ketika era mati suri film Indonesia pada 1990-an silam, bioskop tetap bertahan karena film impor. Kalau tidak ada film impor, bioskop sudah mati ketika itu.

Kalau dibandingkan pasar film Indonesia?

Market share film lokal dan asing cukup seimbang atau mungkin sedikit lebih unggul film asing saat ini. Sebab, film kita sedang mengalami kemerosotan. Memang masih banyak film yang berkelas, tapi banyak juga yang tidak. Sehingga, sulit untuk menyaingi “Laskar Pelangi” yang mencapai 4,2 juta penonton.

Dua tahun terakhir, sangat sulit bagi kita untuk mendatangkan penonton ke bioskop. Pada 2009 lalu, masih ada beberapa film yang mencapai satu juta penonton. Tapi, tahun lalu hanya “Sang Pencerah” yang mencapai satu juta. Jadi, *market share* untuk film nasional terus merosot.

Jadi, kalau melihat waktu penerapan aturan itu sangatlah tidak tepat. Saat ini, film kita

sedang merosot kualitasnya dan jumlah penonton semakin turun. Tiba-tiba, pemerintah memberlakukan aturan ini. Tanpa film impor, penonton menjadi tidak punya banyak pilihan. Kalau diteruskan, bioskop bisa tutup. Pemerintah harus melihat bioskop adalah bagian dari industri perfilman, bukan hanya film lokal atau film asing. Dampak lainnya, *film maker* menjadi tidak punya referensi.

Pemerintah mengatakan, kenaikan bea masuk film asing ini untuk kemajuan film nasional?

Begini, itu terdengar seperti janji dan kami tidak butuh janji dari pemerintah. Kami lebih butuh aksi langsung yang meringankan biaya produksi. Janji tidak memberikan dampak langsung yang bagus bagi industri. Pemerintah jangan hanya berpikir mendapat pemasukan, tapi seharusnya berupaya untuk membuat iklim usaha yang baik.

Aturan ini justru terlihat seperti proteksi yang berlebihan bagi film nasional. Proteksi yang berlebihan itu tidak baik bagi film yang merupakan industri kreatif. Bila tidak ada film impor, sineas Indonesia tidak punya referensi. Selain itu, tanpa film asing, film nasional tidak punya pesaing. Akhirnya, film-film yang dihasilkan bukanlah produk yang kompetitif dan itu buruk bagi iklim usaha.

Apa solusinya?

Pemerintah seharusnya menurunkan pajak film lokal, bukan menaikkan pajak film impor. Jadi, yang benar adalah meringankan pelaku film dalam negeri dengan meringankan pajak film nasional. Karena, bagaimanapun, seperti yang

diamanatkan undang-undang, film adalah produk budaya. Sudah saatnya pemerintah memperlakukan industri film seperti yang diamanatkan undang-undang. Pemerintah seharusnya lebih tahu bahwa aturan itu sebaiknya dievaluasi.

Selain itu, daripada menaikkan pajak film impor, pemerintah sebaiknya mulai menyubsidi pembuatan film-film raksasa. Seperti diketahui, pasar kita terbatas, sedangkan jumlah dana yang dibutuhkan dalam produksi film sangatlah besar. Karena itu, seharusnya pemerintah mulai melakukan upaya untuk mendanai, menyediakan *budget* untuk pembuatan film.

Pemerintah bisa mencari produser dan sutradara yang serius. Tindakan seperti ini menunjukkan upaya pemerintah yang lebih serius memberi perhatian pada film nasional. Upaya seperti ini juga sudah dilakukan di beberapa negara lain, seperti Korea Selatan dan Prancis.

■ ed: budi raharjo



DOK REP

Dokumen Militer Indonesia Dicuri

M Ikhsan Shiddiegy

Pelaku diduga mata-mata profesional.

SEOUL — Delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengalami pencurian dokumen ketika melakukan lawatan ke Korea Selatan pada Selasa (15/2) hingga Kamis (17/2). Dokumen yang dicuri diduga terkait kerja sama militer Korea Selatan dan Indonesia.

Kasus pencurian itu kini ditangani Kantor Polisi Namdemun, Seoul. Seperti dilaporkan kantor berita *Yonhap*, Ahad (20/2), aksi itu dilakukan oleh dua pria dan satu wanita. Polisi menganggap pencurian itu janggal karena pelaku mengambil data dari laptop salah satu delegasi Indonesia.

Menurut polisi, barang yang diambil pencuri itu adalah data rahasia. Dari rekaman kamera CCTV, pencuri diyakini orang Asia. Hotel Lotte yang ditempati delegasi Indonesia ini berada di pinggiran Kota Seoul. Polisi menyatakan tidak ada pengamanan ketat dari pihak hotel untuk menjaga 50 orang



● Delegasi Indonesia bertemu Presiden Lee Myung-bak, Rabu (15/2).

delegasi Indonesia itu.

Ketika pencuri masuk ke kamar hotel, petugas keamanan Indonesia sedang mendampingi delegasi untuk bertemu dengan Presiden Lee Myung-bak, Rabu (16/2).

Menurut polisi, data yang diambil pencuri dari salah satu laptop delegasi itu berisi informasi soal rencana penjualan peralatan militer antara Indonesia dan

Korsel.

Polisi menduga pencuri sudah mengincar data sensitif itu dari kamar delegasi yang berada di lantai 19. Polisi sudah berusaha untuk melacak pelaku lewat rekaman video hotel. Tetapi, identifikasi sulit dilakukan karena rekaman itu tidak jelas. Posisi kamera terlalu jauh.

Delegasi Indonesia melakukan

pertemuan dengan Presiden Lee untuk mendiskusikan kerja sama ekonomi dan militer. Dalam pertemuan itu, juga dibahas rencana Korea Selatan untuk menjual pesawat jet latih tempur T-50 Golden Eagle ke Asia Tenggara. Turut serta dalam delegasi Indonesia adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan.

Korea Times menulis, Pemerintah Indonesia belum mengadukan insiden pencurian ini secara resmi. Polisi menduga pelaku pencurian itu adalah anggota dari agen perdagangan senjata dan alat-alat militer. Polisi, seperti ditulis *Korea Times*, juga menduga pelaku adalah seorang mata-mata profesional.

Insiden pencurian itu diakui oleh Kementerian Luar Negeri RI. “Informasi yang saya terima dari KBRI Seoul, ada salah satu staf yang ikut di delegasi kehilangan laptop,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene. Dia enggan menyebut staf itu berasal dari kementerian apa.

Michael menambahkan, setelah kehilangan itu dilaporkan, beberapa saat kemudian pihak ke-

RENCANA KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA – KORSEL

- Pengembangan pesawat tempur KFX antara KAI dan PT DI**
Proyeksi produksi: 2020
Estimasi biaya: 10 miliar dolar AS (Korsel 80 persen, Indonesia 20 persen)
- Pembelian pesawat latih tempur T-50**
Indonesia mencari pesawat yang bisa menggantikan peran jet tempur F-5 Tiger dan jet latih Hawk Mk 53 (pensiun).
Indonesia dan Israel diketahui tertarik menjadi pengguna pertama pesawat ini di luar Korsel.
- Pembuatan kapal selam Chang Bogo (Tipe 209) antara Daewoo dan PAL**
Program pengadaan kapal selam TNI AL masih dalam tahap tender antara Korsel, Jerman, dan Prancis.

Sumber: berbagai sumber

amanan hotel menemukan laptop itu. Mengenai lokasi laptop ditemukan, Michael tak menjelaskan secara rinci. “Itu terlalu teknis,” ujarnya singkat.

Michael pun tidak bisa memastikan informasi yang diambil oleh pihak lain, ia menjawab, “Bisa iya, bisa tidak. Saya tidak bisa mengonfirmasi itu.”

Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPPI), Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan pencurian dokumen militer Indonesia di Seoul membahayakan bagi negara. Dari dokumen itu, tidak hanya diketahui

data jual beli senjata, tetapi juga postur pertahanan dan gelar kekuatan militer Indonesia.

“Dokumen yang bersifat rahasia negara justru akan membahayakan jika berada di pihak-pihak yang tak bertanggung jawab,” kata Dani.

Dia mendesak Pemerintah Indonesia mengajukan protes kepada Pemerintah Korea Selatan. Selain itu, pejabat Indonesia yang lalai juga harus diberi sanksi.

Dani menegaskan, data yang bersifat rahasia negara seharusnya tidak dibiarkan tanpa pengawasan. Dani menilai insiden ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menggagas RUU Rahasia Negara. ■ **ed:** rahmad budi harto

PEMERINTAH..... dari hlm 1

Di Thailand, kata Deddy, penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak untuk setiap kopi film asing, nilainya bisa mencapai Rp 30 juta. Sementara di Indonesia, sejauh ini belum ada laporan resmi tentang jumlah penonton dan penerimaan terhadap film asing yang diputar di bioskop-bioskop nasional.

“Jadi, sebenarnya yang mereka protes itu omong kosong semua. Kalau saya melihatnya, masalah ini telah mereka pelintir hanya untuk menutupi persoalan lain,” kecamnya.

Dengan alasan itu, Deddy tak ragu mendukung kebijakan pemerintah yang dimintanya bersikap tegas, untuk menerapkan aturan bea masuk atas hak distribusi impor film.

Sejak Jumat (18/2) lalu, MPA dan IPFII mengancam, menghentikan pemutaran film asing di Indonesia. Noorca M Massardi, juru bicara jaringan 21 Cineplex, enggan memberikan komentarnya lebih jelas mengenai masalah ini. Dalam pesan singkatnya kepada *Republika*, dia mengatakan, “Saya tak bisa memberikan keterangan lagi sampai keadaan terang benderang.”

Noorca berdalih masalah ini merupakan urusan atau konflik antara Bea Cukai dan MPA Amerika. Sementara, 21 Cineplex, kata dia, korban yang hanya bisa berdoa dan berharap agar semua ini bisa dicarikan solusi yang terbaik, bagi kepentingan penonton film Indonesia dan perbioskopan nasional.

Rudy Sanyoto, wakil ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, masalah yang muncul sebenarnya bukan pada peraturan baru, yang akan mengenakan pajak tinggi dan merugikan usaha importir serta MPA. “Tapi, surat edaran Dirjen Pajak Nomor 3 Tanggal 10 Januari 2011 hanya menegaskan agar mereka (importir dan Hollywood), harus bayar pajak impor yang benar dan wajar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ungkapnya.

Dengan demikian, Rudy mengatakan, regulasi ini sama sekali tidak merugikan negara dan bangsa Indonesia. Menurutnya, keberadaan film asing tidak menekan perkembangan film nasional. Selain itu, juga tidak ada

yang menjadi korban, yang dianggap menyalahgunakan wewenang karena memban-tu penghindaran atau penggelapan pajak impor film.

Rudy mengatakan, kabar importir harus menanggung pajak sebesar 23,75 persen sungguh menyedihkan. Pasalnya, dengan angka itu, seolah-olah importir film dan MPA telah dikenakan beban yang tinggi. “Tapi, mereka itu sebenarnya tidak menearangkan, 23,75 persen itu terdiri atas pajak apa saja dan dari nilai berapa,” kritiknya.

Menurut Rudy, angka 23,75 persen itu terdiri atas bea masuk sebesar 10 persen dari nilai pabean, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, dan Pajak Penghasilan (PPh) 2,75 persen. Sedangkan nilai pabean merupakan nilai transaksi sebenarnya, yang dibayar atau akan dibayar untuk memperoleh barang atau jasa yang diimpor. “Nah, nilai pabean inilah yang kemudian menjadi nilai dasar penentuan pajaknya,” kata pemilik laboratorium film Interstudio ini.

Rudy mengungkapkan, selama ini importir dan Hollywood tidak pernah melaporkan harga transaksi jual atau beli film impor secara benar. Mereka hanya melaporkan nilai pabean senilai

biaya cetak kopinya sebesar 0,43 dolar AS per meter. Padahal, harga beli film bukan hanya itu karena ada yang dibayarkan kemudian, yaitu sebesar persentase tertentu dari hasil edar film tersebut. “Jadi, saya merasa sangat wajar kalau dikoreksi Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak,” ujarnya.

Namun, pengamat perpajakan, Darussalam, menyatakan, pemerintah seharusnya bijak dalam menetapkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Bea masuk mestinya dikenakan pada media pembawanya, bukan nilai hak distribusi filmnya. “Harus dipikirkan, apakah kebijakan tersebut akan berdampak signifikan terhadap masyarakat atau tidak,” ujarnya.

Pemerintah tidak paham

Sutradara Hanung Bramantyo menilai, pemerintah tidak memahami persoalan perfilman di Tanah Air. Dia mengatakan, bila ingin mendukung film nasional, pemerintah seharusnya menurunkan pajak film lokal dan memperluas jangkauan penonton, karena ongkos untuk membuat film di Indonesia cukup tinggi.

Selain pajak, lanjut Hanung, sineas juga harus me-



FILM ASING

Pengunjung melihat poster film Hollywood di Jakarta Theatre XXI, Jakarta, Ahad (20/2). Pajak film asing membuat peredaran film Hollywood di Indonesia terancam mandek.

anggung biaya bahan baku yang mahal. Dia enggeluhkan pajak bertingkat yang dikenakan pemerintah, termasuk pada setiap alat film yang digunakan. “Biaya bahan baku, seperti seluloid juga sangat mahal. Sementara, kita tidak pernah tahu ke mana larinya uang pajak tersebut,” ungkapnya.

Hanung menyatakan, be-

sarnya biaya produksi di Indonesia tidak sepadan dengan jumlah penonton yang datang ke bioskop. Dia mencontohkan, untuk film bermodal Rp 6 miliar, diperlukan sebanyak satu juta penonton. Padahal, film Indonesia sedang dalam masa penurunan kualitas. Tahun lalu, hanya film ‘Sang Pencerah’ yang menyentuh

angka tersebut.

Selain kualitas film yang buruk, Hanung menuturkan, persoalan lainnya adalah masih minimnya jumlah bioskop di Indonesia. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 640 layar dan jumlah tersebut belum cukup menjangkau penonton di seluruh Tanah Air. ■ **fitria andayani ed:** budi raharjo

MEMAKNAI..... dari hlm 1

Jika demikian, menjadi pertanyaan yang besar apakah kita sudah betul-betul merdeka? Merdeka tapi tetap menjadi budak sama saja dengan tidak merdeka. Kemerdekaan tanpa kedaulatan sama saja dengan botol tanpa isi. Kita bukan antiasing, tetapi kita perlu memaknai secara benar mengenai kemerdekaan dan kedaulatan.

Kedaulatan intinya adalah menentukan nasib atas kemauan sendiri. Dalam bidang ekonomi, hal tersebut seharusnya tecermin dalam formula kebijakan oleh dan untuk kepentingan diri kita sendiri.

Jadi, selama kebijakan ekonomi masih dibajak untuk kepentingan asing dan dirancang oleh pihak asing, kita belum sepenuhnya berdaulat di bidang ekonomi.

Ada salah pengertian yang sangat mendasar di kalangan petinggi di negeri ini tentang pentingnya kerja sama internasional. Jarang kita bertanya kerja sama macam apa yang dinilai penting? Tentunya, semua teori ekonomi dan penelitian empiris telah menunjukkan dengan jelas hubungan ekonomi antarbangsa jauh lebih menyejahterakan dibanding sistem perekonomian

yang menutup diri. Akan tetapi, itu bukan tanpa syarat dan syaratnya adalah hubungan itu bersifat menguntungkan semua pihak. Kalau salah satu pihak dirugikan, berarti pihak tersebut masih terjajah secara ekonomi.

Intinya kita tidak perlu mempertentangkan kerja sama internasional dengan kedaulatan selama kerja sama itu saling menguntungkan. Namun, banyak hal yang diberi judul kerja sama, padahal intinya adalah menginjak-injak kedaulatan. Masalahnya, perbedaan antara keduanya sering kali terbungkus rapi dan karena itu tampaknya perlu sebuah tata aturan yang ketat untuk menilai apakah sebuah

kerja sama internasional betul-betul menguntungkan bagi kita atau tidak.

Dengan tata aturan tersebut, kita semua bisa melakukan evaluasi secara objektif terhadap semua jenis kerja sama internasional. Lantas, aturan apa saja yang perlu kita buat? Setidaknya, ada tiga komponen di dalamnya, yakni tata cara penilaian dampak ekonomi dari kerja sama internasional, mekanisme persetujuan publik, dan ancaman hukuman bagi yang melanggar. Berikut adalah uraiannya.

Komponen yang pertama menyangkut apakah sebuah hubungan internasional dapat dinilai menguntungkan atau merugikan. Tentu, dalam prak-

tiknya penilaian seperti ini bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, di sinilah peran para ekonom akan diuji.

Caranya kira-kira mirip dengan naskah akademis yang harus dibuat sebelum pemerintah mengajukan rancangan undang-undang. Walaupun nantinya naskah ini akan juga disetujui oleh berbagai kepentingan, setidaknya ada mekanisme penilaian yang secara terbuka dapat diketahui oleh publik.

Komponen yang kedua menyangkut mekanisme persetujuan publik yang tentunya diwakili oleh DPR. Memang, kualitas dan integritas para anggota DPR masih diragukan. Namun, dengan berjalannya waktu, para wakil rakyat

akhirnya harus berhadapan dengan konstituenya. Kalau kinerjanya buruk, mereka tidak akan terpilih kembali.

Saat ini, semua kerja sama ekonomi tidak wajib mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan ini jelas sangat berbahaya. Setidaknya, kalau kita memiliki saringan yang berlapis-lapis, kemungkinan melencengnya kebijakan publik yang melenceng dari kepentingan rakyat akan semakin kecil.

Komponen yang ketiga adalah merupakan sanksi bagi pejabat yang menciptakan keuntungan bagi pihak asing dengan cara merugikan negara atau rakyat. Mirip dengan korupsi bukan? Harap

diingat bahwa korupsi terbesar adalah korupsi yang dilindungi negara dan diciptakan melalui kebijakan. Penggerogotan kekayaan negara bisa berlangsung dengan aman dalam skala besar karena di-naungi oleh kebijakan.

Bukankah kebijakan yang menyebabkan sumber daya alam tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dapat dipandang sebagai kebijakan yang melawan konstitusi? Kita harus secara konsisten memerangi siapa pun yang bertindak secara inkonstitusional. Mari kita maknai kemerdekaan dengan kedaulatan menentukan nasib kita sendiri tanpa bayang-bayang kepentingan orang lain. ■

IDRIS, JAWARA..... dari hlm 1

tidak,” kata Amin B Maman, Ketua RW 08 Kampung Kadutanggai Pojok.

Sebagai tokoh pemuda yang disegani, kata Amin, Idris kerap pula diminta untuk mendamaikan warga yang berselisih. Reputasinya sebagai ‘juru damai’ itu sudah terkenal hingga keluar Desa Purwaraja sehingga jasa Idris sering diminta oleh warga dari desa dan kecamatan lain. “Sering orang dari luar daerah meminta

bantuannya,” ujar Amin melanjutkan.

Amin mengaku tidak tahu aktivitas atau organisasi yang diikuti Idris akhir-akhir ini sehingga dia ikut terlibat dalam bentrokan di Cikeusik. Amin pun tidak mengetahui dari mana Idris belajar silat hingga dia terlihat piawai memainkan golok dan menghindari lemparan batu. Adegan tersebut diperlihatkan dalam tayangan video Cikeusik yang dire-

kam seorang anggota jemaat Ahmadiyah, Arif Rahman.

Merunut pada rekaman video itu, Idris merupakan sosok berbadan tegap yang mengenakan jaket hitam dengan tanda pita biru yang terpasang di kerahnya. Mengenakan kopiah hitam, sang jawara berjalan paling depan sambil berteriak-teriak memimpin massa hingga ke halaman rumah Suparman, tokoh Ahmadiyah Cikeusik.

Seingat Amin, Idris hanya pernah bergabung dalam organisasi kemasyarakatan

(ormas) Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) Kabupaten Pandeglang. Namun, Amin tidak mengetahui keterlibatan Idris dalam bentrokan Cikeusik atas perintah siapa.

Lantaran, dia memastikan, tidak ada warganya selain Idris yang ikut dalam bentrokan berdarah tersebut.

Selama ini, Idris belum pernah berurusan dengan polisi. Namun, bentrokan di Cikeusik membuatnya kini harus merasakan dinginnya udara di dalam sel tahanan polisi. Setelah lebih dari

sepekan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas kasus Cikeusik, Idris akhirnya berhasil diringsus polisi.

Kepala Bidang Humas Polda Banten, AKBP Gunawan, mengatakan Idris ditangkap di Kelurahan Ulu-jami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. “Dia tertangkap Kamis (17/2) dini hari,” ujar Gunawan.

Idris dijerat UU Darurat 12/1951 karena terbukti membawa golok dalam bentrokan Cikeusik seperti yang terlihat dalam rekaman video. Saat penangkapan, po-

lisi tidak menemukan golok dan jaket hitam yang dipakai Idris dalam aksi di depan rumah Suparman itu.

Karena itu, Kamis (17/2) siang, penyidik Polda Banten mendatangi rumah Idris di Kecamatan Menes untuk menyita sepatu, celana, dan jaket hitam yang dilengkapi dengan pita biru milik Idris sebagai barang bukti. Menurut versi polisi, rencana penggunaan pita biru sudah muncul sejak adanya pesan pendek (SMS) berantai yang berisikan ajakan untuk menyerang rumah Suparman.

Gunawan menyatakan, pita biru tersebut untuk membedakan massa dengan tamu Suparman. Namun, penyidik polisi masih mendalami motifnya sebab pita biru tersebut dibagikan secara acak di sepanjang jalan menuju rumah Suparman. Penyematan pita biru tersebut mengesankan bentrokan yang terjadi di rumah Suparman telah direncanakan dan terorganisasi. “Polda Banten kini sedang memeriksa dua orang yang diduga membagikan pita di lokasi kejadian.” ■ **ed:** budi raharjo

jadwal shalat

Bandung -3 Mnt,
Yogyakarta -14 Mnt,
Semarang -14 Mnt,
Surabaya -24 Mnt,
Jambi +13 Mnt,
Padang +26 Mnt,
Medan +33 Mnt,
Makassar +8 Mnt.

Subuh	04.42
Zuhur	12.09
Ashar	15.21
Maghrib	18.18
Isya	19.28

:: konsultasi agama ::

Pengasuh
Ustad Bachtiar Nasir

Syahid dan Utang



Assalamualaikum wr wb

Setelah saya membaca beberapa hadis tentang syahid, ternyata ada sebuah hadis yang mengatakan, “Siapa saja yang mendapatkan syahid maka akan diampuni segala dosanya kecuali utang.” (HR Muslim).

Hal yang ingin saya tanyakan terkait hadis itu adalah bagaimana jika umat Islam Indonesia syahid, tetapi negara Indonesia mempunyai utang yang sangat besar kepada bank dunia? Siapakah yang akan menebus dosa-dosa utang sedangkan yang menikmati uang itu hanya kalangan tertentu? Apakah kita yang akan dimintai pertanggungjawaban atas utang-utang itu di akhirat kelak?

Opay <opay_445@yahoo.co.id>

Walaikumsalam wr wb

Dewasa ini negara lazim berutang kepada negara lain, tanpa membicarakan legalitas syariah dalam akad utang dan penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan negara. Utang yang diperoleh negara itu biasanya digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, membayar gaji pegawai, meningkatkan kesejahteraan, dan lain-lain.

Ini berarti, utang tersebut dinikmati oleh masyarakat sehingga konsekuensinya adalah rakyat juga menanggung utang. Pada kenyataannya, utang-utang tersebut selama ini dicicil oleh negara. Dengan demikian, fasilitas yang dinikmati seseorang di masa hidupnya yang dibangun dari utang itu pada akhirnya terbayar.

Kalaupun negara berutang lagi untuk membangun fasilitas umum sesudah seseorang meninggal dunia atau mati syahid, ia tidak ikut menanggung kewajiban karena tidak menikmati fasilitas. Bila negara tak sanggup membayar dan rakyatnya juga lemah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah SWT akan melunaskan utang orang yang memiliki ‘*azm* (keinginan kuat) untuk melunasinya. *Wallahu a'lam bish shawab*. ■

Republika menerima pertanyaan dari pembaca. Pertanyaan dapat dikirim melalui e-mail ke konsultasi@republika.co.id

:: taaruf ::

KH Ahmad Darodji Pimpin MUI Jateng

SEMARANG — KH Ahmad Darodji terpilih sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah periode 2011-2015 dalam musyawarah daerah (Musda) yang digelar di Semarang, Ahad (20/2). Kiai Ahmad dipilih oleh tim formatur. Ia menggantikan ketua umum sebelumnya, Habib Luthfi.

Sementara itu, posisi sekretaris dan bendahara masih dijabat oleh orang-orang yang menjabat di kepengurusan sebelumnya. Posisi sekretaris dipegang oleh Ahmad Rofiq, sedangkan Suwanto menjabat sebagai bendahara. Ketua Panitia Pengarah Musda MUI Jawa Tengah, Ahmad Rofiq, mengatakan pemilihan ketua tak dilakukan melalui pemungutan suara.

Ketua umum, kata Rofiq, dipilih oleh tim formatur. “MUI bukanlah organisasi masyarakat atau partai politik yang biasanya saling berebut kedudukan dan jabatan ketua umum, melainkan merupakan organisasi keagamaan yang harus dijauhkan dari intrik-intrik politik,” ujarnya.

■ bowo pribadi **ed:** ferry kisihandi

NTB Siap Gelar Festival Maulid Nusantara

MATARAM — Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) memantapkan persiapan pelaksanaan Festival Maulid Nusantara (FMN) ke-6 yang dipusatkan di Mataram pada Mei 2011. “Rapat dengan pihak terkait terus dilaksanakan agar festival terlaksana dengan baik,” kata jubiir Pemprov NTB, Lalu Moh Faozal, di Mataram, Ahad (20/2).

Ia mengatakan persiapan sudah dimulai sejak November tahun lalu, termasuk desain utama FMN. Targetnya paling lambat pada akhir April mendatang semua persiapan sudah harus rampung lalu disesuaikan dengan program yang ditetapkan oleh panitia pusat.

Rencananya, ujar Faozal, pelaksanaan FMN ini melibatkan perwakilan dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan FMN dicetuskan Pemprov DKI Jakarta setelah melewati serangkaian kajian termasuk sejarah Islam. Pada 2006, DKI menyelenggarakan maulid dalam bentuk FMN yang melibatkan beberapa provinsi.

Pada 2009, FMN ke-4 berlangsung di Kepulauan Bangka Belitung dan pada 2010, FMN ke-5 digelar di Palu, Sulawesi Tengah.

■ antara **ed:** ferry kisihandi



AGUNG SUPRIYANTO

MEMASUKI MASJID

Seorang jamaah memasuki Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjelang Maghrib, Sabtu (19/2). Selain dijadikan cagar budaya nasional, masjid ini juga dikukuhkan Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu dari 18 situs tapak sejarah perkembangan Kota Jakarta.

Waspadai Label Halal Palsu

Nashih Nasrullah

Pemerintah diharap menindak produsen yang menggunakan label halal palsu.

JAKARTA — Penggunaan label halal palsu pada produk yang beredar di pasar masih cukup tinggi. “Banyak produk dengan label palsu yang menipu masyarakat,” kata Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim, di Jakarta, Ahad (20/2).

Menurut Lukmanul, jumlah produk berlabel halal palsu itu sebanyak 40 hingga 50 persen dari keseluruhan pro-

duk yang teregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencapai 113.515 unit. Ia menegaskan, pencantuman label halal palsu itu merupakan pelanggaran yang dilakukan produsen.

Ia beralasan, label dicantumkan pada kemasan produk tersebut tak sesuai dengan ketentuan dan aturan sertifikasi halal LPPOM MUI. Mestinya, produk bersangkutan memperoleh sertifikat halal terlebih dahulu sebelum akhirnya mencantumkan label halal sebagai pertanda kehalalan produk.

Kondisi ini membuatnya prihatin. Seharusnya, jelas dia, produsen memberikan jaminan keamanan bagi para konsumen dengan memberikan label halal pada produknya sesuai ketentuan LPPOM MUI, yaitu melalui sertifikasi halal dulu. Apalagi, ketentuan labelisasi halal sudah dite-

gaskan dalam sejumlah regulasi.

Regulasi itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Ia mengakui, sertifikasi halal memang bukan kewajiban.

Namun, kata dia, ketika produsen mencantumkan sendiri label halalnya tanpa didahului sertifikasi halal, mereka sudah melanggar regulasi-regulasi yang ada itu. Ia menilai, keberanian produsen mencantumkan label halal palsu tak terlepas dari kondisi lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Ini diperburuk dengan adanya asumsi bahwa sertifikasi halal adalah perkara yang kompleks dan merepotkan

serta membutuhkan biaya mahal. “Padahal, asumsi ini tidak benar karena sertifikasi mudah dan tidak mahal. Kami meminta pemerintah bertindak tegas pada produsen yang melanggar,” kata Lukmanul.

Ia pun menuntut agar pemerintah menarik produk berlabel halal palsu itu dari pasar. Produsen pelaku pelanggaran itu diimbau agar melakukan ‘pemutihan’ terhadap produk berlabel halal palsu yang sudah beredar. Tak kalah penting, konsumen perlu lebih cermat terhadap produk berlabel halal palsu itu.

Agar konsumen tak tertipu, Lukmanul menyarankan mereka untuk berkonsultasi dengan LPPOM MUI atau mengakses laman resmi LPPOM sehingga mengetahui produk mana saja yang telah mendapatkan sertifikasi halal dan berhak mencantumkan label halal padaemasannya.

Kritis

Secara terpisah, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LMB-NU), Zulfah Musthofa, mendesak masyarakat, terutama umat Islam kritis dan tidak sembarang mengonsumsi makanan. Sebab, tidak semua produsen mempunyai etika dan moralitas dalam berbisnis. “Tidak semua produsen jujur,” kata dia.

Zulfah menuturkan, pencantuman label yang tidak sesuai dengan ketentuan proses sertifikasi halal adalah upaya pengelabuan dan penipuan terhadap para konsumen. Padahal, setiap pembeli mempunyai hak mengetahui status kehalalan dan kualitas barang yang akan dikonsumsi.

Menurut dia, sekalipun barang itu halal, pencantuman label halal palsu tetap saja merupakan hal terlarang.

■ **ed:** ferry kisihandi

Pengurus Masjid Mesti Kreatif

Irwan Kelana, Nashih Nashrullah

JAKARTA — Pengurus masjid mesti kreatif dalam mengelola dan memberdayakan masjid. Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI), Natsir Zubaidi, mengakui hingga saat ini para pengurus masjid masih kurang kreatif. Padahal, kreativitas mereka sangat penting agar kegiatan masjid menarik dan memberikan manfaat lebih besar untuk masyarakat.

“Kreativitas adalah kunci keberhasilan untuk menjadikan masjid sebagai basis peradaban umat,” kata Natsir di Jakarta, Ahad (20/2). Melalui kreativitas itu, paling tidak ada beberapa peran penting masjid yang bisa dioptimalkan. Di antaranya, peran masjid sebagai institusi yang mencerahkan bagi umat dan bangsa.

Dalam hal ini, masjid bisa dijadikan tempat berdialog dan berkomunikasi bagi masyarakat tanpa melihat latar belakang mazhab. Pun sebagai media penengah di tengah keragaman yang ada di dalam masyarakat. Masjid, jelas Natsir, tak boleh menjadi ajang konflik dan harus steril dari pertentangan antarmazhab.

Selain itu, peningkatan kreativitas pengurus masjid akan membuat peran masjid sebagai tempat pencerahkan, terwujud. Sebab, masjid adalah tempat ideal untuk menyampaikan wawasan kepada umat, baik tentang wawasan keislaman maupun kebangsaan. “Lewat masjid,

kita memaksimalkan dakwah dan menanamkan kebanggaan sebagai Muslim.”

Peran lainnya, masjid dijadikan sebagai basis pemberdayaan umat dalam segala ranah kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya. Meski demikian, Natsir mengungkapkan ada kendala yang menghadang untuk mewujudkan itu semua, seperti sumber daya manusia. Belum banyak generasi muda Muslim yang dilibatkan.

Itu melahirkan tantangan bagaimana menarik generasi muda ke masjid. Menurut dia, perhatian mereka terhadap masjid kian menurun. Oleh karena itu, gerakan mengembalikan generasi muda ke masjid mendesak dilakukan. Natsir mengingatkan pula pentingnya standar.

Mereka harus mempunyai standar agar semua kegiatan terukur. Sekarang, DMI dan Kementerian Agama, ujar dia, sedang menyusun standarisasi pengelolaan masjid agar bisa dipakai pengurus masjid di seluruh Indonesia. “Kami ingin para pengurus masjid mempunyai pedoman dalam mengelola masjid dengan baik.”

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal berharap masjid yang ada di seluruh Indonesia terlibat aktif dalam bidang pendidikan. Ia mengatakan, ada 770 ribu masjid. Jika 10 persen dari jumlah itu menyelenggarakan pendidikan, akan melahirkan dampak besar bagi kemajuan umat. ■ **ed:** ferry kisihandi



AMPELSA/ANTARA

KENDURI MAULID

Sejumlah remaja mempertunjukkan kesenian dalail khairat pada kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ulee Kareng, Banda Aceh, Sabtu (19/2). Dalail khairat merupakan kesenian yang menyajikan pembacaan ayat-ayat suci Alquran yang biasa dilakukan masyarakat Aceh pada saat memperingati hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad.

Embarkasi Lampung Bakal Terwujud

BANDAR LAMPUNG — Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan usulan Lampung untuk menjadi embarkasi haji dapat segera diwujudkan. “Hanya tinggal menunggu kesiapan landasan bandara yang dapat didarati pesawat berbadan lebar,” katanya di Bandar Lampung, Sabtu (19/2).

Jika sudah siap, kata dia, tak ada alasan untuk tidak mewujudkan Lampung sebagai embarkasi sendiri. Sekarang, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera memperpanjang landasan pacu agar memenuhi standar bandara internasional. Ia mengatakan, usulan penambahan titik embarkasi merupakan usulan bagus.

Menurut Suryadharma, penambahan itu sama artinya

dengan efisiensi tenaga, waktu, dan biaya sehingga akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah. Pejabat Harian Sekda Lampung, Barlian Tihang, mengatakan peningkatan status Bandara Raden Intan menjadi bandara internasional dapat diwujudkan pada tahun ini.

Barlian mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang memenuhi kekurangan panjang landasan, yaitu sepanjang 500 meter agar memenuhi syarat landasan bandara internasional sepanjang 3.000 meter. “Kami menargetkan, mewujudkan Lampung sebagai embarkasi haji pada musim haji 2011 ini,” katanya.

Ia meyakini, dengan segera menjadikan Lampung sebagai salah satu embarkasi, pela-

nyan terhadap jamaah haji lebih maksimal. Semua syarat, papar Barlian, sudah dipenuhi, tinggal landas pacu bandara. Pada 2010, Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, mengusulkan agar Lampung menjadi embarkasi haji kepada Kementerian Agama.

Usulan tersebut disetujui oleh Kementerian Agama. Namun, karena saat itu Lampung belum memiliki bandara internasional, Kementerian Agama menetapkannya sebagai embarkasi haji antara. Dengan status seperti itu, jamaah haji masih menjadikan Bandara Soekarno Hatta sebagai tempat transit, tanpa menginap di Asrama Haji Pondok Gede, seperti jamaah lain yang belum memiliki embarkasi sendiri.

■ antara **ed:** ferry kisihandi

:: bursa ::

	Jumat (18/2)		
FTSE 100	6.082,99	0,07%	▼
Dax	7.426,81	0,29%	▲
Cac 40	4.157.14	0,12%	▲
Dow Jones	12.391,25	0,59%	▲
Nasdaq	2.833,95	0,08%	▲
Shanghai	2.899,79	0,93%	▼
Hang Seng	23.595,24	1,26%	▲
Nikkei	10.842,80	0,06%	▲
Straits Times	3.086,92	0,13%	▲
BEI	3.501,5	1,95%	▲

Sumber: BBC dan Limas sampai 17.30 WIB

:: kurs ::

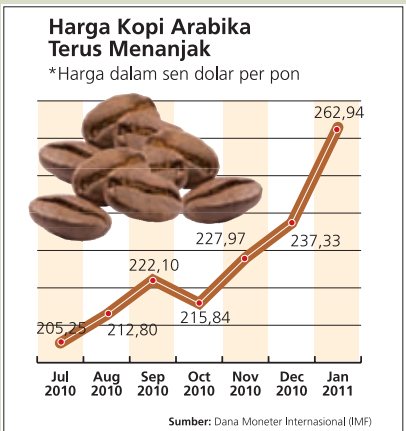
	Jumat (18/2)	
	BELI	JUAL
AUD	8.448	9.468
EUR	11.363	12.724
GBP	13.508	15.128
HKD	1.073	1.202
JPY	100	112
SGD	6.546	7.334
USD	8.358	9.358

Sumber: eTrading Securities sampai 17.30 WIB

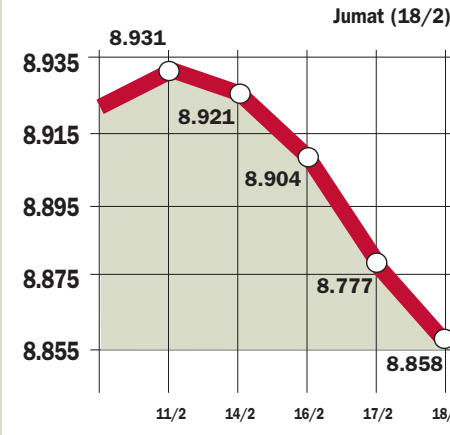
:: indikator ::

Kopi Arabika Catat Harga Tertinggi Dalam 14 tahun

Dalam periode Juli 2010 hingga Januari 2011 harga kopi Arabika telah tercatat naik sebanyak 28,11 persen. Bahkan harga kopi Arabika saat ini tercatat yang tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Musim kering di Brazil diperkirakan membuat produksi kopi wilayah itu turun sebanyak 30 persen. ■



:: kurs tengah dolar AS ::



BI Rate Berpeluang Naik

Sefti Oktarianisa,
Fitria Andayani

PADALARANG — Peluang menaikkan suku bunga acuan BI (BI rate) selama 2011 sebagai respons atas inflasi masih terbuka lebar. Meski kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini sulit dihindari jika inflasi, terutama inflasi inti terus meningkat.

“Instrumen suku bunga akan naik secara bertahap. Kita lihat respons masyarakat, apakah ekspektasi inflasi turun atau naik,” kata Ketua Tim Outlook Jangka Pendek dan Diseminasi Kebijakan Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Endy Dwi Tjahyono di Padalarang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Meskipun BI juga akan mengeluarkan kebijakan moneter dengan mengombinasikan instrumen-instrumen yang dimiliki. Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menaikkan BI rate pada Februari 2011 sebanyak 25 basis poin (bps) ke posisi 6,75 persen. BI rate naik setelah sejak 18 bulan lalu bertengger di posisi 6,5 persen.

Ia menambahkan, kenaikan suku bunga BI rate secara terukur diperlukan untuk mengendalikan ekspektasi inflasi yang mulai meningkat, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini juga dilakukan beberapa negara *emerging market*, seperti Thailand, Korea, Peru, Hungaria, dan India yang sudah meningkatkan suku bunga sebesar 25 bps. Sedangkan Brazil sudah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 bps.

Ia juga menambahkan, kebijakan nilai tukar rupiah akan dioptimalkan untuk membantu pengendalian inflasi, terutama yang bersumber dari kenaikan harga komoditas global (*imported inflation*).

Untuk menekan inflasi akibat barang-barang impor serta *capital inflow* yang masuk ke Indonesia, ia mengaku nilai tukar rupiah harus dibiarkan terus terapresiasi. Derasnya aliran masuk modal asing memberikan kontribusi penguatan rupiah sejak kuartal II/2009. Sepanjang 2010, BI pun menjaga nilai tukar rupiah di level Rp 9.000 per dolar untuk menjaga agar daya saing Indonesia tetap kuat.

Namun, stabilisasi rupiah itu berbiaya besar karena BI mesti menyerap sebagian aliran dana masuk. Kendati di sisi lain, aliran dana tersebut membuat cadangan devisa naik pesat dari 66 miliar dolar AS menjadi 98 miliar dolar AS.

Oleh karena itu, pada tahun ini BI tidak akan menjaga terus rupiah di level Rp 9.000 per dolar AS jika *capital inflow* masuk. Sebab, jika terus dijaga, *capital inflow* justru akan terus masuk karena imbal hasil yang diperoleh di Indonesia menarik. “Kalau rupiah dibiarkan apresiasi, itu justru bisa jadi *bumper* untuk mengurangi *capital inflow*,” katanya.

Apalagi, prediksinya penguatan rupiah masih berada dalam batas wajar jika rupiah berada di level Rp 8.700 per dolar AS. Meski kini rupiah berada pada level Rp 9.000-an, Endy menuturkan, sebenarnya rupiah masih bisa menembus Rp 8.700.

■ ed: wulan tunjung palupi



WIHDAN HIDAYAT

MCDONALD’S GESER TONI JACK’S

Sejumlah pelanggan antre memesan makanan di gerai McDonald’s Sarinah, Jakarta, Ahad (20/2). McDonald’s resmi menggeser ToniJack’s di Sarinah, setelah waralaba makanan asal AS itu memenangi tender penyewaan gerai yang diajukan PT Sarinah.

Mentan: Produksi Beras Meningkatkan

Teguh Firmansyah

Tak ada alasan bagi Bulog untuk tidak menyerap beras dari petani.

JAKARTA — Pemerintah tak akan merevisi target pertumbuhan produksi beras tahun ini meski sejumlah kalangan meragukannya. Produksi beras diperkirakan akan meningkat hingga lima persen dibandingkan dengan tahun lalu.

“Kita tetap optimistis capaian produksi beras tahun ini dapat tumbuh hingga lima persen,” ujar Menteri Pertanian, Suswono, kepada *Republika* akhir pekan lalu. Sementara itu, memasuki masa panen raya, harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, mulai mengalami penurunan.

Suswono mengungkapkan, berdasarkan evaluasi sementara, sejumlah sentra-sentra produksi beras mengalami peningkatan. Seperti di Sragen, Jawa Tengah, kata dia, terjadi peningkatan produksi beras hingga tujuh persen. “Jadi, tidak ada penurunan produksi namun kecenderungannya re-

latif meningkat,” jelasnya. Kalau pun terjadi penurunan, lanjutnya, sifatnya kasus per kasus sehingga tidak bisa digeneralisasi.

Pemerintah sendiri memproyeksikan target produksi padi nasional naik lima persen dibanding 2010. Dengan kenaikan itu, produksi gabah nasional diperkirakan akan menyentuh angka 70,01 juta gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 43,93 juta ton beras.

Menurut Mentan, beragam langkah akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi beras, di antaranya, mempercepat proses penanaman pascapanen dan menyalurkan benih-benih unggul yang tahan akan perubahan iklim, seperti Inpara ataupun Inpago.

Kemudian, lanjut Mentan, dengan menambah areal tanam yang tahun ini diharapkan produksi bisa meningkat hingga 70 ribu hektare. “Kita juga siap tambahkan 2.700 penampungan untuk memanfaatkan air hujan,” jelasnya. Pemerintah memperkirakan puncak panen akan jatuh pada Maret dan April mendatang.

Dengan meningkatnya produksi beras, tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak mencari target pengadaan dalam negeri sebesar 3,5 juta ton. Apalagi, lanjut Mentan, kementeri-

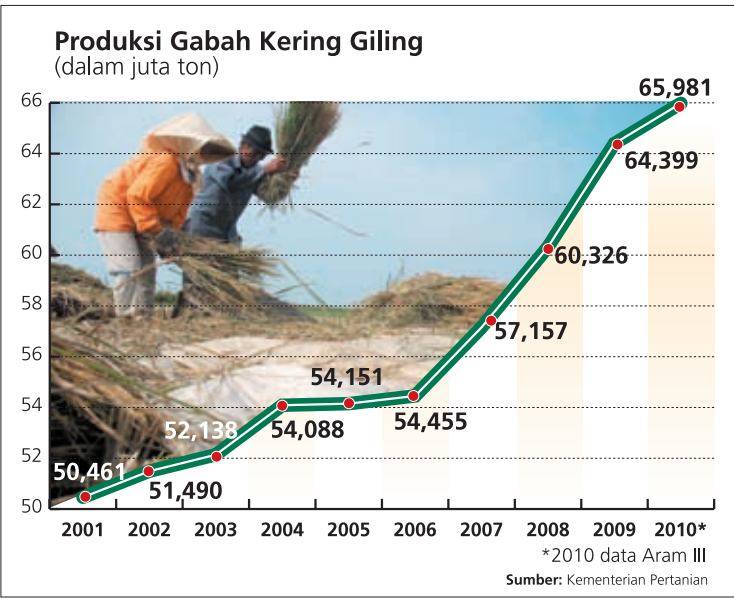
annya telah menerbitkan peraturan tentang rafaksi sehingga Bulog bisa menyerap beras lebih fleksibel. “Jadi, Bulog tidak ada alasan lagi untuk tidak menyerap beras dari petani,” jelasnya.

Kenaikan harga pangan dunia, menurut Mentan, bisa menjadi rangsangan untuk meningkatkan keanekaragaman produksi sehingga tidak bergantung hanya dari beras.

“Kita mempunyai beragam makanan jenis bahan pangan seperti singkong, jagung, dan umbi-umbian yang mempunyai kadar karbohidrat. Jadi, ini yang perlu kita giatkan,” kata Suswono. Ia mengungkapkan, dengan produksi 37 juta ton dan konsumsi 33 juta ton, surplus beras nasional kini hanya 4 juta ton. Angka ini masih rawan buat pemenuhan cadangan stok dalam negeri.

Berbeda dengan Thailand, meski produksinya hanya 20 juta ton, konsumsi mereka 10 juta ton sehingga masih ada selisih 10 juta ton. “Inilah mengapa kita perlu giatkan bahan pangan nonberas,” tuturnya.

Pengamat Perberasan Institut Pertanian Bogor (IPB), Hussein Sawit, menilai pencapaian pertumbuhan rata-rata produksi beras nasional sebesar lima persen pada 2011 sulit terealisasi mengingat cuaca iklim ekstrem



yang terjadi. “Tumbuh lima persen itu sulit. Kalau tumbuh dua persen atau tiga persen saja atau lebih baik dari kemarin sudah bagus,” ujarnya.

Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan jumlah impor beras Indonesia akan mencapai 1,75 juta ton. Angka ini lebih besar dari angka jatah impor beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) sebanyak 1,5 juta ton.

Selain itu, Bulog juga diwajibkan menyerap 3,5 juta ton beras tahun ini untuk menghindari kemungkinan penambahan impor beras. Catatan Bulog me-

nyebutkan beras yang sudah masuk ke gudang sekarang mencapai 25,832 ribu ton dari total kontrak pengadaan sebanyak 41 ribu ton.

Di hadapan DPR pekan lalu, Dirut Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan jika stok beras ingin aman, paling tidak pertumbuhan produksi harus mencapai enam persen pada 2011.

Meski penyerapan lambat, Sutarto mengaku optimistis dapat memenuhi target penyerapan 2,8 juta ton beras pada Juni dari target penyerapan yang dipatok Kementan pada 2011 sebanyak 3,5 juta ton. ■ ed: wulan tunjung palupi



HUMAS PLN

BEROPERASI

Petugas pemeliharaan PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Kamojang sedang memeriksa instalasi pada Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Kamojang yang berkapasitas 140 megawatt, di desa Laksana, Kecamatan Ibut, Bandung, Jawa Barat, Ahad (20/2).

Pengusaha Tunda Pembayaran Listrik

Teguh Firmansyah

JAKARTA — Pengusaha masih ragu mengenai pembayaran tarif listrik untuk Januari 2011. Kisruh mengenai penggunaan pembatasan kenaikan 18 persen membuat mereka memilih menunggu.

“Kami masih mengharapkan kepastian pemerintah melalui keputusan resmi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), apakah pembatasan (*capping*) itu dicabut atau tidak,” ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Erwin Aksa, di kantor BPP Hipmi akhir pekan lalu.

Keputusan itu harus dikeluarkan sebelum batas akhir pembayaran pada 20 Februari 2011. Saat ini, keputusan DPR ditafsirkan berbeda-beda oleh DPR dan PLN. Para anggota DPR menyatakan *capping* masih

berlaku, sedangkan PLN menafsirkan tetap memberlakukan pencabutan pembatasan.

Menurut Erwin, pemerintah seharusnya tidak mencabut *capping* itu secara keseluruhan. Pemerintah, kata dia, hendaknya tetap memberikan insentif bagi industri atau usaha yang lemah. Sebaliknya, bagi industri yang sudah mampu, hendaknya tidak diberikan insentif itu.

Industri seperti hotel-hotel bintang lima dan rumah mewah tidak perlu lagi disubsidi sehingga lebih baik subsidi listrik dialihkan kepada sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur. “Kami sadar ada ketidakadilan, tapi harus dilihat juga usaha yang tidak mampu itu hendak diberikan insentif,” jelas Erwin.

Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VII bersama

PLN dan Kementerian ESDM pekan lalu memberikan putusan berupa kesimpulan yang bisa diartikan secara multitafsir.

DPR meminta PLN disiplin dalam anggaran dan melakukan evaluasi serta melaporkannya sebelum pembahasan APBN-P. Komisi memaknai kesimpulan tersebut sebagai penundaan pemberlakuan pencabutan *capping*, sedangkan PLN memaknai kesimpulan tersebut sebagai izin dalam pencabutan *capping*.

Di sisi lain, PLN telah menyatakan bahwa tetap akan menindak tegas konsumen yang tidak membayar tagihan secara tepat waktu, bahkan akan menajutahkan denda sebesar tiga persen apabila terlambat membayar tagihan.

Selama belum ada kepastian, menurut dia, pengusaha masih belum mau membayar tagihan listrik. “Seti-

daknya buat satu pernyataan resmi, dari menteri, misalnya, yang menegaskan kami harus bayar atau tidak,” katanya. Sementara itu, PLN menawarkan solusi proses mencicil tagihan yang ditawarkan sebagai jalan tengah. Namun, langkah ini dinilai hanyalah solusi pendek dalam kisruh tarif listrik.

Pengusaha yang tergabung dalam HIPMI meminta PLN untuk tetap mencermati pelaku usaha industri secara lebih spesifik. Alasannya saat ini masih terdapat industri seperti industri rumah tangga, industri yang bersaing dengan produk Cina, ataupun industri padat karya yang masih memerlukan sokongan pemerintah. Namun di sisi lain PLN menilai pemberlakuan pembatasan tarif bagi industri tertentu bukanlah merupakan praktik yang baik bagi industri. ■ ed: wulan tunjung palupi

:: probis ::

Singapore Airlines Terbaik di Asia Pasifik

JAKARTA — Singapore Airlines menjadi maskapai penerbangan terbaik kawasan Asia Pasifik versi Readers Choice Awards 2011 DestinAsian. Penghargaan ini telah diperoleh Singapore Airlines sebanyak enam kali berturut-turut.

Dalam survei tahunan tersebut, para pembaca majalah tersebut memilih Singapore Airlines sebagai maskapai terbaik untuk lima kategori penghargaan. Para pembaca memilih Singapore Airlines sebagai maskapai penerbangan terbaik untuk kategori Best

Overall Airline (Maskapai Terbaik secara keseluruhan), Best Airline for Premium Class Travel (Maskapai Terbaik untuk Perjalanan Kelas Premium), dan Best Airline for Economy Class Travel (Maskapai Terbaik untuk Perjalanan Kelas Ekonomi).

Singapore Airlines juga dinobatkan menjadi Best In-flight Entertainment (Sistem Hiburan di dalam Pesawat Terbaik), serta Best Frequent-flyer program—KrisFlyer.

General Manager Hong Kong, David Lim, menyatakan Singapore Airlines sangat bangga dapat meraih lima penghargaan dalam lima kategori yang berbeda dari DestinAsian Readers Choice Award tahun ini. “Penghargaan ini akan mendorong kami lebih baik lagi,” ujarnya, kemarin. ■ fitria andayani **ed:** zaky al hamzah

Bank Mandiri Tingkatkan Efisiensi Transaksi Nasabah

JAKARTA — PT Bank Mandiri Tbk terus meningkatkan efisiensi dalam transaksi keuangan nasabah. Efisiensi ini diharapkan berkontribusi pada pendapatan dari komisi.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Fransisca Nelwan Mok, menyatakan, sepanjang 2010, realisasi *fee based income* Bank Mandiri mencapai Rp 8,3 triliun atau tumbuh sebesar 57 persen dari perolehan pada 2009 sebesar Rp 5,3 triliun. “Salah satu strategi utama kami untuk mendorong

bisnis ini adalah melalui *wholesale transactions*,” ujarnya, di Jakarta, Ahad (20/2).

Bank Mandiri, lanjut Fransisca, juga dapat melayani transaksi-transaksi perbankan bagi mitra usaha nasabah korporasi. “Hal ini sejalan dengan keinginan kami untuk menjadi mitra perbankan dengan solusi keuangan yang komprehensif dan terpercaya,” ujarnya.

Untuk mendukung tujuan itu, Bank Mandiri memperkenalkan berbagai layanan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi perbankan nasabah. Layanan tersebut adalah pengelolaan pembayaran), pengelolaan penerimaan pembayaran, dan pengelolaan likuiditas.

■ fitria andayani **ed:** zaky al hamzah

Investasi AS akan Dinaikkan

Yasmina Hasni

Komitmen ini sebagai tindak lanjut kunjungan Obama.

JAKARTA — Amerika Serikat (AS) serius meningkatkan investasi dengan target menjadi investor terbesar di Indonesia. Para pengusaha asal AS yang tergabung dalam delegasi US-ASEAN Business Council menjelaskan hal itu saat melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, pekan lalu.

“Delegasi ini adalah yang paling besar yang datang selama ini dan merupakan bagian dari *follow up* Presiden Barack Obama (Presiden AS—Red),” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam jumpa pers usai pertemuan.

Sebelumnya, ketika mengunjungi Indonesia, Obama memaparkan bahwa AS ingin kembali menjadi investor terbesar di Indonesia. Karena itulah, para pengusaha dalam delegasi itu menegaskan kepada SBY akan komitmennya untuk terus meningkatkan investasi.

Hingga saat ini, menurut Hatta, sudah ada beberapa perusahaan besar milik AS di Indonesia seperti Exxon, Chevron, dan beberapa per-

usahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas serta di perusahaan pertambangan. Bahkan Coca cola, kata Hatta, juga telah menyatakan komitmen untuk menambah investasinya.

“Mereka merasakan bahwa banyak sekali kemajuan Indonesia di dalam pelayanan investasi dan hambatan hambatan yang selama ini memang dirasakan,” tuturnya.

Karena itu, pihak AS pun mengatakan mereka berkomitmen untuk juga mengembangkan infrastruktur di Tanah Air. Sebab, AS merasakan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang harus segera dibangun di Indonesia. Sayangnya, ujar Hatta, hingga kini, komitmen tersebut belum juga dilengkapi dengan rencana investasi yang lebih konkret.

Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Elka Pangestu, menambahkan jumlah investasi AS di Indonesia diperkirakan sudah mencapai 8 miliar dolar AS antara 1990-2008. “Kalau *plan investment*-nya belum ada,” tutur Mendag. Namun demikian, ia menjelaskan sekarang ini telah ada beberapa perusahaan yang masih masuk ke dalam kategori *new investment* di Indonesia seperti GE dan AT&T.

Meskipun demikian, Hatta menekankan dalam menanggapi hal ini presiden menyampaikan kepada para

delegasi pengusaha AS itu untuk juga mengembangkan teknologi pertanian serta energi bersih atau *clean energy*.

Hal ini, jelasnya, sesuai dengan strategi pembangunan Indonesia. Menyikapi permintaan itu, para pengusaha AS, menurut Hatta, tetap berkomitmen dalam mengembangkan eksplorasi geothermal di Pulau Sumatra. Karena itulah, untuk tetap menjaga berbagai komitmen investasi tersebut, pemerintah juga akan terus menggodok regulasi yang lebih memberikan kepastian bagi para investor. “Misalkan hal yang terkait dengan perizinan, kecepatan (mengurus izin),” kata Hatta.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan mampu meraup investasi sebesar Rp 240 triliun pada 2011. Angka itu naik sekira 15 persen dibandingkan dengan realisasi 2010 sebesar Rp 208,5 triliun. Realisasi penanaman modal sepanjang 2010 telah melebihi target 2010 hingga 30,23 persen yaitu sebesar Rp 160,1 triliun. Sepanjang triwulan IV 2010 saja, realisasi modal yang diinvestasikan mencapai Rp 58,9 triliun.

Dalam pertemuan ini, Presiden didampingi Hatta Rajasa, Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh.

■ **ed:** zaky al hamzah



EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA

TARGET JAMSOSTEK

Pekerja menunjukkan kartu keanggotaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Jakarta, Ahad (20/2). PT Jamsostek pada tahun 2011 ini membidik peserta sebanyak 26.125 perusahaan.

Pegadaian Jadi PT di Semester Pertama

Citra Listya Rini

JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengkaji perubahan struktur Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas (PT). Target perubahan dilakukan pada semester I 2011.

“Kita targetkan di semester I 2011. Sekarang belum diajukan. Nantinya dari Pegadaian diajukan ke kita. Selanjutnya, kita ajukan kepada Kementerian Keuangan untuk menjadi PT,” ungkap Deputy Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Parikesit Suprpto, di Jakarta akhir pekan lalu.

Rencana perubahan Pe-

rum Pegadaian menjadi PT sudah direncanakan sejak dua tahun lalu. Parikesit menuturkan, untuk mengubah status badan usaha tersebut, diperlukan perubahan peraturan pemerintah (PP) termasuk anggaran dasar perusahaan.

Perubahan status ini perlu dilakukan sebelum Pegadaian mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pegadaian masuk dalam program privatisasi BUMN pada 2012. Berdasarkan program tersebut, pemerintah akan melepas 30 persen saham Pegadaian melalui program penawaran saham perdana (IPO). Selain Pegadaian, Perum Perumnas yang berencana melantai ke

bursa juga harus mengubah status badan hukumnya.

Jabatan Dirut Pegadaian

Kementerian BUMN rencananya Senin (21/1) akan memaparkan nama direktur utama (dirut) Perum Pegadaian. Kementerian BUMN telah mengantongi nama calon direktur utama Perum Pegadaian yang baru. Baru akan saya kabarkan Senin nanti,” papar Menteri BUMN Mustafa Abubakar, dikantornya, pekan lalu.

Sayangnya, Mustafa masih enggan memberikan latar belakang calon dirut Perum Pegadaian yang baru tersebut, termasuk juga ketika ditanyakan apakah calon orang nomor satu di

Perum Pegadaian itu berasal dari internal atau eksternal.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah memberhentikan Chandra Purnama sebagai Dirut Perum Pegadaian per 2 November 2010 lalu. Namun, Parikesit membantah bahwa Chandra diberhentikan secara mendadak pada waktu itu. “Pemberhentian Chandra memang sudah diprogramkan alias tidak mendadak,” jelasnya.

Parikesit memaparkan, Chandra ditugaskan membenahi Pegadaian. Untuk mengisi kekosongan kursi dirut Pegadaian, Kementerian BUMN menunjuk Direktur Keuangan Pegadaian, Budi-yanto, sebagai pelaksana tugas dirut. ■ **ed:** zaky al hamzah

HAJI KHUSUS 2011/2012

UMROH REGULER
MARET : 23, 26
(tgl. 23 Isr Madinah)
APRIL : 2, 9, 16, 20
MEI : 1, 7, 14, 28
JUNI : 11, 18, 28
JULY : 2, 9, 16, 23

UMROH RAMADHAN
US\$ 1750

UMROH PLUS mulai:
- AQSO : **US\$ 2500**
- TURKI : **US\$ 2400**
- CAIRO : **US\$ 2300**

PAKET PERNIKAHAN
DI MAKKAH / MASJIDIL HARAM

INFORMASI DAN PENDAFTARAN HUBUNGI KAMI :

FITTRAVEL
Baitulloh

Rkn Crown Palace Blok C 07
Jl. Prof.DR.Soepomo
No. 231 Jakarta - Selatan
Telp. (021)-70082672,
92985370, 70987091
Hp. **0815 10805721**,
0838 99107417

BAITULLOH TOUR
IZIN MENAG : D/16 Th. 2007

Jl. Tentara Pelajar No. 21 A
Patal Senayan - Jaksel 12210
Telp. **021-5307772**,
71222657, **71388802**,
71112883, **70566313**,
Hp. **0816-1180040**,
0812-9652618

MULIA WISATA

HAJI KHUSUS 2011/2012

MULAI
USD 6500

DAFTARKAN SEGERA !!! **UMROH REGULER**
Berangkat tgl : 21 Feb, 07 & 21 Mar, 04 & 18 Apr 2011

Promo !!!

Mekkah : *Umroh 9 Hari* **\$ 1,300**
14 Hari **\$ 1,475**

Mekkah : *Umroh 9 Hari* **\$ 1,450**
14 Hari **\$ 1,800**

Melayani Ticket / Tour Murah
Domestik & Internasional

PT. MULIA WISATA ABADI
izin Depag PPUU D/110 : PIHK D/361
Jl. Raya Pondok Cede, Batu Lintang Bayu No. 182, Jakarta Timur 13011
Email : muliawisata@yahoo.com
Web : www.muliawisata.co.id

Telp:021-87782411, 87780044,
87792211, 87790615,
8406665/Fax:021-87790627

HOTLINE 24 Jam : • 021-8487558 • 02193370841 • 081384994772
081386117818 • 087883451999 • 085693544354 • 02194944354

Mekkah : Grand Zam-Zam / Hilton Tower *5
Madinah : Mubarak / Wasil Reem *4
Jeddah : Sultan Plaza *4
Aroah : Tenda AC
Transit / Nuzha : Apartemen / Hotel

LAENA
TOURS & TRAVEL CENTER

HUBUNGI : **835 6660**
ATAU DATANG LANGSUNG KE KANTOR KAMI

MENERIMA PENDAFTARAN PROGRAM HAJI KHUSUS

JAMA'AH HAJI KHUSUS 2011/2012

PAKET UMROH REGULER 2011
Keberangkatan
Setiap Hari Senin
14, 21, 28 maret 2011
Informasi & Pendaftaran :
LAENA *Umrah & Haji*
835 6663
835 6183

WISMA LAENA Jl. KH. Abdullah Syafi'i No.7 Casablanca Jaksel
BEKASI : (021) 8635908 • BANDUNG : (022) 7213864 • SURABAYA : (031) 8547655 • BALI : (0361) 752525

TOUR DOM/INTL

KUALA LUMPUR F&E 3D/2N
BANGKOK - PATTAYA - 4D/3N
HONGKONG - SHENZHEN - HONGKONG 3D/2N
BALI HONEYMOON
JOGJA REGULAR

LAENA *Umrah & Haji* **83564329**

HOTEL DOM/INTL

SENGGIRI BEACH
MERCURE ANCOL
WINA HOLLYDAY VILLA
SHERATON HOTEL SINGAPORE
ARINOMA BANGKOK
GRACE JOGJA

TICKET DOM/INTL

SEBRANG 1000WARTA
JAMBI
PONDOK WING
SURABAYA

LAENA *Umrah & Haji* **835 6660 (24JAM)**

HAJI & UMRAH MAQBULAH
The Best Service Moslem Travel Agencies

KAMI MENEMUKAN PENDAFTARAN HAJI PLUS FASILITAS HOTEL BERBINTANG DAN PELAYANAN PRIMA DENGAN DP USD. 4.000
HARGA PAKET HAJI PLUS 2011 MULAI DARI USD 7.000

PROMO BY SV LANGSUNG MADINAH
UMRAH REGULER 23 MAR "Rp 13,8 jt" All in

UMRAH PROMO EKSEKUTIF
HOTEL *5 **USD 1.750**
UMRAH PLUS TURKY **USD 2.200**
UMRAH Reg. Standar **USD 1.600**

Tanggal Keberangkatan :
Mar : 6, 9, 20, 23
Apr : 3, 17, 21
Mei : 1, 4, 15, 18

Hotel : Royal Dar Eiman, Grand Zam-Zam, Firdous Rehab
Dyar International, Safir Madinah, Manazil Madinah
IZIN HAJI D/225 & UMRAH D/37

021 - 798 2305
021 - 798 3018

PT. MAQBULAH, Jl. Warung Jati Timur no 27 Buncit Jak-Sel 12740
Kunjungi : www.maqbulah.com, e-mail : maqbulah@yahoo.com
Customer service 24hr : 0856 109 7089 / 0811 827 130
Cirebon : 0231-245807, Indramayu-Ust.H.Fauzan : 08179083641

PATUNA
SAHABAT ANDA BERHAJAT

Paket Umroh Reguler (9 Hari)
Tanggal Keberangkatan :
Maret : 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
April : 3, 24, 27

AKOMODASI HOTEL :
MEDINAH : HILTON HOTEL
MEKKAH : MOVENPICK HAJAR
JEDDAH : LE MERIDIEN / MARRIOTT

Kami siap melayani perjalanan anda :
- Tiket penerbangan Dalam & Luar Negeri
- Tiket Kapal Laut
- Tiket Kereta Api

PT. PATUNA MEKAR JAYA
Jl. Panglima Polim Raya No. 43A-B Kebayoran Baru - Jakarta 12160 Indonesia
Telp. (021) 7228830, 7255411 Fax: (021) 7200414, 7200415
Jl. Cipinang Baru Timur No. 7 Rawamangun - Jakarta Timur
Telp. (021) 4703118, Fax: (021) 4701095
E-mail : patuna_umrohaji@cbn.net.id, Website : www.patunaumrohaji.com

Haji & Umroh

2011 M / 1432 H

UMROH ULTAH
16 APRIL 2011
Harga mulai
US\$ 2049
(Triple Room)

Daftarkan Segera
Quota Terbatas!

Paket Wisata Dalam & Luar Negeri
Voucher Hotel
Pengurusan Dokumen, Paspor & Visa

PT. BS. ALKHAIRAAT
TOUR & TRAVEL

*Haji dan Umroh jadi mudah!! "021-7983424" *Haji dan Umroh jadi mudah!!*

UMROH REGULER

16 MARET - 24 MARET
23 MARET - 31 MARET
30 MARET - 7 APRIL
6 APRIL - 14 APRIL
13 APRIL - 21 APRIL
20 APRIL - 28 APRIL
27 APRIL - 5 MAY
4 MAY - 12 MAY
11 MAY - 19 MAY
18 MAY - 26 MAY
25 MAY - 2 JUNI
1 JUNI - 9 JUNI

Berangkat setiap
Hari RABU!!!

TERIMA PENDAFTARAN HAJI 2012

USD. 1540

Harga sekamar ber-3
dengan pesawat LION AIR
sekamar ber-dua USD. 1600

DAPATKAN FASILITAS *5!!!
Hotel Makkah, Grand Zam-zam (Movenpick Hajar Tower)
Madinah: Al-Haram

Anak dibawah 11 th Disc. uad 150. Harga belum termasuk Perlengkapan & Airport Handling
Rp.1.000.000. Harga & Jadwal dpt berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Quad & Triple menggunakan sofa bed. Makan pagi, siang & malam di foodcourt Resto Indonesia.

Umroh + Dubai: usd. 1850
Umroh + Cairo : usd.2300
Umroh + Istanbul: usd.2300
Umroh + Hadramaut: usd.2350

PT. BS. ALKHAIRAAT T & T
Jl. Raya Pasar Minggu No. 17 A Pancoran 12780
Telp. 021-7983424 Fx. 021-7983425
email: bsa_travel@yahoo.com

www.bsa-tour.com

BIMA TOUR & TRAVEL
IZIN MENAG : D/142

Umrah & Haji

UMRAH MURAH
USD. 1350
26 Februari: 5, 26 Maret

Akomodasi Dekat :
MADINAH : ANDALUS GROUP / SETARAF
MAKKAH : REHAB FIRDOUZ / SETARAF
JEDDAH : CITY TOUR

UMRAH *5 : USD. 1650

" MENERIMA PENDAFTARAN HAJI 2011 "
USD. 6500

MELAYANI:TIKET PESAWAT ONLINE DOMESTIK & INTERNATIONAL,
CARGO CEPAT,PAHALA EXPRESS,TOUR DOMESTIC & INTERNATIONAL
TIKET DAPAT DIANTAR GRATIS!

PT. BHIAS MEGA UTAMA
Kantor : Jl. Pondok Kelapa Raya Blok A2 No. 10B Kalimalang
Duren Sawit - Jakarta Timur
Telp. 021 86905433, 86905345 Fax. 021 86905 093
INFORMASI 24 JAM : 0857 354 77 344, 0312 83 700 990, 021-07009155
Website : www.bimatour-travel.com, Email : bimatour@yahoo.com



Abdul Hamid Presdir Mulia Bintang Utama

Dukungan Ekspor Sayur Masih Rendah

Musim hujan berkepanjangan yang terjadi di Indonesia menyebabkan produksi cabai nasional turun hingga 30 persen. Ini yang membuat stok berkurang dan harga meroket. Pemerintah pun kelabakan mengatasi lonjakan harga cabai yang sampai menembus angka Rp 100 ribu per kilogram (kg). Akhirnya, pemerintah mengimpor cabai dari Malaysia dan Thailand. Kebijakan ini dinilai memprihatinkan, karena seharusnya pemerintah mendorong petani agar meningkatkan produksi cabai. Berikut petikan wawancara wartawan *Republika*, **Zaky Al Hamzah** dengan Presiden Direktur Mulia Bintang Utama **Abdul Hamid**, yang telah malang melintang di bisnis benih dan ekspor hortikultura, di ruang kerjanya, pekan lalu.

Bagaimana awal merintis industri benih hortikultura?
Saya memulai usaha ini sejak 2002. Sebelumnya selama delapan tahun saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) saya merasa tidak ada perkembangan dalam diri saya. Tapi, saya merasa beruntung bisa bekerja sebagai PNS karena saya bisa sekolah benih di Swedia dan Jerman. Setelah saya pulang ke Indonesia, saya merasa di negara ini belum ada orang yang serius menangani benih hortikultura. Sebetulnya sudah ada badan usaha milik negara (BUMN) benih (PT Sang Hyang Sri), tapi menurut saya mereka belum bisa serius dalam menangani benih hortikultura, karena mereka hanya mengambil hasil lalu menjualnya. Sedangkan Swedia negara kecil yang bisa menyuplai hampir di seluruh Eropa. Maka itu yang jadi motivasi saya untuk memulai usaha benih ini.

Akhirnya pada 2001 saya memutuskan keluar dari Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian) dan bekerja sebagai manajer produk dan pemasaran di perusahaan pembenihan asal Belanda, PT East-West Seed, yang berdomisili di Purwakarta, Jawa Barat. Dan pada 2002 saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri bernama PT Mulia Bintang Utama (MBU). Usaha ini saya mulai dengan modal Rp 50 juta, yaitu hasil menggadaikan rumah saya. Untuk memenuhi kekurangan modal maka saya menggandeng rekan bisnis. Total investasinya sekitar Rp 300 juta. Saya pun mengembangkan dan menjual berbagai benih sayuran dan buah-buahan dengan merek dagang Surya Mentari. Pabriknya di Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini, alhamdulillah, MBU mampu memproduksi 20 jenis benih buah dan sayur yang terdiri atas 60 varietas tanaman. Untuk pengembangan benih, MBU bekerja sama dengan petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Total lahan petani untuk produksi benih antara 80 - 90 hektare (ha).

Sudah bekerja sama dengan pihak mana saja?
Saya sudah mengadakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari Taiwan, Jepang, Thailand, Malaysia, Korea Selatan yang fokusnya dalam produk-produk hibrida, yaitu produk yang bernilai tinggi. Karena saya sadar perusahaan ini belum mampu memasok semua permintaan, baik dalam negeri maupun pasar luar negeri, sehingga berkolaborasi dalam dunia bisnis itu hal biasa demi kelengkapan produk.

Dukungan mereka tidak hanya benih tapi juga produk yang sekiranya berpotensi untuk Indonesia. Salah satu produk yang ditanam di sini adalah cabai 'Biola' yang berasal dari Korea Selatan. Kalau dilihat dari bentuknya, cabai ini memang lebih kecil dari cabai merah biasa, tapi menurut saya cabai ini punya potensi untuk industri makanan. Sehingga, MBU mengembangkan dalam skala besar; bahkan kini sudah diekspor ke Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Kami juga menyuplai perusahaan di sini, yakni PT Heinz ABC Indonesia. Tadinya pasokan cabai perusahaan itu dipenuhi dari impor, tapi karena MBU sudah bisa produksi cabai di Indonesia, maka mereka sedikit demi sedikit mengurangi impor bahkan kini tidak lagi impor. Kerja sama ini kami bangun sejak 2003 walaupun belum aktif seperti sekarang karena pasokan yang masih terbatas. Setiap harinya perusahaan ABC membutuhkan 100 ton cabai. Walaupun mereka memakai produk dari perusahaan lain, hampir 95 persen kebutuhan mereka itu memakai cabai 'Biola' itu. Inipun merupakan kesempatan untuk menekan angka impor cabai. Artinya, kita tidak hanya jual benihnya. Kita datang kepada petani bersama-sama dengan ABC mencoba mengembangkan usaha ini. Kebetulan visi mereka sama.

Selain ABC, adakah perusahaan lain yang dipasok MBU?

Kita juga pernah bekerja sama dengan PT Tirta Alam Segar (Wings Food) di Surabaya. Kita memasok cabai 'biola' juga ke sana, namun bentuk kerja sama antara Wings Food dengan ABC berbeda. Wings Food hanya sekedar membeli produk dari kami tanpa adanya pembangunan dari aspek-aspek petani. Cara bekerja sama MBU dan Wings Food ini hanya sekedar membeli produk. Selain ABC dan Wings Food terdapat perusahaan kecil lokal yang kita pasok. Contoh beberapa produk yang kami pasok ialah cabai, casein, dan kacang. Kalau untuk supermarket, kita belum masuk ke situ. Pasar Aceh hingga Papua sudah kita pasok, meski belum merata.

Kalau di luar negeri, ada perusahaan dari Malaysia, restoran di Jepang, dan pemerintah Timor Leste. Untuk di Malaysia, kami memasok benih jagung manis. Di sana kami jual curah karena mereka buat *packing* sendiri. Untuk tahun lalu saja kita sudah menyuplai 15 ton jagung per tahun. Sampai sekarang pun kita masih bekerja sama dengan perusahaan di Malaysia itu.

Di Timor Leste pun produk-produk kita ada yang dijual di sana. Di Timor Leste, kita tidak hanya menjual benih hortikultura, tapi juga harus membina para petaninya juga supaya mereka berhasil. Sebenarnya kaya kita *ngasih* sampel sama perusahaan di sana. Tapi, sebetulnya yang memberi sampel adalah Pemerintah Timor Leste sendiri maka kita tinggal menindaklanjuti supaya mereka berbudi daya dengan bagus. Untuk restoran di Jepang, mereka senang dengan sayur-mayur produksi MBU.

MBU juga bekerja sama dengan perusahaan di Cina?

Kita diminta untuk mengekspor kangkung ke negeri itu (Cina). Hanya saja, keuntungan ekspor kangkung ini kecil sekali. Kalau untuk pengirimannya tidak ada masalah. Kita sedang memikirkan penawaran dari mereka kepada kita. Mereka meminta dipasok 1.000 ton per tahun. Rasanya kalau di dalam iklim ekstrem seperti sekarang ini kita khawatir tidak akan sanggup. Dan bayangkan betapa lelahnya, kalau harga kangkungnya saja per kilo hanya Rp 500, urusannya pun panjang. Tapi, kita sedang berusaha.

Ada berapa jenis benih yang dipasarkan di pasar lokal dan global?

Kami memiliki dua jenis benih. Yang pertama ada *open pollinated* (OP) atau benih berseri bebas dan yang satu lagi adalah benih hibrida hasil dari persilangan. Yang kita pakai dari benih berseri bebas adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan kangkung. Untuk hibrida sendiri kita pakai cabai, tomat, dan melon.

Memang pada 2002-2004 perusahaan ini belum

memakai benih hibrida, masih OP 100 persen. Namun, sekarang kita sudah memakai benih hibrida 80 persen. Perbandingannya sendiri untuk harga benih berseri bebas dengan benih hibrida adalah 1:10.

Untuk omzetnya?
Alhamdulillah, tahun lalu sudah menghasilkan omzet hingga Rp 10 miliar. Untuk tahun ini, target omzet MBU mencapai Rp 12 miliar, dengan menambah jumlah pasar di beberapa negara, selain Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Timor Leste, dan Jepang.

Pemerintah memutuskan impor cabai. Menurut Anda?

Bagi kalangan petani, itu sangat menyakitkan. Seharusnya, pemerintah menahan diri tidak mengimpor meski harga cabai melonjak tinggi. Lonjakan harga saya kira masih wajar, karena sejumlah investor cabai tidak mau rugi ketika banyak lahan cabainya yang rusak akibat iklim ekstrem ini. Yang penting, pemerintah terus mendorong produksi cabai dalam negeri, dengan memberikan insentif kepada petani.

Menurut saya, selain kurang mendorong peningkatan produksi, pemerintah juga kurang mempertemukan petani dengan konsumen. Sehingga, petani belum banyak memiliki informasi pemasaran, khususnya di pasar luar negeri. Ini pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Pemerintah juga kurang melatih pengemasan produk hortikultura, sehingga bisa dijual ke pusat perbelanjaan atau diterima konsumen luar negeri.

Bagaimana dengan produsen benih sendiri?

Saya kira jumlahnya cukup banyak. Tapi itu tadi, belum didukung penuh pemerintah. Sehingga, sebagian terpaksa impor daripada memproduksi. Pemerintah juga kurang mendekatkan petani dengan produsen, itu belum didorong. Padahal, kalau didorong ke arah sana ini akan sangat baik. Untuk teknologi pengolahan produk hortikultura pun di Indonesia belum memadai.

Memang pemerintah sudah mengadakan program-program di sentra-sentra cabai. Seperti di daerah Jawa Barat, yakni di Garut, Ciamis, dan Cianjur. Tapi, pemerintah hanya membantu memotivasi menanam saja. Padahal, petani sekarang harus dimotivasi untuk pasarnya juga. ■ mg10

B I O D A T A

Nama : Abdul Hamid
Tempat lahir: Tanjungkarang
Tanggal lahir: 19 September 1963
Istri : Ir Dian Handayani Msi
Anak : Ahmad Irfan Fadhlullah (13 Oktober 1996)
Ahmad Surya Fadhlilah (13 Januari 2003)

Organisasi:
● Asosiasi Benih Indonesia (Asbenindo) sebagai anggota dari 1999-kini
● Himpunan Pengusaha Benih Sayuran Nasional (HPBSN) sebagai ketua II dari 2005-kini
● Keluarga Pencinta Alam WATALA, Lampung sebagai anggota dari 1987-kini

Pendidikan:
● SD Negeri 24 Tanjungkarang tamat tahun 1976
● SMP Negeri I Tanjungkarang tamat tahun 1980
● SMA Negeri Teluk Betung tamat tahun 1983
● Universitas Lampung Fakultas Pertanian tamat tahun 1987

Pekerjaan:
● 1989-1996 PNS di Ditjen Tanaman Pangan Deptan Jakarta
● 1996-2001 Manajer Pengembangan PT East West Seed Indonesia di Purwakarta
● 2001-2002 Manajer Pemasaran PT Multi Benih Indonesia
● Agustus 2002-sekarang Direktur Utama PT Mulia Bintang Utama, perusahaan yang bergerak dalam bidang perbenihan sayuran. ■

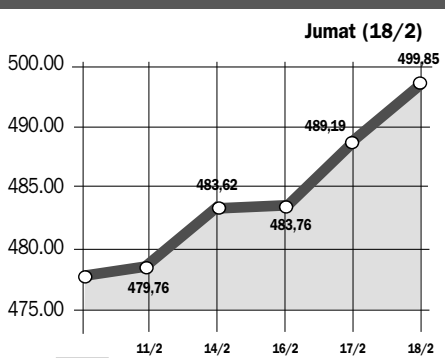
:: bursa syariah ::

		Jumat (18/2)	
DJIM	2.327,7	7,90%	▲
DJIGRC	1.736,3	14,19%	▲
DJIMTR	3.687,47	16,83%	▲
DJI100X	2.448,63	0,00	—
DJMY25D	943,08	6,35%	▲
IMXL	2.356,71	9,43%	▲
DJICHKU	1.684,23	14,56%	▲

DJIM: Dow Jones Islamic Market World Index
 DJIGRC: Dow Jones Islamic Market Greater China Index
 DJIMTR: Dow Jones Islamic Market Turkey Index
 DJI100X: Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index
 DJMY25D: Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 Index (USD)
 IMXL: Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index
 DJICHKU: Dow Jones Islamic Market China/Hong Kong Titans 30 Index

Sumber: Dow Jones Indexes Dipantau 17.00 WIB

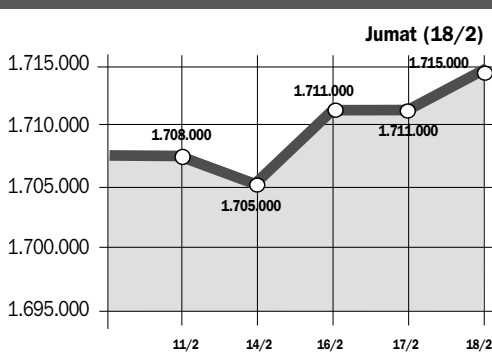
:: jakarta islamic index ::



10,66

Sumber: Liras

:: kurs dinar ::



4.000

Sumber: Wakala Induk Nusantara

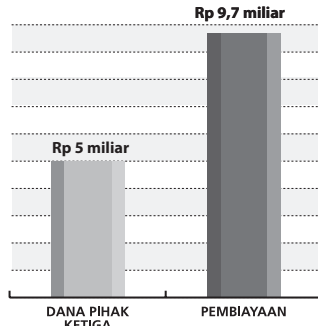
:: nisbah ::

BPRS Haji Miskin

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin berupaya meningkatkan pertumbuhan 30-40 persen pada 2011 ini. Jajaran manajemen optimistis target tersebut tercapai. Sejumlah produk yang ditawarkan adalah Tabungan Ummat, Tabungan Pendidikan, Tabungan Haji, Tabungan Qurban, dan Deposito. ■

Kinerja Keuangan

Hingga Januari 2011



Sumber: BPRS Haji Miskin

Dubai Tertarik Perbankan Syariah Indonesia

LONDON — Dubai Islamic Bank (DIB) berkeinginan mengembangkan kerja sama dengan bank syariah dan menyampaikan ketertarikannya akan pasar perbankan syariah di Indonesia.

“Keinginan itu disampaikan direktur pelaksana yang juga Penasihat Dubai Islamic Bank Capital (DIB Capital), Anwar Belgau, saat bertemu dengan Konsul Jenderal RI Dubai, Mansyur Pangeran, di KJRI Dubai,” kata Plt Sekretaris Pertama Fungsi Pensosbud KJRI Dubai, Adiguna Wijaya, kepada pers di London, pekan lalu.

Ia menyebutkan, Belgau kini berkunjung ke Jakarta sebagai tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya. Konjen RI menyampaikan bahwa KJRI Dubai juga telah menerima surat dari Bank Indonesia (BI) yang memberitahukan rencana kunjungan Belgau ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak BI.

Belgau mengatakan, tujuan ke Jakarta itu untuk mengeksplorasi dan menganalisis pasar perbankan syariah di Indonesia, serta peninjauan kerja sama jasa perbankan syariah. Menurut dia, pihaknya juga sudah mengadakan kontak dengan pihak Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) serta beberapa bank swasta di Indonesia, seperti Bank Permata dan Bank Danamon.

Syariah pertama

DIB merupakan bank berbasis syariah Islam pertama di dunia yang didirikan tahun 1975. DIB memiliki peran cukup besar dalam pengembangan dan penetapan standardisasi perbankan syariah Islam. Cakupannya bukan hanya di wilayah teluk atau Timur Tengah, melainkan juga tingkat internasional.

Saat ini, tercatat aset DIB sekitar 25 miliar dolar AS dengan kantor cabang di delapan negara. DIB telah menjalin kerja sama dengan dunia perbankan di banyak negara dalam pengembangan sistem dan bisnis perbankan berbasis syariah.

Sementara itu, DIB Capital didirikan tahun 2006 sebagai unit *investment banking* bagian dari DIB. Dengan misi utama, yakni pengembangan sistem dan penyediaan jasa investasi perbankan yang Islami, dengan berbasis syariah Islam bertaraf internasional.

Beberapa sektor jasa investasi yang ditawarkan pihak DIB Capital, di antaranya jasa keuangan, energi, telekomunikasi, transportasi dan logistik, kesehatan, retail, *hospitality*, dan perumahan.

DIB Capital juga sedang mengembangkan pasar perbankan syariah di beberapa negara, seperti Prancis, Turki, Yordania, dan Sudan. DIB Capital juga menilai Indonesia memiliki potensi besar. ■ antara ed: zaky al hamzah



FOTO: ASBISINDO

WORKSHOP BPR SYARIAH

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), A Riawan Amin (berdiri), memaparkan materi pada *workshop* “Strategi Blueprint Pengembangan BPR Syariah”, di Jakarta, akhir pekan lalu. Melalui *workshop* ini, masing-masing direksi BPR Syariah diharapkan mampu menyiapkan *blueprint* (cetak biru) dalam mengembangkan BRP Syariah.

CIMB Syariah Tingkatkan Aset

Sefti Oktarianisa

Aset unit syariah mencapai Rp 3 triliun pada 2010.

JAKARTA — CIMB Niaga menargetkan pertumbuhan aset antara 50-60 persen. Direktur *Retail Banking* CIMB Niaga, Ferdys Sutrisno, mengaku optimistis target tersebut bisa tercapai. “Rencana bisnis kita untuk unit syariah memang tidak akan berbeda dari konvensional. Kita yakin untuk tahun ini akan tumbuh signifikan karena rata-rata produk syariah yang kita miliki hampir lengkap dengan produk yang kita keluarkan, terakhir kartu pembiayaan,” ujar Ferdys kepada *Republika* usai pemaparan kinerja CIMB Niaga di tahun 2010, pekan lalu.

Ia mengatakan hal ini juga berlaku laba. Pada tahun ini, unit syariah CIMB Niaga bakal menggenjot laba hingga 100 persen dari

total laba sebelumnya Rp 30 miliar. CIMB Niaga memiliki 615 cabang dengan jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebanyak 1.304. Dari keseluruhan, 22 di antaranya merupakan kantor cabang syariah.

“Namun, kami juga menerapkan konsep *dual banking*. Jadi, pada kantor cabang konvensional pun, kami tak hanya melayani produk konvensional, tapi juga bisa melayani produk syariah,” jelasnya.

Ferdys menjelaskan, pada 2010, unit syariah CIMB Niaga baru memberi kontribusi sekitar tiga persen dari total aset.

Per Desember 2010, unit syariah CIMB Niaga mencatat aset sebesar Rp 3 triliun dengan komposisi dana pihak ketiga (DPK) dan terbesar dari deposito Rp 2,5 triliun dan pembiayaan Rp 1,8 triliun.

Sementara itu, pada 2010, secara keseluruhan, CIMB Niaga mencatat aset sebesar Rp 143,65 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan 34 persen dibanding periode akhir 2009 sebesar Rp 107,10 tri-

liun.

Dana pihak ketiga (DPK) masih mendominasi dengan pencapaian Rp 117,83 triliun atau naik 37 persen dibanding sebelumnya Rp 86,25 triliun dengan komposisi deposito sebanyak 42 persen atau Rp 19,62 triliun dan *Current Account Savings Account* (CASA atau tabungan) sebanyak 30 persen atau Rp 11,96 triliun.

Dari sisi penyaluran kredit, CIMB Niaga mencatat kredit sebesar Rp 104,89 triliun dari periode sebelumnya Rp 21,50 triliun dengan rasio *non performing loan* (NPL atau kredit macet) turun dari 3,06 persen menjadi 2,53 persen, sedangkan *loan of deposit ratio* (LDR) sebesar 88,04 persen.

Berdasarkan rasio keuangan, per Desember 2010, bank ini mencatat *return of asset* (ROA) berada di level 2,75 persen, atau naik 65 bps dari sebelumnya 2,10 persen. Dari sisi kecukupan modal, CIMB Niaga mengalami penurunan sebesar 35 bps menjadi 13,24 persen dari periode sebelumnya 13,59 persen. ■ ed: zaky al hamzah

Target DPK BNI Syariah Rp 7,8 Triliun di 2011

Sefti Oktarianisa

JAKARTA — Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah menargetkan pertumbuhan aset 50 persen pada 2011. Direktur Bisnis BNI Syariah Bambang Widjanarko mengaku optimistis pihaknya akan mampu menggenjot aset dari Rp 6,1 triliun menjadi Rp 9,1 triliun. “Kami menargetkan sejumlah peningkatan, baik dari dana pihak ketiga (DPK) maupun pembiayaan,” ujarnya saat ditemui dalam kegiatan BNI Syariah Bagi-Bagi Rezeki Bulanan, akhir pekan lalu.

Dari sisi DPK, pihak BNI bakal menggenjot pertumbuhan sebesar 57 persen dari Rp 4,9 triliun menjadi Rp 7,8 triliun. BNI optimistis mampu menaikkan kontribusi dana murah, tabungan, dan giro sekitar 55 persen. Hal ini terutama akan dilakukan pada produk tabungan, IB Hasanah dan IB Tabungan Haji Indonesia. “Kami akan genjot hingga 50 persen. Sedangkan untuk tabungan, diharapkan bisa tumbuh hingga 550 ribu nasabah,” katanya.

Berdasarkan data BNI Syariah per Februari 2011, dana mahal yang berasal dari deposito hingga kini masih mendominasi DPK, yaitu sebesar 51 persen. Dengan komposisi deposito sebesar Rp 2,62 triliun, tabungan Rp 1,98 triliun, dan giro Rp 514 miliar.

Sementara dari sisi pembiayaan, BNI mengaku akan meningkatkan hingga 56 persen, atau menjadi Rp 5,5 triliun dari periode sebelumnya Rp 3,25 triliun. Skema baru dalam akad yang dipakai, terutama untuk produk kredit perumahan rakyat (KPR), akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Selama ini kami menggunakan akad murabahah (jual

beli). Kali ini kami membahas penggunaan akad baru, yakni mudharabah mutanaqisas (pembiayaan dengan penyerahan),” jelasnya.

Diakui Bambang, akad ini akan segera berlaku dalam waktu dekat. Namun kini, hal itu masih dibahas, baik oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun Bank Indonesia (BI).

Akad mudharabah mutanaqisas dianggap akan lebih sesuai dengan realitas ekonomi masyarakat Indonesia saat ini karena mengacu pada kondisi pasar. “Kami targetkan KPR tumbuh 50 persen dengan nilai

Rp 2,5 miliar,” ungkapnya.

BNI Syariah pun akan menggenjot pertumbuhan kartu pembiayaan Hasanah Card hingga 100 persen atau mencapai Rp 360 miliar dari sebelumnya Rp 180 miliar. ■ ed: zaky al hamzah

FAKTA ANGKA

Rp 360 Miliar

Target pembiayaan yang dicapai Hasanah Card pada 2011.

PT PERTAMINA EP
UNIT BISNIS PERTAMINA EP (LIMAU)
KANTOR PUSAT

Gedung Sentra Mulla Lt. 7, Suite 710 Jl. HR. Rasuna Said Kav.X-6 No.8 Jakarta Selatan 12940
 Telepon : +62 21 5222 110 Fax : +62 21 5222 109 ; <http://www.pertamina-ep.com>

PENGUMUMAN PELELANGAN
No. 038/UBPL/II/2011

Untuk mendukung kegiatan operasi pemboran, PT PERTAMINA EP Unit Bisnis Pertamina EP Limau sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan BPMIGAS, memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa yang memiliki kredibilitas dan kompetensi sesuai sub bidang yang disyaratkan serta berpengalaman.

Penyedia Jasa yang diinginkan harus memiliki pengalaman perusahaan yang sejenis dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, yang memenuhi persyaratan: profesional, administrasi, kemampuan teknis dan manajerial serta K3LL dengan sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang memadai, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Prakuualifikasi.

I. PEKERJAAN YANG AKAN DILELANGKAN :

- **Judul Pekerjaan** : **JASA TRANSFER CRUDE OIL DARI SP. XI KE SP. U SEBESAR 10.000 BOPD SELAMA 2 TAHUN KALENDER.**
- **Kode Pekerjaan** : **EP41-S11LL0011A-P33**
- **Kualifikasi** : **BESAR (B)**
- **Bidang/Sub Bidang Pekerjaan** : **JASA LAJINYA , Sub. Bidang : PENYEWAAAN PERALATAN KERJA/ PRODUKSI/KONSTRUKSI (C.00.15)**

Calon Peserta/Penyedia Jasa wajib melampirkan surat pernyataan kesanggupan memenuhi pencapaian TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal sebesar 35%.

- **Proses Pelelangan dilakukan dengan Prakuualifikasi. Ketentuan dan Syarat prakuualifikasi diuraikan dalam dokumen prakuualifikasi.**

II. Penyedia Jasa yang berminat dapat mendaftar sebagai calon peserta pelelangan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Tanggal Pendaftaran : 21, 22, 23 Februari 2011.
- Waktu : Setiap hari kerja mulai pukul 09:00 WIB sd. 15:00 WIB
- Tempat : Melalui sistem e-procurement dengan alamat website : <https://eproc.pertamina.com> (mendaftar langsung di pekerjaan)
 Dokumen hardcopy harus dimasukkan pada saat pendaftaran melalui Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa UBP Limau.
- Persyaratan dan ketentuan pelaksanaan dapat dibaca di website : <https://eproc.pertamina.com>.**
- Prakuualifikasi dan waktu pelaksanaan penilaian kualifikasi calon peserta pelelangan dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir penyampaian dokumen prakuualifikasi.

III. Alamat Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa :
 Gedung Sentra Mulla Lt.7, Suite 710 Jl. HR. Rasuna Said Kav.X-6 No.8 Jakarta Selatan 12940
 Telepon : +62 21 5222 110 ; Fax : +62 21 5222 109

Jakarta, 21 Februari 2011.
 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
 PT PERTAMINA EP (UBEP LIMAU)

MUHAMIM

Jika Anda sering mengalami kencing di waktu malam, hati-hati! bisa jadi Anda terserang diabetes. Penurunan Muhamim, seorang penuntun Pemda DKI bisa menjadi refrensi bagi Anda bahwa pola makan yang tidak tepat bisa mengundang penyakit-penyakit berbahaya, salah satunya adalah diabetes.

“Sekitar 4-5 bulan terakhir ini, gula darah saya selalu tinggi. Menurut dokter penyebabnya karena pola makan. Keluhannya ya... saya jadi sering kencing.” Tutur Muhamim mengawali percakapan.

Poliuria (banyak kencing) merupakan salah satu gejala awal diabetes. Hal ini terjadi ketika kadar gula melebihi ambang ginjal yang mengakibatkan glukosa dalam urin menarik air sehingga urin menjadi banyak. Sementara berat badan berkurang, penglihatan kabur, cepat lelah, kesemutan dan baal-baal, serta gatal-gatal merupakan gejala lanjutan dari diabetes. Diabetes adalah peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin baik yang bersifat absolut maupun relatif atau resistensi reseptor insulin. Diabetes melitus sangat erat kaitannya dengan mekanisme pengaturan gula normal.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pria yang berdomisili di Jln. Tanah Tinggi, Jakarta Pusat ini agar gula darahnya turun, adalah dengan berobat ke dokter secara rutin. Namun sekitar 1 bulan yang lalu, ia mulai minum Gentong Mas.

“*Ahamdulillah* setelah minum

Banyak Kencing Merupakan Salah Satu Gejala Awal Diabetes

Gentong Mas secara teratur, 3X2 sendok makan/hari, sekarang saya sudah merasa sehat.” Terang Muhamim penuh syukur.

Karena telah merasakan manfaatnya, di akhir pekarapannya, pria berusia 61 tahun ini berujar, “Mudah-mudahan pengalaman saya ini dapat bermanfaat bagi orang lain...” Pungkas Muhamim penuh harap.

Gentong Mas adalah minuman kesehatan herbal alami dengan bahan utama Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) yang terbukti manfaatnya bagi penderita dari berbagai penyakit, termasuk penderita diabetes.

Habbatussauda dalam Gentong Mas dipercaya dapat meningkatkan fungsi insulin dan mengurangi resistensi reseptor insulin, sedangkan Gula Aren berperan dalam optimalisasi kerja reseptor insulin.

Gentong Mas juga mengandung Chromium yang efektif memperlancar metabolisme gula darah dan mengatur kepekaan sel terhadap insulin sehingga meningkatkan kerja pankreas.

Selain itu, Gula Aren dalam Gentong Mas memiliki indeks glikemik yang sangat aman bagi kesehatan yaitu hanya 35 (aman jika indeks glikemik dibawah 50), sehingga mampu menjaga dan merawat pankreas agar tetap berfungsi dengan baik.

Meski demikian untuk mendapatkan hasil maksimal, disarankan untuk mengatur pola makan, gula darah, olahraga, pengaturan berat badan seideal mungkin, diet rendah

lemak, kontrol stress, dan menghindari rokok serta alkohol.

Dengan aturan penggunaan yang tepat, manfaat bagi kesehatan dan kelezatan rasanya membuat semakin banyak masyarakat yang mengonsumsi Gentong Mas.

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.gentong-mas.com. Bagi Anda yang membutuhkan silakan hubungi:

Jakarta Pusat (021) 71503-671
 Jakarta Selatan (021) 7120-1834,
 Jakarta Barat (021) 71537244, Jakarta Utara (021) 37460843 Bekasi (021) 70495100, Depok (021) 37713090, Kota Tangerang (08121926-9571), Tangerang Selatan (0812-10344-355), Kab. Ta- ngerang (081279-066628), Bogor (08-52210 19518), Cirebon (0812-2169-618), Banten (0818474322), Jawa Barat (0813-94689449), Jogja karta (081320-001013), Jawa Timur (081331 6821146), Bali (08133 7571457) Lampung (0812-10883349) Sumatera Selatan (081323017741) Bengkulu (0852 73023491) Jambi (0813 6697-1641) Sumatera Utara (081384-777717) Riau (0813 87650717) Aceh (0813-629-00792) Kalimantan Timur (08522 398 27-05) Sulawesi Selatan (0813222 62366) Sulawesi Tenggara (08-131495 2303) Kalimantan Selatan (08125 0980 570) Kalimantan Barat (0813-76179-880) Kalimantan Tengah (0813 4638 2718), Sumatra Barat (0812 833 07337) NTB (081338 3556 61).●

Depkes: P-IRT812.3205.01.114 www.gentong-mas.com

Kuliah...? BSI Aja !!
Perkuliahan Periode Maret 2011

Buat apa menunggu sampai bulan September 2011 kalau di bulan Maret 2011 aja udah bisa mulai kuliah...!

Kenapa Akademik ?

- Dibandingkan dengan S1, Program Akademik (D3) lebih cepat selesai
- Cepat merembut peluang pekerjaan
- Dibandingkan dengan lulusan S1 lulusan Akademik lebih banyak dicari oleh perusahaan
- Perkuliahan lebih aplikatif
- Total biaya yang dikeluarkan lebih efisien
- Praktikum lebih banyak dibanding S1
- Kualitas lulusan tidak kalah dengan S1
- Dapat melanjutkan studi ke S1

Kenapa BSI ?

- BSI terakreditasi BAN PT dengan kurikulum yang *up to date* (selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi)
- Biaya kuliah tidak mahal :
 - Tidak sampai Rp 200.000,-/bulan
 - Bekersama dengan 8 Bank Nasional
 - Dosen profesional dan terlatih (sertifikasi)
 - Fasilitas kampus modern
- Tersedia banyak beasiswa pendidikan (dari Yayasan, Kopertis, Dikti dan perusahaan swasta)
- Bagi yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S1, BSI bekerjasama dengan Universitas dan Sekolah Tinggi terkemuka di Indonesia
- Ada BSI Career Center (BCC) yang bekerjasama lebih dari 1.000 perusahaan & BSI Entrepreneur Center (BEC)
- On-line academe tidak kalah dengan S1
- Kegiatan mahasiswa beragam (15 unit kegiatan mahasiswa)
- Puluhan prestasi mahasiswa internasional maupun lokal
- Kegiatan sosial kemasyarakatan
- Lokasinya tersebar dimana-mana, lebih dekat dari rumah atau kantor (menghemat biaya transport mahasiswa)
- Gratis Laptop/Netbook

Periode Pendaftaran :

Gel. I : 1 Nov 2010 - 2 Des 2010
 Gel. II : 3 Des 2010 - 5 Jan 2011
 Gel. III : 6 Jan 2011 - 2 Feb 2011
 Gel. IV : 3 Feb 2011 - 3 Mar 2011

Mulai Kuliah 14 Maret 2011

8181
 81818181

Halo BSI!
500851
 (021) 8000063

www.bsi.ac.id

* Syarat & ketentuan berlaku ** Internal

:: gawang ::

Valencia	0-0	Sporting Gijon
Mallorca	1-0	Athletic Bilbao

Sebanyak 22 pemain timnas pra olimpiade rencananya akan berangkat ke Palembang hari ini, Senin (21/2) pagi. Mereka akan mulai berlatih lagi pada Selasa (22/2) di Stadion Jakabaring Palembang. Sementara itu, Turkmenistan telah tiba di Palembang sejak Ahad kemarin. ■ fernan rahadi **ed:** endro yuwanto

■ **ed:** endro yuwanto

MESUT OEZIL



RAJA ASSIST DARI GELSENKIRCHEN

Fernan Rahadi

Oezil kerap mengganti posisi Kaka.

Tak banyak yang memprediksi Mesut Oezil akan langsung bersinar di musim pertamanya bersama Real Madrid. Maklum, gelandang timnas Jerman keturunan Turki ini baru kali pertama merumput dan belum terlalu mengenal persepakbolaan di daratan Spanyol. Arsitek Madrid, Jose Mourinho, tertarik mendatangkannya bersama Sami Khedira seusai keduanya tampil mengesankan bersama timnas Jerman di Piala Dunia 2010. Dibanding Ricardo Kaka, mantan pemain AC Milan yang telah datang lebih dulu musim sebelumnya, Oezil jelas kalah tenar. Namun, absennya pemain Brasil tersebut selama setengah musim sejak musim panas lalu ternyata mampu dimanfaatkan Oezil.

Bersama Cristiano Ronaldo dan Angel Di Maria, Oezil menjadi nyawa permainan skuat Los Blancos musim ini. Dengan tinggi 181 cm, Oezil memang tidak terlihat lincah, terutama jika dibandingkan Ronaldo dan Di Maria. Namun, jika bicara statistik, pemain berusia 22 tahun itu memiliki *assist* lebih banyak dari dua rekannya tersebut di ajang La Liga, yakni delapan *assist* berbuah gol. Prestasi tersebut membuatnya dijuluki ‘Si Raja Assist’ oleh pers Spanyol.

“Saya memang suka memberikan *assist* kepada rekan-rekan saya. Saya seperti berada di bulan jika mereka bisa mencetak gol karena *assist* saya,” kata Oezil seperti dilansir laman resmi Madrid.

Namun, tak hanya *assist* yang menjadi keunggulan Oezil. Ia pun pandai mencetak gol seperti yang ditunjukkannya saat mencetak satu-satunya gol untuk Jerman pada partai melawan Ghana di babak penyisihan grup Piala Dunia 2010. Di level klub, sejauh ini ia telah mencetak sembilan gol untuk Madrid. “Memberi *assist* dan mencetak gol membuat saya senang,” tutur pemain yang sempat dijuluki Zinedine Zidane dari Jerman tersebut.

Kemampuannya yang lengkap memang tak hanya membuat para Madridista mengidolakannya, tetapi juga membuatnya dipuji Mourinho, pelatih yang *ngotot* membelinya dari Werder Bremen seharga 15 juta euro, harga yang cukup murah untuk pemain dengan kemampuan sehebat dirinya.

“Mesut telah memenangkan hati para suporter Madrid,” ujar Mou seusai timnya yang bermain dengan 10 pemain mampu menaklukkan Espanyol, pekan lalu. Saat itu, Oezil menjadi starter menyinkirkan Kaka sebagai *starting line-up*.

Meski tampil dari bangku cadangan, Oezil juga menjadi ‘roh’ permainan Madrid saat menekuk Levante 2-0, Ahad (20/2) dini hari WIB. Kemenangan ini merapatkan jarak Madrid dengan Barcelona di puncak klasemen La Liga.

Oezil kali pertama menyentuh bola saat masih berusia tujuh tahun di Gelsenkirchen, kota kelahirannya di Jerman. Saat itu, ia kerap berpindah-pindah klub, mulai dari Westfalia 04 Gelsenkirchen, Teutonia Schalke-Nord, dan Falke Gelsenkirchen. Sebagai pemain campuran Turki-Jerman generasi ketiga, ia mengakui perbedaannya dengan rata-rata pemain Jerman lain adalah dalam hal *skill* mengolah bolanya.

“Teknik dan jiwa saya dalam hal mengolah bola lebih banyak dipengaruhi oleh darah Turki. Namun, dalam diri saya juga mengalir darah Jerman yang disiplin dan pekerja keras,” kata Oezil suatu kali.

Karier sepak bolanya dimulai pada 2005 saat ia membela klub Bundesliga, Schalke 04. Di klub tersebut, ia sudah digadang-gadang menjadi pemain besar. Namun, ternyata takdirnya adalah berkembang di klub rival, Werder Bremen, klub yang membelinya seharga 4,3 juta euro pada Januari 2008 atau saat ia belum genap berusia 20 tahun.

Di klub berjuluk the River Islanders itulah Oezil berkembang menjadi bintang. Bersama *playmaker* Brasil, Diego Ribas da Cunha, ia membawa Bremen menjadi juara Piala Jerman pada musim 2008/2009. Kala itu, ia mencetak satu-satunya gol kemenangan atas Bayer Leverkusen. Prestasi musim tersebut membawanya masuk ke skuat timnas Jerman.

Masih di musim tersebut, Oezil menjadi bintang Jerman pada Piala Eropa U-21. Pada laga final melawan Inggris U-21, ia menjadi *man of the match* dan mengantarkan timnya menang 4-0.

Namun, prestasinya yang paling gemilang sejauh ini adalah saat membawa timnas Jerman senior menembus semifinal Piala Dunia 2010. Selain mencetak satu gol ke gawang Ghana, ia lagi-lagi mempe-cundangi Inggris saat menjadi kreator gol terakhir Der Panzer yang dicetak Thomas Mueller. ■ **ed:** endro yuwanto

:: offside ::

YVONNE MANNING



Bayi Ketiga ‘Setan Merah’

Yvonne Manning, 27 tahun, menambah deretan istri pesepak bola Manchester United (MU) yang sedang mengandung anak. Istri bek MU John O’Shea ini tengah mengandung tiga bulan dan diperkirakan akan melahirkan pada Juli atau Agustus mendatang.

Dua pekan lalu, Manning dengan perut yang mulai membuncit muncul di depan publik. Bayi buah cinta O’Shea dan Manning akan menjadi penghuni baru ketiga di markas ‘Setan Merah’, Old Trafford.

Manning dan O’Shea menyusul pasangan Rebecca dan Rio Ferdinand yang sedang menantikan kelahiran bayi perempuannya pada April atau Mei nanti. Serta, Leanne dan Wes Brown yang juga sedang menunggu anggota baru di keluarga mereka.

“Pasangan ini menunggu anak pertamanya musim panas nanti. Setelah Rebecca Ferdinand dan Leanne Brown, kehamilan Manning melengkapi *hat-trick* bayi yang akan lahir di MU tahun ini,” sebut pernyataan yang dilansir *kicckette.com*, akhir pekan lalu. Bedanya, bila pasangan Ferdinand dan Brown menantikan anak ketiga, sedangkan bagi O’Shea ini akan menjadi bayi pertama.

O’Shea menikahi Manning di sebuah lokasi terpencil di Kapel Lady, Maynooth, Kildare, Irlandia, 8 Juni tahun lalu. Tak banyak pemain MU yang menghadiri pesta pernikahan itu karena bersamaan dengan digelarnya Piala Dunia di Afrika Selatan. Namun, Coleen Rooney tampak menghadiri pesta yang digelar pada siang hari itu. Istri bintang MU Wayne Rooney itu hadir dengan ditemani sepupu suaminya, Claire. ■ **ratna puspita ed:** endro yuwanto

NICOLAS ANELKA

Hanya Sempurna Saat Latihan



Menjadi algojo penalti memang tak pernah mudah. Mental memainkan peranan yang paling penting agar bola bersarang ke gawang lawan. Faktor inilah seperti yang menjadi masalah pada diri Nicolas Anelka.

Striker Chelsea asal Prancis itu gagal mengeksekusi penalti pada babak keempat Piala FA saat melawan Everton. Chelsea pun gagal memperpanjang harapan meraih Piala FA untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Arsitek Chelsea, Carlo Ancelotti, menyatakan, Anelka sebenarnya merupakan algojo terbaiknya dan tak pernah gagal ketika melakukan penalti saat latihan. “Pada sesi latihan, Anelka mencoba banyak tembakan dan dia selalu berhasil mencetak gol. Kami memang menyiapkan waktu khusus untuk melatih penalti,” kata Ancelotti seperti dilansir *Goal.com*, Ahad (20/2).

Chelsea unggul terlebih dulu melalui Frank Lampard pada menit ke-114, Everton membalas melalui Leighton Baines dua menit menjelang pertandingan berakhir. Namun, Everton berhasil menang lewat adu penalti 4-3.

Anelka yang menjadi eksekutor ketiga tampak tidak tenang ketika akan mengeksekusi penalti. Alhasil, tendangan striker berusia 31 tahun ini dengan mudah diantisipasi Tim Howard. Selain Anelka, tendangan Ashley Cole juga melambung dan gagal menembus jala Howard. ■ **ratna puspita ed:** endro yuwanto



Istana Weltevreden Jadi RSPAD Gatot Subroto

Sampai saat ini, tiap hari ratusan orang lebih mengunjungi tempat ini untuk berobat karena gedung yang indah dan megah serta memiliki pekarangan luas ini adalah Istana Weltevreden (sangat puas), yang kini menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto di Senen Raya, Jakarta Pusat. Istana ini merupakan salah satu dari sejumlah kediaman yang dimiliki oleh Gubernur Jenderal Petrus Abraham Van der Parra (1714-1775). Dia adalah gubernur jenderal VOC yang hidup mewah dan foya-foya. Gubernur jenderal ini menikmati gedung ini sebagai tempat kesenangan kepada keluarganya. Pekarangan rumah mewah tersebut kini menjadi bagian dari Jalan Senen Raya. Pada abad ke-19, Belanda

membongkar rumah mewah ini dan menjadikannya sebagai rumah sakit militer. Pada tahun 1950-an namanya diubah menjadi RSPAD Gatot Subroto mengabadikan nama Wakil Kepala Staf AD setelah ia meninggal dunia. Adanya gedung megah ini tidak dapat dipisahkan ketika Belanda pada abad ke-19 memindahkan pusat pemerintahan dari kota tua di Pasar Ikan ke daerah selatan. Istana ini sendiri telah dihancurkan. Namun, sampai abad ke-20, Belanda masih menyebut daerah ini Weltevreden. Dalam foto, pelukis Johannes Rach (1720-1783), sekelompok orang di alun-alun di depan rumah besar itu pada waktu pagi. Audiensi ini dilakukan di lantai dasar sambil membacakan petisi kepada gubernur jenderal. Dia dapat dikenali dengan bentuk

badannya yang gemuk. Dia berada di tengah-tengah kerumunan orang yang memakai rambut palsu dengan buntut diikat—kebiasaan kala itu. Di sekitar tempat itu, beberapa wanita yang menggunakan gaya pakaian abad ke-18 tengah lewat dan sang pelukis menggambarkan adegan ini dalam beberapa gerakan untuk memperoleh kesan meyakinkan tentang politik Batavia. Gubernur Jenderal Van der Parra memiliki sebuah gedung megah lainnya di Jacatraweg (kini Jalan Pangeran Jayakarta). Pada abad ke-18, jalan ini merupakan kawasan tempat tinggal untuk kaum elite (kelas atas VOC). Seperti juga di Senen, di Jalan Pangeran Jayakarta tidak terlihat bekas-bekas kejayaan masa lalu yang disenangi oleh orang Belanda dan Erropa.



Di Jalan Dr Abdurahman Saleh (dulu Hospitaalweg), terdapat gedung untuk para pelajar sekolah dokter Jawa (gedung Stavia). Di gedung inilah pada 20 Mei 1908 para siswanya melahirkan hari Kebangkitan Nasional. Gedung ini letaknya berdekatan dengan RSPAD Gatot Subroto, sedangkan di belakang Hotel Borobudur di Lapangan Banteng sampai tahun 1940-an terdapat sebuah tangsi militer Belanda yang dikenal dengan Batalion 10. ■



REKOR MURI BATIK *TIE-DYE* Ribuan pelajar mengangkat kain batik usai dicelupkan ke dalam pewarna alam dengan teknik *tie-dye* di Epicentrum Walk, Jakarta, Sabtu (19/2). Sejumlah 1.532 pelajar dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi se-Jakarta mengikuti pemecahan musium rekor Indonesia (Muri) untuk kategori aplikasi *tie-dye* dengan peserta terbanyak ini.

SUTM Depok Belum Dilindungi

KOTA KEMBANG — Sebagian Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kota Depok masih belum terlindungi. Hal ini menyebabkan saluran tersebut sangat sensitif dengan gangguan alam seperti petir, gangguan dari ranting pohon, atau layanan yang tersangkut. “SUTM di sebagian daerah di Kota Depok memang masih telanjang (belum terlindungi oleh kabel),” ujar M Imron, ahli Humas PLN Kota Depok kepada *Republika*, Ahad (20/2). Kondisi ini pula yang menyebabkan sering terjadinya gangguan listrik ke rumah-rumah di Depok. “Jadi, bila ada kejadian alam seperti hujan besar yang menyebab-

kan saluran tersebut terkena pohon atau ada petir, gangguan ini bisa mencapai gardu induk. Ini yang menyebabkan gangguan yang terjadi di rumah-rumah konsumen,” paparnya. Daerah yang SUTM-nya masih belum terbungkus, katanya, salah satunya adalah daerah Sawangan. Padahal, ungkapnya, kebanyakan di daerah perkotaan saluran udaranya sudah terbungkus. Sayangnya, SUTM di daerah pinggiran kota masih telanjang. Menurutnya, biaya yang diperlukan untuk membungkus semua saluran ini tidaklah murah. Oleh karena itu, tidak semua SUTM dapat terlindungi saat ini. Namun, tambah Imron, pihak

PLN sudah mengakalinya dengan cara menjaga jarak aman antara pohon dan SUTM tersebut. “Program pemangkasan pohon di sepanjang saluran listrik sedang kami jalankan dan hal ini akan berlangsung terus-menerus karena pohon *kan* tumbuh terus. Maka, kami pun terus berusaha menjaga jarak aman pohon dan listrik agar gangguan tidak terjadi,” ungkapnya. Ketika ditanya soal kondisi listrik di Kota Depok yang beberapa hari terakhir diguyur hujan deras dan petir, Imron menyatakan dirinya belum menerima laporan gangguan listrik. “Kami belum menerima keluhan gangguan listrik,” tuturnya. Namun, lanjutnya, apabi-

Mini market ilegal mewabah.

KEBON SIRIH — Perda No 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta akan direvisi tahun ini. Sekretaris Daerah (Sekda), Fadjar Panjaitan, mengatakan revisi tersebut sudah dimasukkan ke Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta. “Kemungkinan revisinya termasuk penyempurnaan jarak minimarket,” katanya, Ahad (20/2). Dalam perda itu, disebut mini swalayan maksimal memiliki luas 4 ribu meter persegi. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya 100-200 meter persegi harus berjarak 0,5 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan lingkungan/kolektor/arteri. Selain itu, waktu penyelenggaraan usaha perpasaran swasta di mulai pukul 09.00 hingga pukul 22.00. Jika minimarket memiliki luas sampai 200 meter, perizinannya dikeluarkan oleh wali kota. Jika luasnya mencapai 2 ribu meter, perizinannya berada di tangan wakil gubernur. Jika luasnya lebih dari 2 ribu meter, perizinannya oleh gubernur. Fadjar mengatakan proses inventarisasi minimarket ilegal berlangsung sejak 14-27 Februari. Instruksi itu sudah disampaikan kepada

Asisten Perekonomian dan Administrasi DKI, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan (KUMKP) DKI, serta pengelola PD Pasar Jaya untuk melakukan pendataan ulang. Beberapa surat nantinya yang bakal diperiksa ialah keterangan domisili yang dikeluarkan camat dan lurah, Undang-Undang Gangguan (UUG) oleh Satpol PP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikeluarkan Sudin KUMKM dan Perdagangan, IMB dari Sudin Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B), hingga izin Prinsip yang dikeluarkan wali kota. Dokumen yang akan diserahkan itu terbagi menjadi tiga kelompok, yakni minimarket yang dokumennya lengkap, dokumen tidak lengkap, dan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitannya pun ada tiga kategori, yaitu minimarket dibongkar, ditutup, atau diizinkan sesuai dengan ketentuan Perda No 2/2002 tentang Perpasaran Swasta. Anggota Komisi A DPRD DKI, William Yani, mengatakan minimarket ilegal telah mewabah di Jakarta. Meskipun sudah ada Perda dan Instruksi Gubernur No 115 Tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Minimarket di Provinsi DKI Jakarta pada November 2006, kenyataannya justru minimarket semakin banyak.

Tak hanya minimarket, sekda pun mengatakan akan mengevaluasi keberadaan pasar modern. Dalam perda yang sama pun disebutkan aturan zonasi pasar modern minimal 2,5 km dari pasar tradisional. **Bekasi terus bertambah** Sementara itu, di Kota Bekasi, jumlah minimarket juga terus bertambah. Dalam satu bulan, sembilan hingga sepuluh minimarket baru muncul di wilayah setempat. Namun, Pemerintah Kota Bekasi tidak memiliki payung hukum untuk membatasi jumlah minimarket tersebut. “Asal kompetisinya sehat tidak akan ada masalah,” ujar Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), Muhammad Ridwan, akhir pekan lalu. Jumlah minimarket yang didata Disperindagkop pada 2010 mencapai 66 buah. “Kota Bekasi ini penyangga Ibu Kota sehingga terus berkembang,” ungkapnya. Diungkapkannya, pendirian minimarket di wilayah setempat selama ini hanya berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin gangguan. Tidak ada aturan lain yang membatasi jumlah dan interval jarak dengan pasar tradisional. “Selama masyarakat tidak terganggu dan izin dipenuhi, tidak ada masalah dengan pendirian minimarket.” ■ c01 ed: maghfiroh yenny

:: cuaca ::		
LOKASI	PAGI	SIANG
Kepulauan Seribu	Berawan/Gerimis	Berawan
Jakarta Utara	Berawan/Gerimis	Berawan
Jakarta Pusat	Berawan/Gerimis	Berawan
Jakarta Selatan	Berawan	Berawan/Gerimis
Jakarta Timur	Berawan	Berawan/Gerimis
Jakarta Barat	Berawan/Gerimis	Berawan/Gerimis
Depok	Berawan	Berawan/Gerimis
Tangerang	Berawan	Berawan
Bekasi	Berawan	Berawan
Bogor	Berawan	Berawan/Gerimis
Sumber: BMKG		
:: hotline ::		
NOMOR TELEPON DARURAT		
Darurat = 1122		
Ambulan = 1183		
Polisi = 1104		
Pemadam Kebakaran = 113 / 344 / 109 / 75075		
SAR / Search and Rescue = 1156		
Gangguan telepon = 1177		
Gangguan listrik = 1238		
PMI = 021-4207051		
Sentra Informasi Keracunan 021-4250767		
NOMOR TELEPON PENTING		
Komnas HAM = 392-5230		
YLKI = 797-1378, 798-1858		
LBH Jakarta = 314-5518		
Informasi tol = 841-3630, 841-3526 ext 351		
Dinas Kebersihan DKI = 809-2744, 809-1056		
PDAM DKI = 5798-6555, 577-2010		
Penerangan narkoba = 566-5660		
Penerangan HIV/AIDS = 163		
Stasiun Gambir = 121		
Stasiun Jatinegara = 819-2318		
Stasiun Pasar Senen = 421-0164		

:: jadwal kereta ::	
Kereta	Jam Berangkat
Jakarta (Gambir)-Yogyakarta	
Argodwipangga	08.00
Argolawu	20.00
Bima	17.00
Gajayana	17.30
Taksaka-1	08.45
Taksaka-2	20.45
Jakarta (Jatinegara)-Yogyakarta	
Fajarutjogja	06.57
Senja Utama Solo	20.27
Senja Utama Yk	19.42
Jakarta (Gambir)-Surabaya	
Bima	17.00
Argo Anggrek-1	09.30
Argo Anggrek-2	21.30
Sembrani	19.30
Jakarta (Gambir)-Semarang	
Argo Muria	07.30
Argo Sindoro	16.45
Jakarta (Jatinegara)-Semarang	
Bangun Karta	16.12
Fajar Utama	07.42
Gumarang	18.17
Senja Utama	19.32
Senja Kediri	15.12
Jakarta (Gambir)-Bandung	
Argo Parahyangan	
17064	13:30
30020	05:45
30022	09:15
30024	11:30
30026	16:15
30028	19:00
30030	20:25

Tunggak Pembayaran Gaji, Pengusaha Korea Melarikan Diri

Tak ada cara lebih bijak yang bisa dilakukan pengusaha konveksi asal Korea Selatan, Kim Jin Woo, selain melarikan diri. Kim yang memiliki pabrik konveksi pakaian dalam yang berlokasi di Jatuiwung, Kabupaten Tangerang, ini menunggak pembayaran gaji 2.690. Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Tangerang, Monang Panjaitan, mengatakan PT Kizone Internasional itu telah tiga kali menunggak pembayaran gaji. “Perusahaan ini awalnya berjanji membayar gaji bulan Januari pada Jumat (11/2) pekan lalu. Dengan alasan teknis, perusahaan menunda pembayaran pada Senin (14/2). Terakhir, ia menunda kembali pembayaran gaji sampai Rabu (16/2),” ujar Monang akhir pekan lalu. Setelah penundaan yang ketiga kalinya ini, perwakilan karyawan melaporkan pemilik perusahaan Kim Jin Woo ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Setelah kita cek, ternyata Kim Jin Woo tidak ada di tempat.

Dari informasi yang kita dapatkan, Kim beserta kedua orang manajernya yang juga orang Korea pergi pada Senin (14/2),” katanya. Namun, lanjutnya, mereka mendapat informasi bahwa pihak perusahaan pemesan produk PT Kizone, yaitu PT Grandtex, siap menjalankan perusahaan Senin (21/2). “Itu pun sebatas menyelesaikan order per Januari. Setelah itu, kita belum tahu nasib karyawan PT Kizone ini,” ujarnya. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, R Pitoyo, mengatakan mereka akan terus memanggil pemilik perusahaan sebanyak tiga kali. Setelah tidak ada respons, akan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena ini kasus perdata. Total tunggakan PT Kizone Internasional ini mencapai Rp 4,5 miliar. “PT Grandtex menyanggupi membayar gaji karyawan secara mencicil,” ungkap Pitoyo. Dinas Tenaga Kerja dan Transmi-

grasi Kabupaten Tangerang telah berkoordinasi dengan Bupati untuk segera menyurati pihak Kedutaan Korea Selatan. Tujuannya, untuk mengantisipasi bila Kim Jin Woo tidak memenuhi panggilan Disnakertrans terkait keterangan pengupahan dan status perusahaannya. Dari Informasi yang didapat *Republika*, PT Kizone Internasional ini termasuk ke dalam 149 perusahaan yang dilaporkan Kementerian Keuangan kepada Mabes Polri dalam kasus penggelapan pajak Gayus Halomoan Tambunan. Pitoyo menambahkan bahwa sejak awal, tidak ada permasalahan yang pelik di PT Kizone Internasional. “Yang saya ketahui, sejak awal berdiri, operasional karyawan dan kondisi perusahaan sangat sehat. Tetapi, mengapa tiba-tiba Kim Jin Woo selaku pemilik PT Kizone Internasional ini tidak membayar gaji ribuan karyawannya dan melarikan diri?” tanyanya. ■ c03 ed: maghfiroh yenny

Jabar Siapkan 580 Ribu Loker

Arie Lukihardianti

Disnakertrans akan membekali semua tenaga kerja dengan saefty passport.

BANDUNG -- Pencari kerja di Jabar, bisa sedikit tenang. Pada 2011 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar akan menyiapkan sedikitnya 580 ribu kesempatan kerja formal dan non formal.

Menurut Kepala, Mustopa Djamaludin, ribuan peluang kerja di Jabar tersebut bisa diketahui dari hasil inventarisir dan pelaporan para pelaku usaha di kabupaten/kota. Kemungkinan, masih ada perusahaan yang belum melaporkan peluang kerja baru sehingga akan menambah jumlah kesempatan kerja tersebut.

Karena, sambung Mustopa, data yang dimiliki saat ini merupakan hasil laporan para pelaku usaha di kabupaten/kota. Kemungkinan, masih ada perusahaan yang belum melaporkan peluang kerja baru sehingga akan menambah jumlah kesempatan kerja tersebut.

Kendati peluang kerja tersebut cukup besar, namun peluang tersebut masih didominasi oleh kesempatan kerja pada bidang non formal. Dari 580 ribu kesempatan yang ada, sekitar 30 persen merupakan peluang pada bidang formal, sisanya berada pada sektor non formal.

Mustopa mengatakan,

hingga Februari 2011 ini, sudah tercatat sekitar 38.326 peluang kerja yang sudah terisi *by name by address*. Data ini, bisa diketahui dari pelaporan kebutuhan kerja di yang dilaporkan langsung ke Pemprov Jabar.

Menurut Mustopa, jumlah kesempatan kerja itu meningkat hingga 11,06 persen. Peningkatan ini, didukung oleh para investor yang masuk ke Jabar yang mengalami peningkatan signifikan. “Pada sektor formal, kesempatan kerja banyak, terutama industri dan konstruksi. Semenatar, yang non formal kebanyakan berada pada sektor perdagangan, pertanian dan jasa,” ujarnya.

Mustopa menjelaskan, tahun ini, Jabar berencana akan membangun 60 ribu rumah baru. Ini tentunya akan membuka peluang kerja baru. Satu rumah, kata dia, minimal akan membutuhkan 10 orang tenaga kerja.

Hal itu, dikatakan Mustopa, sudah menjadi ketenutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bila perusahaan memiliki kewajiban melaporkan kesempatan kerja ke Disnaker. “Jadi, pengembangan perumahan tersebut pasti akan melapor juga,” tegasnya.

Untuk mempersiapkan tenaga kerja di era globalisasi dan perdagangan bebas, kata Mustopa, Disnakertrans akan membekali semua tenaga kerja dengan *safty passport*. Karena, salah satu tuntutan investor dan perusahaan besar di luar negeri adalah membutuhkan produk yang higienis dan te-

naga kerjanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan K-3.

Oleh karena itu, pihaknya pernah mengundang pelajar SMK dan mahasiswa untuk mengikuti seminar tentang *safty passport*. Karena, kata Mustopa, pelajar tersebut dalam waktu dekat ini akan memasuki dunia kerja. Semua pelajar yang mengikuti seminar itu, memperoleh sertifikat yang bisa dimanfaatkan sebagai persyaratan mencari pekerjaan. Karena, dengan seminar tersebut mereka memiliki kompetensi K-3.

Materi yang diberikan dalam seminar, kata Mustopa, terkait K3, perlindungan diri dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, hukum ketenagakerjaan dan hak dan kewajiban pekerja. “Seminar ini merupakan seminar pertama di Indonesia yang melibatkan pelajar secara massal,” ucap dia.

Kabiro Bangsos Setda Jabar, Tati Marsini mengungkapkan, pemprov sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi, Indonesia sudah menargetkan pada tahun 2015 merupakan tahun berbudaya K-3. “Kegiatan ini untuk mengantisipasi liberalisasi yang saat ini sedang berlangsung,” katanya.

Dengan pemahaman K-3 ini, pihaknya berharap, para pekerja bisa meningkatkan kemampuan sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Sebab, tuntutan negara maju adalah produknya harus memiliki mutu yang baik, aman digunakan, dan ramah lingkungan, katanya menandas-

kan. ■ ed: agus



EDI YUSUF/REPUBLICA

DILANTIK

Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Provinsi Jabar, memiliki kepengurusan baru periode 2011-2016. Pengurus baru itu dilantik di Aula Barat Gedung Sate Jl Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (19/2). Diharapkan para pengurus baru untuk lebih memerhatikan aspek sosial kemasyarakatan karena IPHI adalah organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

‘Penertiban Jangan Matikan Usaha Rakyat’

Riga Nurul Iman

SUKABUMI -- Sebagian warga di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, meminta penertiban tambang yang dilakukan polisi, tidak memutus mata pencahariannya. Pasalnya, mayoritas warga terutama di Desa Cidahu dan Desa Cidadak, sangat tergantung kepada aktivitas penambangan.

Sebelumnya, Polres Sukabumi tengah gencar-gencarnya menertibkan kegiatan penambangan liar di kawasan selatan Sukabumi. Bahkan, polisi telah menangkap sebanyak sepuluh orang tersangka kasus tambang liar.

Warga, Desa Cidahu, Yana Sukmayana (40 tahun) mengatakan, sekitar 90 persen mata pencaharian warga bergantung pada aktivitas penambangan terutama emas. Sementara di sisi lain, perusahaan tambang besar, menguasai akses untuk mengeksplorasi kekayaan tambang.

“Warga sebenarnya sudah mengajukan perizinan kepada pemerintah. Namun sayangnya, hingga kini belum ada tanggapan,” katanya, akhir pekan. Dampaknya, polisi mulai menertibkan kegiatan mereka karena tidak memiliki perizinan.

Yana mengatakan, pihaknya berharap ada solusi terbaik menyangkut permasa-

lahan tersebut. Sehingga masyarakat sekitar yang menambang di lahannya sendiri, tidak mati mata pencahariannya.

Kapolres Sukabumi, AKBP Bagus Srigustian mengatakan, upaya penertiban dilakukan setelah pihaknya memberikan peringatan terlebih dulu kepada warga. Namun, sebagian warga masih tetap beraktivitas tanpa dibekali perizinan.

Langkah penertiban, kata Bagus, dilakukan karena aktivitas tambang liar telah meresahkan masyarakat. “Rerata kegiatan mereka sudah berjalan hampir selama dua tahun,” ungkap dia.

Dari pantauan polisi, ada

sebanyak 90 lokasi pertambangan liar di Kabupaten Sukabumi. Puluhan titik lokasi tambang liar terdapat di lima kecamatan. Di antaranya Kecamatan Simpenan, Tegalbuleud, Ciracap, Sagaranten, dan Surade.

Awalnya, terang Bagus, proses penertiban tambang liar sulit untuk ditertibkan. Para penambang kerap kali berpindah-pindah tempat dalam menjalankan aksinya. Kegiatan penambangan seperti itu, sangat merugikan warga sekitar. “Kegiatan tambang yang berpindah-pindah menyebabkan bekas lubang yang rawan longsor dan menimbulkan korban jiwa,” tegasnya. ■ ed: agus



DOK. KODIKLAT TNI AD

RAPIM KODIKLAT

Komandan Kodiklat TNI AD Letjen TNI Budiman mengetuk palu tanda dimulainya acara Rapim Kodiklat TNI AD TA.2011 di Parongpong Lembang, belum lama ini.

Kodiklat TNI AD Adakan Rapim

Agus Yulianto

BANDUNG – Kodiklat TNI AD menggelar rapat pimpinan. Rapim dipimpin oleh Komandan Kodiklat TNI AD, Letjen TNI Budiman dan dihadiri oleh seluruh pejabat di lingkungan Kodiklat bertempat di Parompong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Rapim ini digelar untuk menyamakan visi, misi, persepsi terhadap permasalahan aktual agar diperoleh kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak bagi segenap unsur pimpinan jajaran Kodiklat TNI AD.

Selain itu, untuk menyampaikan arahan dan kebijakan pimpinan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja dan anggaran satuan TA 2011, agar pembinaan satuan dapat terlaksana secara cepat, terpadu dan mencapai hasil yang optimal.

Dalam rapat ini juga disampaikan penjelasan dari masing-masing fungsi baik fungsi utama maupun fungsi organik serta berupaya me-

ningkatkan peranan IT dalam bidang pendidikan khususnya penggunaan aplikasi *e-learning* dan meningkatkan produktivitas kerja satuan dalam rangka reformasi birokrasi.

“Oleh karena itu, sesuai dengan peranan dan fungsi Kodiklat TNI AD, perlu dilakukan pembenahan piranti lunak, sistem dan metode pada aspek doktrin,” kata Budiman. Sedangkan pada tataran struktural, akan dilakukan penataan organisasi dan validasi organ agar lebih efektif dan efisien.

Sementara untuk reformasi birokrasi pada tataran kultural adalah meningkatkan profesionalisme dan etos kerja prajurit dan PNS Kodiklat TNI AD dalam setiap pelaksanaan tugas dan tatanan yang dihadapi ke depan.

Selain itu, penataan dan pengembangan struktur organisasi menuju postur TNI yang dapat memenuhi kekuatan MEF (*minimum essential force*) serta melanjutkan pembenahan 10 komponen pendidikan, dengan priori-

tas pada penyempurnaan kurikulum pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pembekalan para guru dan pelatih serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Dan Kodiklat menegaskan, bahwa keterbatasan anggaran yang ada di Kodiklat TNI AD hendaknya tidak boleh menyurutkan langkah untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan.

Untuk itu, kata dia, susunan rencana program yang realistis dan logis sesuai skala prioritas guna memaksimalkan pencapaian tugas pokok.

Terkait Rapim ini, Budiman mengatakan, perlu ada perbaikan di beberapa hal permasalahan lainnya. Hal ini, kata dia, agar progia TA 2011 lebih terarah dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan renstra Kodiklat TNI AD tahun 2010 – 2014 serta untuk memperoleh satu kesatuan dalam menjalankan kebijakan pimpinan TNI AD. ■

:: Pojok Legislatif Jabar ::

Komitmen DPRD Jabar Topang Dana Posyandu

Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) tentu tidak bisa dengan pendekatan kuratif. Semua sepakat, upaya preventif jauh lebih efektif dalam menekan AKI dan AKB yang jumlahnya masih tinggi di Provinsi Jabar.

Data dari Dinas Kesehatan Jabar, menunjukkan, AKI dan AKB di Jabar masih berada di posisi 30 hingga 40 per 1.000 kelahiran. Kegiatan preventif atas ancaman AKI dan AKB itu tentu membutuhkan topangan dari seluruh pihak.

Seperti kita ketahui, pos pelayanan terpadu (Posyandu) menjadi ujung tombak dalam mengurangi terjadinya AKI dan AKB. Karena itu, DPRD Jabar sangat mendukung program Posyandu di daerahnya. Bila perlu, program itu disuplai anggaran yang memadai.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Drs H Nur Supriyanto MM mengungkapkan, Pemprov dan DPRD Jabar akan terus berusaha meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, terutama untuk mengurangi angka kematian balita dan ibu melahirkan. Untuk tahun 2011 saja, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp 700 miliar.

Anggaran tersebut jauh lebih besar ketimbang tahun sebelumnya (2010) yang hanya Rp 300 miliar. Komitmen DPRD Jabar terhadap program pencegahan AKI dan AKB itu kembali disampaikan Nur dalam kunjungan kerja ke Posyandu Raflesia di Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, belum lama ini.

Nur menjelaskan, khusus untuk kegiatan Posyandunya, telah disediakan dana sebesar Rp 7 miliar. Dana itu sengaja dialokasikan untuk menunjang kegiatan Posyandu dalam rangka menekan AKI dan AKB. Tahun lalu, dukungan APBD Jabar terhadap Posyandu hanya Rp 2 Miliar.

Nilai tersebut, tegas dia, me-



DOK. FRI

Drs H Nur Supriyanto MM

Wakil Ketua DPRD Jabar

mang dinilai kurang. Karena itu, pihaknya berani mengalokasikan dana Rp 7 miliar, dengan harapan kinerja Posyandu maksimal. Pihaknya tidak ingin kegiatan Posyandu terabaikan karena topangan dananya minim.

Perlu diakui, Posyandu merupakan pos pelayanan terdepan bagi warga. Melalui Posyandu, warga, khususnya ibu-ibu bisa berkonsultasi seputar kehamilan dan kesehatan keluarganya. Petugas Posyandu pula, sebut Nur, cukup terlatih dalam menyosialisasikan program kesehatan yang digulirkan pemerintah.

Nur memaparkan, program sosialisasi kesehatan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada dinas kesehatan. Mengingat, tambah dia, sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan sangat terbatas.

Dalam menyalurkan dana Posyandu itu, kata Nur, akan sangat tergantung pada pengajuan dari para bupati dan wali kota terkait. Memang, prosesnya cukup panjang, karena harus terlebih dulu melalui kabupaten/kota. Katanya menegaskan.

Dikatakan Nur, peningkatan anggaran itu tentu belum me-

nuhi angka ideal. Ke depannya, DPRD dan Pemprov Jabar akan terus meningkatkan anggaran kesehatan. Selain dukungan anggaran, pihaknya pun menggulirkan peningkatan status pusat kesehatan masyarakat (Puskemas) dengan menyediakan layanan rawat inap.

Dengan demikian, menurut Nur, warga yang akan berobat tidak akan bertumpuk di rumah sakit umum daerah (RSUD). “Saat ini jumlah pasien di RSUD sudah kelebihan,” ujar Nur.

Secara khusus, Nur juga menyambut baik dan mendukung kegiatan Posyandu Raflesia yang di kelola oleh ibu-ibu warga setempat. Kegiatan sosial tersebut, telah membantu program Pemprov Jabar dalam mengurangi angka kematian balita serta ibu melahirkan.

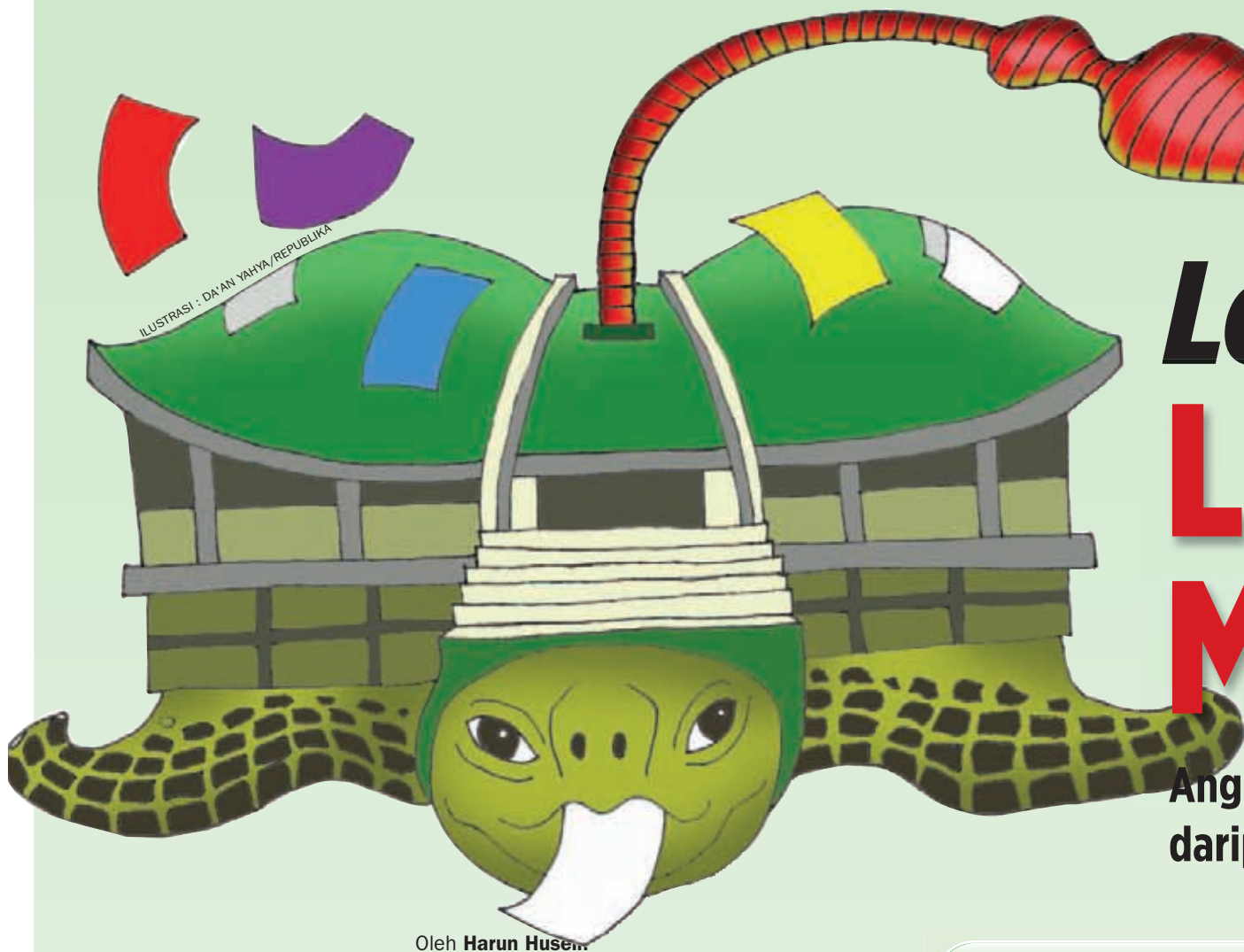
Tidak hanya masalah AKI dan AKB, melalui Posyandu pula, akan terdeteksi keberadaan warga yang terkena kasus gizi buruk. “Data kesehatan yang akurat tentu menjadi domain Posyandu. Bisa jadi, data Posyandu itu dijadikan rujukan oleh pemerintah,” tambahna.

Sementara itu, Ny Dodi, Ketua Posyandu Raflesia menyampaikan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jabar yang telah mengunjungi Posyandunya. Selain itu, pihaknya sangat mengapresiasi DPRD dan Pemprov Jabar dalam mendukung program Posyandu.

Dikatakannya, kegiatan Posyandu biasa dilaksanakan satu minggu sekali. Khusus di RW 03 di Kelurahan Durenjaya, Kota Bekasi, kegiatan Posyandu sedikitnya melibatkan 130 anak balita dan ibu-ibunya.

Dari kegiatan tersebut, Puskesmas setempat yang bertanggung jawab terhadap sektor kesehatan, turut memanfaatkan data dalam mengantisipasi bayi yang mengalami gizi buruk.

● Kik



Oleh **Harun Hussein**

ni era *legislative heavy*. Demikian para politisi di Senayan kerap mengistilahkan kondisi pasca-amandemen konstitusi, yang menggeser bandul kekuasaan dari eksekutif kepada legislatif.

Amandemen telah menggulirkan pembagian kekuasaan (*sharing of power*) secara lebih gamblang dan berimbang antara cabang-cabang kekuasaan, yang antara lain membuat posisi eksekutif dan legislatif menjadi lebih setara.

Bahkan, dalam beberapa hal, bandul kekuasaan condong kepada legislatif, yang diwakili secara memadai oleh ungkapan *legislative heavy* itu. Yang paling tampak adalah bergesernya bandul kekuasaan legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di masa lalu, kekuasaan legislasi berada di tangan pemerintah. Kekuasaan itu tertera di Pasal 5 UUD 1945 —sebelum amandemen— yang berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Adapun DPR, pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, hanya dituliskan dengan rumusan pasif: “Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Karena alas hukum fungsi legislasi

Legislative Heavy, LEGISLASI MASIH BERAT

Anggota DPR lebih suka memarahi menteri daripada membahas RUU.

KINERJA LEGISLASI DPR PERIODE 2009-2014

TAHUN	PROLEGNAS	LUNCURAN	KUMULATIF TERBUKA	TOTAL BEBAN	REALISASI
2010	70 (36 dari DPR, 34 dari pemerintah)	—	7	77	15*
2011	70 (37 dari DPR, 33 dari pemerintah)	21	5**	96***	?

KETERANGAN

* Ke-15 RUU yang berhasil disahkan, delapan RUU dalam daftar Prolegnas 2010, tujuh lainnya RUU Kumulatif terbuka.

** Jumlah RUU kumulatif terbuka rata-rata lima RUU. Yang dimaksud kumulatif terbuka adalah RUU yang tidak masuk dalam daftar Prolegnas, namun selalu dibahas. RUU Kumulatif terbuka adalah RUU terkait APBN, perppu, revisi UU akibat putusan Mahkamah Konstitusi, ratifikasi perjanjian internasional, dan pemekaran wilayah.

*** Beban minimal legislasi 2011. Beban ini bisa bertambah jika RUU kumulatif terbuka lebih dari lima.

15 RUU REALISASI TAHUN 2010

NO	RUU	ASAL RUU	KETERANGAN
1.	Perubahan UU No 22/2002 tentang Grasi	Pemerintah	Prolegnas 2010
2.	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pemerintah	Prolegnas 2010
3.	Gerakan Pramuka	DPR	Prolegnas 2010
4.	Cagar Budaya	DPR	Prolegnas 2010
5.	Hortikultura	DPR	Prolegnas 2010
6.	Protokol	DPR	Prolegnas 2010
7.	Perubahan UU No 2/2008 tentang Partai Politik	DPR	Prolegnas 2010
8.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	DPR	Prolegnas 2010
9.	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	—	Kumulatif terbuka
10.	Perubahan UU No 47/2009 tentang APBN 2010	—	Kumulatif terbuka
11.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2009	—	Kumulatif terbuka
12.	APBN 2011	—	Kumulatif terbuka
13.	Pencabutan Perppu No 4/2009 tentang Perubahan UU No 30/2002 tentang KPK	—	Kumulatif terbuka
14.	Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura	—	Kumulatif terbuka
15.	Pengesahan MoU RI-Brunei tentang Kerjasama Bidang Pertahanan	—	Kumulatif terbuka

DPR hanya demikian, ditambah dominannya penguasa, pada era Orde Baru kita dapat menyaksikan sebuah drama, di mana DPR lebih sering memerankan lakon tukang stempel.

Tapi, itu dulu. Lewat amandemen pertama pada 1999, keadaan telah berbalik 180 derajat. Kekuasaan legislasi telah berpindah ke tangan DPR, seperti termaktub di Pasal 20 ayat (1) UUD 1945: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Posisi DPR di masa lalu, kini telah menjadi posisi pemerintah, seperti tertulis di ayat (2): “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

Bahkan, untuk menjamin berjalannya fungsi kekuasaan legislasi DPR, konstitusi juga memberi garansi. Jika sebuah RUU itu telah disetujui dalam rapat paripurna DPR, tapi diveto diam-diam oleh Presiden, dengan tidak kunjung ditandatangani dan disahkan —atau lazim disebut dengan istilah *pocket veto*—RUU itu tak lantas drop. Sebab, Pasal 20 ayat (5) menegaskan, RUU tersebut otomatis sah menjadi UU, sebulan setelah RUU tersebut disetujui dalam rapat paripurna. Produk DPR tak dapat lagi disandera.

Dengan telah berpindahnya kekuasaan legislasi kepada DPR, dan Presiden —mau tidak mau, suka atau tidak suka— harus melaksanakan produk itu, maka sejumlah pakar hukum tata negara pun menilai, DPR sejatinya telah menjadi pabrik undang-undang.

Tapi, senyum sumringah para politisi tentang *legislative heavy*, belumlah kunjung membumi. Penyerahan kekuasaan legislasi itu, masih banyak bicara di atas kertas. Sebab, sampai saat ini, pemerintah masih mendominasi proses pembuatan undang-undang. Fakta itu setidaknya tercermin pada angka-angka dalam program legislasi nasional (prolegnas), yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang.

Dalam Prolegnas 2010-2014, misalnya, dari 247 RUU yang masuk daftar, sebanyak 164 atau 66,4 persen merupakan usulan pemerintah. Sementara, RUU usul inisiatif DPR hanya 83 atau 33,6 persen. Pemerintah mengambil jatah dua pertiga, sementara DPR hanya sepertiga! Dengan kenyataan seperti ini, patut dipertanyakan, lembaga manakah yang sebenarnya merupakan pabrik undang-undang? Benarkah kekuasaan legislasi telah berpindah tangan?

Ditelisik dari data prolegnas tahunan, terutama untuk Prolegnas 2010 dan 2011,

komposisinya memang masih relatif berimbang, dengan DPR sedikit lebih unggul. Pada Prolegnas 2010, dari 70 RUU yang terdaftar, 36 dari DPR, dan 34 dari pemerintah. Sedangkan, pada Prolegnas 2011, dari 70 RUU yang terdaftar, sebanyak 37 dari DPR, dan 33 dari pemerintah. Tapi, jika mengacu pada data Prolegnas 2009-2014, bisa jadi pada tahun-tahun berikutnya, jumlah RUU dari pemerintah akan lebih banyak, dan RUU dari DPR akan semakin berkurang.

Tapi, apakah prolegnas tahunan dan lima tahunan bisa dijadikan parameter? Bisa jadi ada yang akan menggugatnya dan beranggapan bahwa penggunaan data target prolegnas untuk menganalisis kinerja legislasi DPR —apalagi membandingkannya dengan pemerintah— adalah sumir. Sebab, RUU yang didaftarkan di Prolegnas biasanya adalah RUU yang belum berwujud. Sebagian besar yang didaftarkan masih berupa judul, dan belum lagi menjadi draf RUU plus naskah akademik. Belum masuk pembahasan, apatah lagi telah menjadi undang-undang.

Adu argumen soal penggunaan data prolegnas itu, bisa jadi akan panjang. Maka, agar tak berlanjut menjadi debat kusir, ada baiknya menengok kembali fakta-fakta yang telah distatiskan oleh waktu. Dari 193 RUU yang selesai dibahas dan menjadi UU oleh DPR periode 2004-2009, sebanyak 97 merupakan usulan pemerintah. Dan, hanya 96 RUU usul inisiatif DPR yang berhasil menjadi UU. Selisihnya memang hanya satu, tapi fakta ini memperlihatkan ‘kekuasaan legislasi’ pemerintah —yang sejatinya tak memegang fungsi legislasi, karena merupakan lembaga eksekutif— masih besar.

Bagaimana dengan Prolegnas 2010 lalu? Ada 15 RUU yang berhasil digolkan menjadi UU. Delapan di antaranya, terdaftar dalam Prolegnas, sementara tujuh lainnya adalah RUU “kumulatif terbuka”. Dari kedelapan RUU Prolegnas itu, enam berasal dari DPR, dan dua dari pemerintah. DPR terlihat mencatatkan kemajuan signifikan dibanding pemerintah, karena perbandingannya menjadi 3:1. Namun, DPR tentu tidak mungkin berbangga dengan angka ini. Sebab, angka absolutnya teramat jauh dari target 70 RUU Prolegnas 2010, atau DPR dan pemerintah tak menyelesaikan pembahasan 62 RUU prolegnas!

Dari 62 RUU yang tak selesai dibahas itu, sebanyak 21 RUU diluncurkan pembahasannya pada tahun 2011 ini, sedangkan 41 RUU benar-benar tak dibahas. Angka yang sebenarnya cukup

fantastis, karena 41 RUU itu sama dengan 58,57 persen. Dan, di luar 21 RUU luncuran dan kumulatif terbuka, DPR kembali mendaftarkan 70 RUU pada Prolegnas 2011. Entah berapa yang sanggup mereka selesaikan.

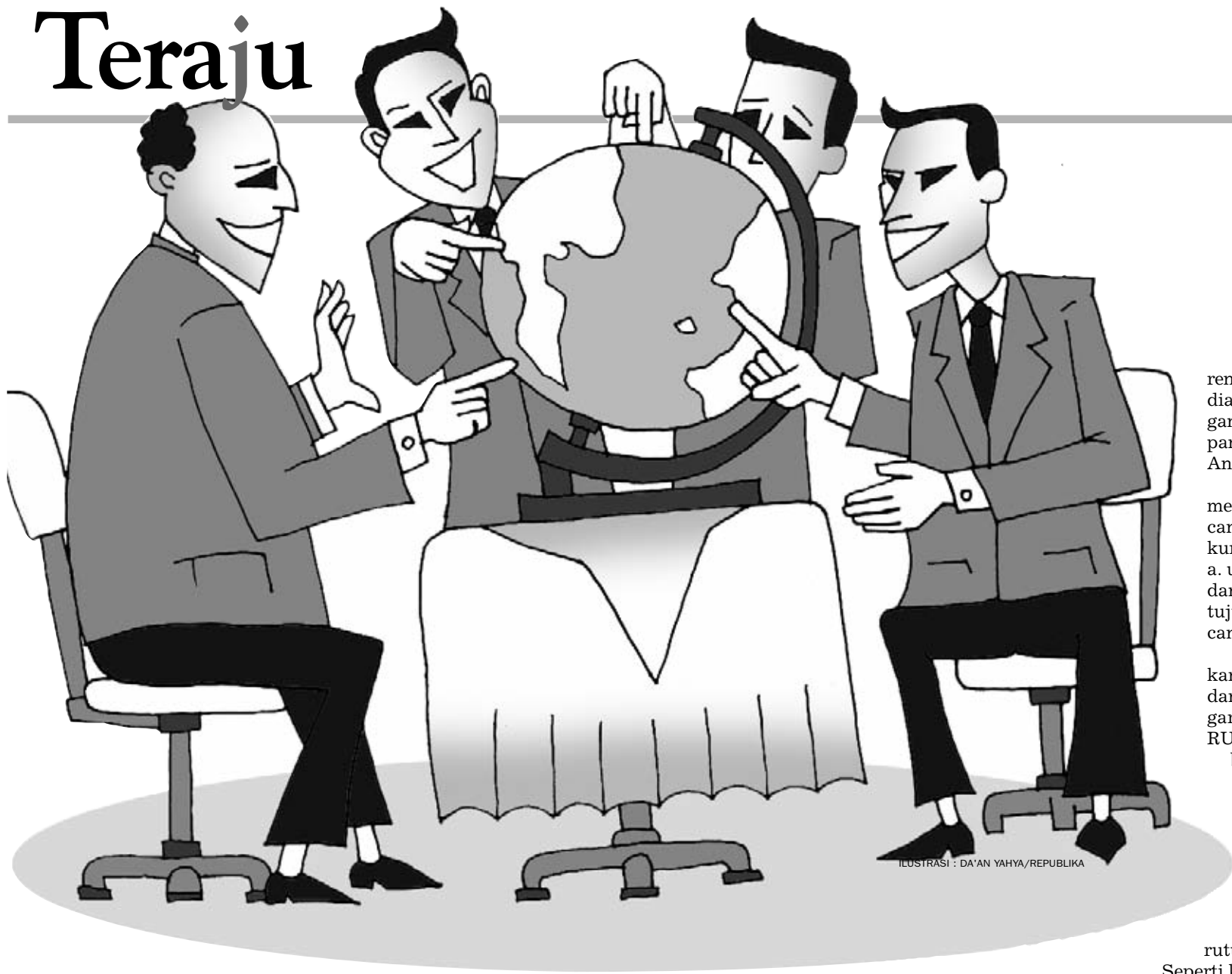
Tapi, apa sebenarnya penyebab kinerja legislasi DPR begitu memprihatinkan? Salah satu yang kerap jadi tudingan, adalah *legislative heavy* yang berjalan tidak seimbang. Dari tiga fungsi DPR —yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran— hanya fungsi pengawasan yang memperlihatkan superioritasnya kepada eksekutif, yang dalam beberapa hal bahkan terkesan overdosis. “Sebanyak 80 persen waktu dan energi DPR saat ini tersedot untuk menjalankan fungsi pengawasan,” kata Ketua Badan Legislasi DPR, Ignatius Mulyono.

Butuh sebuah terobosan untuk mengefektifkan kinerja legislasi DPR. Ide-ide progresif tersebut bukan tak digulirkan. Antara lain mencuat lewat gagasan Hari Legislasi, di mana pada Rabu siang hingga Kamis setiap pekan, anggota DPR duduk bertekun membahas RUU. Atau mengurangi masa reses anggota DPR. Namun, tampaknya anggota DPR enggan keluar dari zona nyaman. “Anggota DPR lebih senang memarahi menteri daripada membahas RUU,” kata Ignatius.

Bahwa DPR sulit menyerap ide-ide progresif untuk mereformasi dirinya secara internal, antara lain diungkapkan oleh Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri. “Mereka (anggota DPR –Red) masih sulit diajak berpikir *out of the box*,” katanya.

Sialnya, kinerja legislasi yang payah itu, masih pula dibumbui cerita-cerita tak sedap tentang studi banding. Saban tahun anggota DPR melancong ke luar negeri dengan alasan mencari input, agar produk legislasi lebih berkualitas. Minimal ada dua negara yang ‘dijatahkan’ untuk dikunjungi oleh panitia kerja (panja) sebuah komisi atau panitia khusus (pansus) lintas komisi, saat mereka membuat sebuah RUU. Anehnya, studi banding itu terkadang dilakukan setelah sebuah RUU hampir rampung. Apa yang didapat di luar negeri pun tak pernah dijelaskan terbuka: masuk di pasal dan ayat mana hasil studi banding itu. Akuntabilitasnya rendah.

Jadi, selain melakukan terobosan untuk menggenjot kinerja legislasi, DPR perlu mereformasi studi bandingnya yang selalu hanya menghasilkan cerita *notorius*. ■



Urgensi, efektivitas, dan akuntabilitas studi banding masih merupakan misteri.

Oleh **Harun Husein**

Studi banding seolah sudah menjadi ritual bagi anggota DPR yang sedang membahas sebuah rancangan undang-undang (RUU). Dan, seolah sudah menjadi ritual pula, setiap kali anggota DPR berencana

melancong, setiap kali itu pula protes berhamburan dari delapan penjurur angin. Tapi, di tengah protes massif dan sinis, nyatanya para legislator selalu tetap berangkat. Toh, kepergian mereka telah direstui Peraturan DPR No 1/2009 tentang Tata Tertib DPR. Pasal 143 ayat (3) Peraturan itu menyatakan, “Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR.” Sebenarnya, ketentuan itu belum berhenti. Pasal 143 Ayat (4) menyatakan, “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangan alasan yang dimuat dalam usulan

rencana kunjungan kerja yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran.” Selanjutnya, Ayat (5) menegaskan, “Usulan rencana kunjungan kerja...sekurang-kurangnya memuat: a. urgensi; b. kemanfaatan; dan c. keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangan undang-undang. Tapi, siapa yang menentukan urgensi, kemanfaatan, dan keterkaitan dengan negara tujuan dengan materi RUU, tidak jelas. Semua bergantung selera pimpinan DPR. Kalau pimpinan DPR memberi lampu hijau, maka beterbanganlah mereka ke berbagai penjuru dunia, diiringi kritik dan rutukan dari dalam negeri. Seperti ketika anggota Komisi X DPR studi banding tentang pramuka ke Afrika Selatan. Banyak yang mengkritik Afrika Selatan bukanlah negara yang sukses berpramuka. Tapi, begitulah. Anjing menggonggong, kafilah tetap melancong.

Berkebalikan dengan sepinya ruang pembahasan RUU, dan seretnya kinerja legislasi DPR, studi banding atas nama pembahasan RUU, dilakoni dengan antusias-me tingkat tinggi. Tengok saja betapa gajalnya studi banding pertama yang dilakukan anggota DPR periode 2009-2014 ini. Bayangkan, anggota DPR periode 2009-2014 baru dilantik pada awal Oktober 2009. Tapi, pada 26 Oktober 2009, salah satu komisi, yaitu Komisi VIII, sudah studi banding RUU Kesejahteraan Sosial ke Cina. Padahal, saat itu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 belum lagi

disusun. Menurut catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), RUU ini baru terdaftar di Prolegnas pada 1 Desember 2009. Mirip studi banding bodong! Keganjilan lainnya terlihat pada studi banding Agustus-September 2010 lalu, saat Komisi IV dan Komisi X studi banding RUU Pramuka dan RUU Hortikultura. Pasalnya, studi banding dilakukan setelah daftar inventarisasi masalah (DIM) kedua RUU tersebut telah selesai disusun. Lalu, apa lagi yang hendak dicari-cari jika DIM telah selesai? Anggota DPR yang membahas RUU Pramuka dan RUU Hortikultura itu mengunjungi lima negara dalam waktu tiga pekan. Dan, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dana yang dihabiskan mencapai Rp 3,7 miliar.

Urgensi Sebenarnya, bukan soal studi bandingnya yang benar-benar menjadi masalah. Tapi urgen-tidaknya, bermanfaat-tidaknya, dan relevan-tidaknya studi banding itu, seperti yang dimintakan oleh Pasal 143 ayat (4) Tata Tertib DPR. Sebab, jika studi banding adalah *input*, tentu *output*-nya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, akuntabilitas inilah yang absen. Apa hasil studi banding, tak pernah jelas. Masuk di naskah akademik mana, pasal mana, dan ayat mana hasil studi banding, *wallahu a'lam*. Habis studi banding, habis perkara.

Alhasil, kendati para legislator sudah mengunjungi sejumlah negara maju di Eropa, Amerika, dan Asia, tak terdengar ada terobosan mengesankan dalam produk legislasi. Tampaknya, benarlah pernyataan Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, pada diskusi “Polemik Studi Banding, Belajar atau Jalan-jalan”, Oktober lalu. Dia mengatakan, studi banding memang sulit dicari urgensi, efektivitas, dan akuntabilitasnya, karena tujuannya memang bukan itu. Studi banding adalah arena “bagi-bagi

jatah” plesiran. Setiap komisi, panja, dan pansus yang membahas RUU punya jatah di sana, yaitu berangkat dua kali setiap membahas sebuah RUU.

Teknologi Apakah studi banding meningkatkan kualitas sebuah RUU? Belum ada ukuran jelas soal itu. Tapi, bahwa studi banding bisa memperlambat pembahasan sebuah RUU, sudah ada buktinya. Ini antara lain menimpa RUU Keimigrasian. Diadakan 2010, RUU ini belum kunjung rampung, kendati sudah melewati dua masa sidang (satu masa sidang enam bulan—Red), yang merupakan jatah waktu pembahasan sebuah RUU sesuai tata tertib DPR. RUU Keimigrasian termasuk satu dari 21 RUU yang diluncurkan pembahasannya ke 2011. Tenggat pembahasan RUU ini adalah 8 April 2011. Jika tak selesai, Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan PSHK, Ronald Roflandri, mengatakan, “RUU ini akan memasuki masa sidang ketiga. Menjadi presiden baru.” Untuk menyelesaikan RUU Keimigrasian ini, Komisi III DPR melakukan studi banding ke Inggris dan Prancis. “Studi banding seharusnya dilakukan pada penyajian bahan awal. Tapi, anehnya justru dilakukan di akhir pembahasan,” kritik Ronald. Di negeri yang jauh itu, para legislator mencari data tentang materi “izin tinggal tetap”. Untuk ke Inggris, misalnya, Komisi III menghabiskan Rp 1,7 miliar. Padahal, menurut PSHK, materi itu bisa didapatkan dengan harga supermurah, yaitu Rp 17 ribu, atau 1/100 ribu dari dana yang dikeluarkan DPR. Caranya dengan mencari di internet. Dengan Rp 17 ribu, PSHK bahkan berhasil mendapatkan perbandingan izin tinggal tetap (*demizenship*) di 15 negara Eropa, hasil penelitian Prof Kees Groenendijk dari Universitas Nijmegen, Belanda.

“Seharusnya DPR memprioritaskan

metode studi banding dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti internet, *videoconference* dengan ahli di negara terkait, mengundang para ahli berbicara di DPR, memaksimalkan perpustakaan dan jaringan database, atau menggunakan jalur diplomatik. Studi banding harus jadi alternatif terakhir,” demikian pernyataan pers PSHK. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, mengancam metode studi banding DPR dengan istilah “primitif”. Rombongan yang berangkat gemuk, uang yang dikeluarkan miliaran, tapi target dan hasilnya tak jelas. Karena muak dengan studi banding, pada 11 Oktober lalu, sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra DPR, menyurati delapan kedutaan besar negara tujuan studi banding. Mereka berharap negara-negara itu—yaitu Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Korea selatan, India, Swiss, dan Cina—menolak visa yang diajukan anggota DPR.

Tidak transparan

Studi banding DPR kerap tak teragenda dengan jelas dalam rapat Badan Musyawarah—yang merupakan dapur penyusun jadwal kegiatan DPR. Dan, samsalabim, anggota DPR telah berada di luar negeri. Dalam beberapa kasus, studi banding terendus pers saat mereka telah di luar negeri, dibocorkan anggota DPR yang tak berangkat. Sialnya, tak mudah mendapatkan data studi banding anggota DPR, apalagi laporan hasilnya, serta besar anggarannya. Semuanya terkesan tertutup, bak rahasia negara. Data kunjungan ke luar negeri yang didapat *Republika*, misalnya, harus didapatkan dengan mengais dari sana-sini. PSHK pernah mendapati sebagian data dipublikasikan di situs *dpr.go.id*. Tak lama setelah diunggah, data tersebut raib dari laman wakil rakyat itu. Fitra mencatat, dalam tiga tahun terakhir, anggaran kunjungan kerja ke luar negeri terus meningkat. Pada 2008,

Rp 71,2 miliar. Tahun 2009 menjadi Rp 78,6 miliar, dan pada tahun 2010 melonjak menjadi Rp 170 miliar. Anggaran studi banding dalam membahas satu RUU, diperkirakan Rp1,7 miliar. November lalu, Indonesia Corruption Watch menyurati Setjen DPR. Dalam surat No 376/SK/BP/ICW/XI/2010 tertanggal 23 November 2010 itu, ICW meminta Setjen DPR memberikan data studi banding dan akuntabilitasnya, karena merupakan informasi publik. Tak dijawab, akhir Desember, ICW mengancam menyeketkan informasi kunjungan kerja anggota DPR ke sejumlah negara kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Karena akuntabilitas studi banding tak kunjung jelas, bahkan diduga memboroskan uang negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mulai melirik studi banding ini. “Perlu ditelusuri apakah anggaran yang sudah dikeluarkan sesuai dengan hasil yang diperoleh,” kata penasihat KPK,

Abdullah Hehamahua, pada diskusi bertajuk “Membatasi Plesiran DPR” di kantor ICW akhir September lalu. Soal studi banding DPR itu masih dikaji oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK. Litbang ini memang bertugas mengkaji sistem yang dilakukan oleh lembaga negara, apakah sistem dan kebijakan itu berpotensi korupsi atau tidak. Jika merekomendasikan sistem dan kebijakan itu dihapus dan tidak dijalankan lagi di masa mendatang. DPR memang tak mungkin lagi mempertanyakan metode studi banding selama ini. Pimpinan DPR tak cukup beralih bahwa dana studi banding anggota DPR jauh lebih kecil dibanding dana kunjungan kerja pemerintah ke luar negeri, yang besarnya bisa mencapai Rp 17,9 triliun. DPR harus memutus lingkaran setan studi banding itu, atau DPR akan tetap disindir sebagai Dewan Peleisiran Rakyat. ■

Moratorium, Lalu Reformasi

Kecaman terhadap studi banding anggota DPR di paruh ketiga tahun 2010, boleh jadi merupakan yang paling berpengaruh. Para pelaku studi banding langsung tiarap dan membatalkan agenda studi banding. Studi banding yang batal itu antara lain Komisi VII yang membahas RUU Geospasial, yang sedianya terbang ke Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris; Komisi XI yang membahas RUU Mata Uang dan RUU Akutansi Publik yang telah menjadwalkan kunjungan ke Jepang, Swiss, Kanada, dan AS (lihat grafis).

Studi banding sekitar September hingga November lalu, memang terlalu kontras

dengan bencana yang melanda sejumlah daerah. Mulai banjir bandang di Wasiro, tsunami di Mentawai, hingga erupsi Merapi. Betapa tidak, ribuan orang tewas, sementara warganya justru melancong. Dalam hal studi banding di tengah bencana ini, Fraksi PAN yang paling tegas menolak. Dalam rapat paripurna DPR, 26 Oktober lalu, FPAN menyampaikan surat usulan penghentian sementara (moratorium) studi banding, setidaknya satu semester. Sikap ini kemudian diikuti sejumlah fraksi. Meski demikian, ada yang tetap nekad berangkat studi banding. Antara lain Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan yang

terbang ke Jepang dan Korea Selatan, akhir Oktober lalu. Seturut garis partainya, anggota Pansus dari Fraksi PAN, Ismet Ahmad, menolak berangkat kendati kena denda 3.500 dolar AS. Yang menarik menjadi catatan, moratorium yang diusung FPAN bukan semata karena alasan solidaritas kepada anak bangsa yang terkena bencana. Lebih dari itu, FPAN menilai studi banding perlu dievaluasi, bahkan didesain ulang agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Desakan untuk mendesain ulang studi banding anggota DPR itu, sejak lama pula disuarakan berbagai kalangan di dalam DPR, terlebih di luar DPR. Mereka antara

lain meminta rencana studi banding, target, dan hasilnya—dalam bentuk laporan tertulis—, harus diketahui publik, tidak main petak umpet. Anggota DPR juga diminta tak aji mumpung, sebab tak semua RUU memerlukan studi banding. Wakil Ketua DPR, Anis Matta, misalnya, mengusulkan pembenahan studi banding dengan istilah “reformasi total”. Salah satu usulannya adalah dengan membangun infrastruktur legislasi berupa *law center*, yang menyuplai bahan dan data hasil riset kepada anggota DPR yang membahas RUU. “Kalau tidak ada *law center*, bisa bergantung pada studi banding,” katanya. ■ harun husein

DAFTAR STUDI BANDING ANGGOTA DPR

Setiap tahun, sejumlah alat kelengkapan DPR melakukan studi banding ke luar negeri. Berikut sebagian data studi banding anggota DPR —yang tergabung dalam panitia kerja komisi, panitia khusus lintas komisi, maupun badan legislasi DPR— terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang (RUU).

TAHUN 2011

NEGARA TUJUAN	WAKTU	ALAT KELENGKAPAN	STUDI BANDING
....	Komisi VI	RUU Perubahan UU No 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

TAHUN 2010

NEGARA TUJUAN	WAKTU	ALAT KELENGKAPAN	STUDI BANDING
Selandia Baru	12-18 Juli	Komisi III	RUU Perubahan atas UU Grasi
Belanda	13-20 Juli	Komisi III	RUU Perubahan atas UU Grasi
Prancis	7-13 Juni	Pansus	RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Australia	7-13 Juni	Pansus	RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Prancis	11-17 Juli	Pansus	RUU Protokol
Austria	28 Juli-1 Agustus	Komisi V	RUU Perumahan
Turki dan Belanda	30 Juli-4 Agustus	Komisi X	RUU Cagar Budaya
Belanda	14-19 September	Komisi IV	RUU Hortikultura
Selandia Baru	17-23 Agustus	Komisi IV	RUU Hortikultura
Afrika Selatan	September	Komisi X	RUU Pramuka
Jepang	September	Komisi X	RUU Pramuka
Korea Selatan	September	Komisi X	RUU Pramuka
Inggris	September	Komisi III	RUU Keimigrasian
Kanada	Oktober	Komisi III	RUU Keimigrasian
Inggris	Oktober	Pansus	RUU Otoritas Jasa Keuangan
Jerman	Oktober	Pansus	RUU Otoritas Jasa Keuangan
Jepang	Oktober	Pansus	RUU Otoritas Jasa Keuangan
Korea Selatan	Oktober	Pansus	RUU Otoritas Jasa Keuangan
Rusia	November	Komisi V	RUU Rumah Susun
Italia	26 Okt-November	Komisi V	RUU Rumah Susun
Belanda*	8-14 November	Baleg	RUU Bantuan Hukum
India*	8-14 November	Komisi II	RUU Kependudukan
Cina*	1-6 November	Komisi II	RUU Kependudukan
Swiss dan Jepang*	akhir 2010	Komisi XI	RUU Transfer Dana
Amerika Serikat*	akhir 2010	Komisi XI	RUU Akuntan Publik
Swiss dan Kanada*	akhir 2010	Komisi XI	RUU Mata Uang
Inggris*	akhir 2010	Komisi VI	RUU perubahan UU No 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Hongkong*	akhir 2010	Komisi VI	RUU Sistem Resi Gudang
AS, Jerman, Inggris*	akhir 2010	Komisi VII	RUU Geospasial



TAHUN 2009

NEGARA TUJUAN	WAKTU	ALAT KELENGKAPAN	STUDI BANDING
Amerika Serikat	24-30 Januari	Pansus	RUU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Jerman	26-31 Januari	Pansus	RUU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Cina	26 Okt-2 Nov	Komisi VIII	RUU Kesejahteraan Sosial
Rumania	25-31 Mei	Komisi IV	RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Cina	25-27 Mei	Komisi IV	RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Brasil	6-12 Juni	Komisi IV	RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Amerika Serikat	25-30 April	Komisi XI	RUU pengganti Perppu No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Swiss	19-25 April	Komisi XI	RUU pengganti Perpu No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Inggris	10-15 Mei	Komisi VIII	RUU tentang Jaminan Produk Halal
Uni Emirat Arab	15-21 Mei	Komisi VIII	RUU tentang Jaminan Produk Halal
Rusia	Mei	Komisi III	RUU Tindak Pidana Pencucian Uang
Swiss	6-12 Juni	Komisi III	RUU Tindak Pidana Pencucian Uang
Namibia	14-20 Juni	Komisi IX	RUU Ketransmigrasian
Brasil	21-27 Juni	Komisi IX	RUU Ketransmigrasian
Korea Selatan	13-18 Juni	Komisi X	RUU Perfilman
Afrika Selatan	13-19 Juni	Komisi X	RUU Perfilman
Prancis	23-29 Juni	Pansus	RUU Pembangunan Pedesaan
Aljazair	25-28 Juni	Pansus	RUU Pembangunan Pedesaan

Filipina	26 Juni-2 Juli	Komisi X	RUU Kepemudaan
Belanda	26 Juni-2 Juli	Komisi X	RUU Kepemudaan
Belgia	15-21 Juni	Pansus	Empat RUU bidang peradilan
Mesir	21-27 Juli	Pansus	Empat RUU bidang Peradilan
Spanyol	Agustus	Pansus	RUU Keistimewaan DIY
Maroko	7-13 Agustus	Pansus	RUU Keistimewaan DIY
Turki	6-12 Agustus	Komisi V	RUU Meteorologi dan Geofisika
Italia	3-10 Agustus	Komisi V	RUU Meteorologi dan Geofisika
Thailand	18-24 Agustus	Komisi II	RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru
Polandia	26 Juni-2 Juli	Pansus	RUU Kawasan Ekonomi Khusus
Cina	8-12 September	Pansus	RUU Kawasan Ekonomi Khusus
Lebanon	3-5 September	Baleg	Studi Banding Baleg
Mesir	20-26 Agustus	Pansus	RUU Komisi Yudisial
Cina	26 Okt-2 Nov	Komisi VIII	RUU Kesejahteraan Sosial

TAHUN 2008

NEGARA TUJUAN	WAKTU	ALAT KELENGKAPAN	STUDI BANDING
Kanada	21-28 April	Pansus	RUU Ketenagalistrikan
Amerika Serikat	20-26 April	Komisi VII	RUU Ketenagalistrikan
Argentina	13-19 Mei	Pansus	RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Rusia	1-6 Juli	Pansus	RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Lebanon	25-30 Agustus	Komisi III	RUU Lambang Palang Merah
Swiss	3-6 Agustus	Komisi III	RUU Lambang Palang Merah
Afrika Selatan	8-14 Desember	Komisi II	RUU Pembentukan Daerah Otonom dan Grand Design Penataan Daerah
Cina	1-7 Desember	Komisi II	RUU Pembentukan Daerah Otonom dan Grand Design penataan Daerah

TAHUN 2007

NEGARA TUJUAN	WAKTU	ALAT KELENGKAPAN	STUDI BANDING
Yunani	26-31 Maret	Komisi I	RUU tentang Ombudsman
Swedia	19-25 Maret	Komisi I	RUU tentang Ombudsman
Thailand	20-24 Maret	Komisi VI	RUU Perubahan atas UU No 11/1995 tentang Cukai
Spanyol	23-29 April	Baleg	Studi Banding
Amerika Serikat	7-13 April	Pansus	Tiga RUU Perubahan UU Bidang Perpajakan
Rusia	7-13 April	Pansus	Tiga RUU Perubahan atas UU Bidang Perpajakan
Maladewa	12-18 Maret	Komisi IV	RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Filipina	12-15 Maret	Komisi IV	RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Kanada	21-27 Mei	Komisi IV	RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Korea Selatan	31 Maret-6 April	Pansus	RUU Perubahan atas UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer

Spanyol	15-21 April	Pansus	RUU Perubahan atas UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer
Prancis	23-27 Juni	Komisi I	RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Inggris	20-26 Mei	Komisi I	RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Jepang	16-20 April	Komisi I	RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Mesir	24-28 Juni	Komisi IX	RUU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Austria	19-25 Agustus	Pansus	RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Maroko dan Kuba	27 Ags-2 Sept	Komisi IX	RUU Kesehatan
Brasil	29 Okt-4 Nov	Pansus	RUU Pertambangan, Mineral, dan Batubara
Uni Emirat Arab	24-30 November	Komisi II	RUU Pelayanan Publik dan Massal Dalam Negeri serta Otonomi Daerah
Meksiko	6-12 Desember	Komisi VI	RUU UMKM
Korea Selatan	5-11 Desember	Komisi VI	RUU UMKM
Portugal	12-18 Desember	Komisi II	RUU Pelayanan Publik dan Massal Dalam Negeri serta Otonomi Daerah
Yunani	12-18 Desember	Komisi II	RUU Pelayanan Publik dan Massal Dalam Negeri serta Otonomi Daerah

TAHUN 2006

NEGARA TUJUAN	WAKTU	ALAT KELENGKAPAN	STUDI BANDING
Jepang	12-18 Desember	Pansus	Empat RUU bidang Transportasi
Korea Selatan	12-18 Desember	Pansus	Empat RUU bidang Transportasi
Prancis	7-13 November	Pansus	Empat RUU bidang Transportasi
Jerman	6-11 November	Pansus	Empat RUU bidang Transportasi
Belanda	4-10 November	Komisi V	Kunker menjadi masukan RUU bidang Transportasi
Cina	27 Nov-3 Des	Pansus	RUU Penataan Ruang
Autralia	4-9 Desember	Pansus	RUU Penataan Ruang

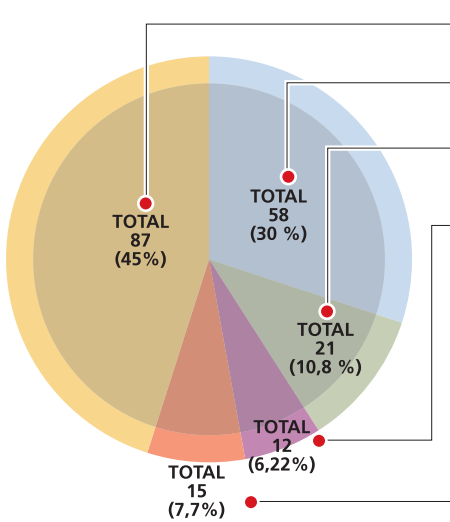
CATATAN:

- Data ini belum termasuk kunjungan alat kelengkapan DPR lain yang tak berkaitan dengan pembahasan RUU. Alat kelengkapan DPR seperti komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Urusan Rumah Tangga, juga kerap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, terkait dengan agenda nonlegislasi. Daftarinya tak dimasukkan di sini, karena akan menjadi terlalu panjang.
- Data ini belum keseluruhan studi banding terkait RUU, melainkan hanya yang dapat tercatat.

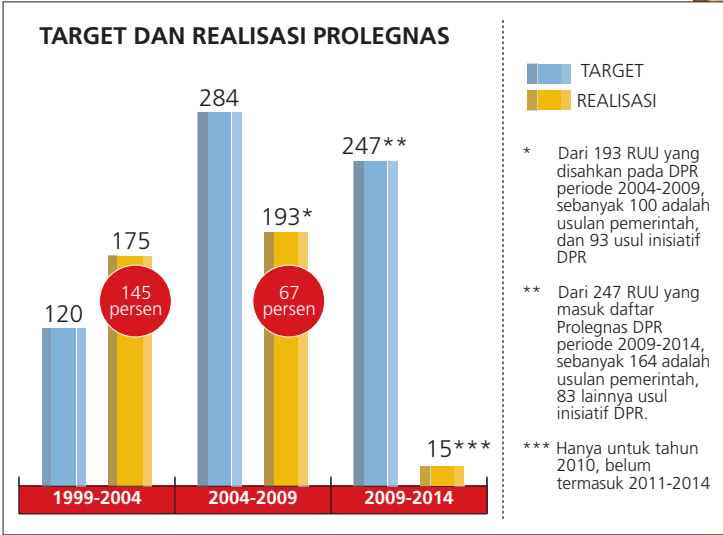
* Studi banding ditunda karena terjadinya bencana Merapi, Mentawai, dan Wasiro. Tapi, meski terjadi bencana, ada studi banding yang tetap berangkat, antara lain studi banding Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan ke empat negara.

MOMENTUM MEMBENAH DPR

CAPAIAN PROLEGNAS 2005-2009
(Berdasarkan Klasifikasi UU)



Klasifikasi	2005	2006	2007	2008	2009
Prolegnas murni	7	11	16	25	28
Pemekaran	0	16	15	27	0
Ratifikasi perjanjian internasional	2	7	5	3	4
Perppu	3	1	1	3	4
APBN	2	4	3	3	3



DPR idealnya memiliki empat *supporting office*.

Oleh Harun Husein

Tahun 2011 ini adalah tahun kesempatan untuk membenahi DPR. Ada dua rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas tahun ini, yang bisa menjadi *entry point*. Kedua RUU tersebut mengatur fungsi dan kelembagaan DPR. Pertama, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, RUU tentang Perubahan atas UU No 27/2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Lewat kedua RUU ini, dua hal yang paling banyak dikritik tentang DPR, yaitu rendahnya kinerja legislasi dan masalah studi banding ke luar negeri, bisa dibuat lebih baik. Sesuatu yang tentu saja akan berdampak pada perbaikan citra lembaga pemangku aspirasi rakyat tersebut.

Untuk mengefektifkan fungsi legislasi, RUU MD3 telah memasukkan hari legislasi. Dan, ada pula dorongan untuk menerapkan formula lain yaitu dengan memekarkan jumlah komisi yang saat ini 11 menjadi 17. Atau, mendesain struktur alat kelengkapan DPR mengikuti fungsi DPR. Ada tiga fungsi DPR, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sehingga, di masa depan, 560 anggota DPR dibagi ke dalam Badan Pengawasan, Badan Legislasi, dan Badan Anggaran. Tidak tumpang tindih seperti saat ini (Lihat: *DPR Perlu Dibagi Menjadi Tiga Badan*). Adapun untuk studi banding, bisa diperjelas di RUU MD3. Selama ini, studi banding hanya diatur dalam tata tertib. Sedangkan, UU MD3 hanya menyatakan anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja. Padahal, soal studi banding ini, banyak merugikan citra DPR. Gagasan lain yang menarik dicermati, pernah dilontarkan Wakil Ketua DPR, Anis Matta, dalam

wawancara dengan *Republika*, medio 2010. Untuk menggenjot kinerja legislasi dan anggaran yang tertinggal dari fungsi pengawasan, dia menawarkan pembentukan *Law Center* dan *Budgeting Center*. *Law Center* ini menjadi infrastruktur legislasi di DPR, yang menyuplai data dan bahan hasil riset, untuk pembahasan RUU. Selain membuat produk legislasi berbasis riset sehingga lebih berkualitas, gagasan ini juga bisa mengurangi studi banding anggota DPR, yang kerap berdalih mencari bahan untuk pembuatan sebuah RUU. Adapun *Budgeting Center*, menjadi pusat pengkajian anggaran di DPR. “Bukan mengurus anggaran DPR tapi untuk pembahasan APBN dan lain-lain, memperluas fungsi badan anggaran.” Selain *Law Center* dan *Budgeting Center*, Anis mengatakan idealnya DPR masih perlu dua *supporting office*. Yaitu Sekretariat Jenderal yang mengurus semua masalah administrasi dan perpustakaan. ■



TAHTA AIDILA

KENAIKAN JUMLAH ANGGOTA DPR

1999-2004	500
2004-2009	550
2009-2014	560

ANGGARAN LEGISLASI

TAHUN/PERIODE	BIAYA MEMBAHAS SATU RUU
1999-2004	Rp 300 juta
2005-Juni 2007	Rp 560 juta
Juni 2007-2008	Rp 1,5 miliar
2008-2009	Rp 3 miliar
2010-Sekarang	Rp 5,8 miliar

KINERJA LEGISLASI DPR PERIODE 2004-2009

TAHUN	PROLEGNAS	LUNCURAN	TOTAL BEBAN	TAK TERBAHAS	REALISASI
2005	55	--	55	41	14
2006	43	33	76	27	39
2007	30	48	78	38	40
2008	31	50	81	20	61
2009	37	39	76	37	39

DPR Perlu Dibagi Menjadi Tiga Badan

DPR memiliki tiga fungsi, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tapi, dari ketiga fungsi itu, hanya pengawasan yang *powerful*, bahkan kerap overdosis. Adapun fungsi legislasi, masih keteteran. Target dan realisasi pembahasan RUU yang masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas), selalu jauh panggang dari api. Seperti pada Prolegnas 2010, dari 70 RUU yang terdaftar, hanya delapan RUU prolegnas yang berhasil diselesaikan. Ketua Badan Legislasi DPR, Ignatius Mulyono, menuding penyebab semua itu adalah tidak seimbangny pelaksanaan ketiga fungsi DPR. Dia menyebut 80 persen waktu dan energi anggota DPR dihabiskan untuk menjalankan fungsi pengawasan, dan hanya 20 persen untuk menjalankan fungsi legislasi dan anggaran. Salah satu solusi paling ampuh adalah membagi DPR menjadi tiga badan sesuai fungsinya, alias struktur alat kelengkapan mengikuti fungsi.

Apa dan bagaimana gagasan itu? Berikut petikan wawancara wartawan *Republika*, Harun Husein, dengan Ignatius Mulyono:

Target dan realisasi prolegnas sangat jauh. Apa sebabnya?
Itu karena konsentrasi pembahasan RUU oleh anggota dan komisi rendah. Karena waktu yang tersedia berebut dengan kebutuhan pengawasan. Dari Senin sampai Kamis, pengawasan terus. Panggil menteri, dan lain-lain. Akhirnya nggak bisa membahas RUU.
Dari waktu yang tersedia, 80 persen termakan di pengawasan, dan hanya 20 persen untuk legislasi dan anggaran. Padahal, kita punya tugas besar untuk membuat UU. Karena itu kita sudah minta waktu, hari Rabu siang dan Kamis, menjadi hari legislasi. Jadi seluruh kelengkapan DPR harus membahas UU.
Apakah karena anggota DPR melaksanakan fungsi secara simultan?
Ya. Karena simultan dan anggota merangkap ke mana-mana, jadi nggak fokus. Dicari di komisi, katanya di Baleg. Dicari di Baleg, katanya di Badan Anggaran. Tapi,

dicari di Anggaran tidak ada. *Tau-tau* di Hotel Mulia. Ini fakta mas.
Dengan 11 komisi saat ini, beban kerja berat. Karena, setiap komisi rata-rata pasangan kerjanya 9-13 instansi pemerintah. Untuk mengawasi ini, butuh waktu. Diberi Senin sampai Kamis tidak cukup. Padahal, hari Rabu siang sampai Kamis, itu adalah hari legislasi.
Anggota itu, daripada disuruh rapat membahas RUU, lebih senang memarahi menteri. Kalau Rabu siang aturan hari legislasi, dia bilang ‘saya ada rapat komisi dengan Menteri Hukum dan HAM’. Jadi, hari legislasi terpakai. Kalau di komisi kan seenaknya saja. Mau tanya, mau marah.
Ide hari legislasi ini dari siapa?
Dari Baleg, tapi diresmikan pimpinan DPR sekitar Juni 2010. Saya kan teriak-teriak kepada pimpinan DPR “Kami ini nggak ada anggota lho, Pak”.
“Lho kenapa?”
“Mereka lebih senang di komisi, bisa

marahi menteri.”
Hari legislasi belum dipatuhi. Apakah harus masuk UU Susduk MD3?
Mungkin soal hari legislasi ini bisa masuk dalam UU Susduk.
Apakah dengan hari legislasi masalah bisa terpecahkan?
Tidak. Kita harus memperbanyak jumlah komisi minimal 17, sehingga satu komisi cukup punya dua pasangan kerja dengan kementerian. Sekarang ada 34 kementerian. Kalau Komisi jadi 17, bisa bekerja Senin sampai Rabu pagi. Sehingga, Rabu siang dan Kamis hari legislasi. Hari jumat adalah hari fraksi yang tidak bisa diganggu.
Atau, cara lainnya, 560 anggota DPR dibagi menjadi tiga badan. Badan Pengawasan, Badan Legislasi, dan Badan Anggaran. Jadi, anggota DPR dispesialisasikan. Sebanyak 330 anggota DPR masuk Badan Pengawasan, yang nanti dibagi

atas 11 komisi. Setiap komisi 30 orang. Mulai Senin sampai Kamis, tugasnya khusus melakukan pengawasan, nggak merangkap di legislasi dan anggaran.
Kemudian, 80 orang di Badan Anggaran, bisa dibagi menjadi dua tim. Satu tim membahas anggaran belanja daerah, satu tim membahas anggaran belanja pusat.
Badan Legislasi 140 orang, dan tugasnya khusus membuat UU. Jadi, dia masuk kantor langsung bikin undang-undang, nggak *mikirin* yang lain. Mau kiamat tetap bikin UU. Dengan 140 orang ini, bisa dibentuk empat pansus atau delapan panja. Kalau satu panja membahas satu RUU, kami bisa membahas delapan RUU pada saat yang sama.
Kalau langsung ditunjuk, kamu main di Baleg, nggak ada alasan lagi rapat di komisi, rapat di Badan Anggaran.
Pembahasan RUU di Baleg sendiri bagaimana?
Sekarang anggota Baleg 50 orang. Tapi mereka semua merangkap di komisi. Jadi ditarik ke sana ke mari. Kadang *nyatat* tanda tangan, setelah itu kabur.
Di Baleg, rata-rata 15 orang yang hadir. Itu pun sudah banyak. Bayangkan pernah kita rapat *ngundang* tamu untuk RDPU (rapat dengar pendapat umum), yang hadir hanya dua orang. Hanya ketua memimpin dua anggota di *floor*. Kita kan malu. Dan ini sering terjadi.
Jadi, kalau mau sesuatu yang revolusioner caranya ya ini Mas, dibagi menjadi tiga badan. Kalau dibagi menjadi 17 komisi ini sudah mendekati.
Kalau menjadi 17 komisi, perubahan-

nya bisa 60 persen. Kalau dengan pembagian tiga badan, bisa 100 persen berubah.
Sejak kapan muncul ide membagi tiga badan itu?
Sejak tahun lalu saya lempar di koran. Tapi, tidak ada tanggapan. Sementara teman-teman bilang ‘waah, jangan dibagi-bagi, nanti kita nggak bisa ke sana ke mari’.
Kita mau bekerja secara profesional. Kalau profesional itu nggak menangani berbagai cabang. Profesional harus main satu cabang. Nggak bisa orang pintar bulutangkis dan pintar *boxing*. Kalau pintar bulutangkis, terus pintar tenis dan pingpong, masih mungkin.
Kalau tetap tidak dibagi tegas?
Yaa, anggota DPR nanti hanya ikut rapat-rapat yang rame dan menarik. Apalagi kalau ada latar belakang kepentingan yang lain. Dan lebih banyak publisitas. Kalau Baleg mana? Disorot pun nggak. Wartawan nggak ada yang mau datang.
Dengan kondisi seperti saat ini, apakah target 247 RUU dalam Prolegnas 2009-2014 bisa tercapai?
Agak berat. Tapi, kalau sudah bisa diubah dengan pola itu (17 komisi atau tiga badan –Red), bisa.
Bagaimana legislasi kita dibanding legislas parlemen negara lain?
Di Korea setahun sampai 2.000 RUU. Australia sampai 1.000 RUU. Belanda 800-an RUU. Jadi, sebetulnya, kalau bicara 70 RUU setahun, nggak ada apa-apanya. Jadi, kita perlu malu. ■

:: kilas ::

IT Expo Umumkan Pemenang Lomba

BANDUNG – Kegiatan Dies Natalis Mahasiswa Ilmu Komputer ke 6 (DINAMIK6) yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer, dan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) serta Keluarga Mahasiswa Komputer (KEMAK OM) ditutup, Sabtu (19/2). Dalam IT Expo di hari terakhir ini diumumkan pemenang lomba dalam acara dinamik6 ini, yaitu Lomba Cipta Web, Programing Contest, PC Assembling Contest antar SMP dan

SMA, Lomba Artikel, Fotografi, Desain Grafis, Film Pendek antar mahasiswa se-Jawa Barat. Ketua pelaksana dinamika6, Imron Hidayat menuturkan, kegiatan ini diselenggarakan untuk mengajak kepada masyarakat, khususnya pelajar lebih mengenal dunia teknologi informasi dan komunikasi. “Harapannya, pelajar Jabar dapat diakomodasi oleh kegiatan kita untuk mengenal ICT itu sendiri”, ujarnya. Hal yang senada disampaikan, Septiadi Guslinar selaku Presiden BEM Kemakom FPMIPA UPI. Kata dia, kegiatan ini adalah kegiatan yang ke enam kalinya diadakan KEMAKOM. Di tahun 2012 nanti kemakom akan kembali mengadakan kegiatan serupa dengan tema yang berbeda dari sebelumnya. ■

Nana Permana Pimpin IPHI Jabar

BANDUNG – Para pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dihimbau untuk terus membina keikhlasan dan kepedulian sosial masyarakat. Tanpa keikhlasan, dapat diprediksi ujung amanahnya selama di IPHI adalah kekecewaan. Kepedulian masyarakat juga harus dibina, karena IPHI bukanlah suatu organisasi yang berorientasi untuk mendapatkan sesuatu, melainkan salah satu organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat

Demikian diungkapkan, Drs H Nana Permana, seausai dilantik menjadi ketua pengurus harian IPHI wilayah Jabar masa bakti 2011-2016 di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Sabtu (19/2). Dalam acara ini, sebanyak 56 orang dilantik dan dikukuhkan menjadi pengurus IPHI Jabar. Ketua Pengurus Pusat IPHI, Drs H Kurdi Mustofa secara resmi melantik pengurus wilayah IPHI Jabar, dengan format kepengurusan dewan penasehat, dewan pembina, dan pengurus harian IPHI Jawa Barat. Ketua Panitia Pelantikan pengurus wilayah IPHI Jabar, Drs HAM Zuhud mengatakan, pelantikan IPHI Jabar merupakan lanjutan dari musyawarah wilayah IPHI Jabar 19-20 Januari 2011 lalu. ■ mj25, ed: agus

OLIMPIADE SDBI

Sebanyak 419 peserta dari 12 Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (SDBI) se-Jabar, mengikuti kegiatan 'Olimpiade SDBI Jabar 2011' bertempat di SD Muhammadiyah 7 Jl Kadipaten Raya, Antapani, Kota Bandung, Ahad (20/2). Dalam Olimpiade ini dipertandingan berbagai lomba, antara lain sepakbola, bulutangkis, renang, *fun game* komputer, dan sejumlah cabang olahraga lainnya.



JOKO CUCENO/REPUBLIKA

Seniman Minta Gubernur Tolak Film ‘AGK’

Arie Lukihardianti

BANDUNG -- Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, sudah seharusnya mengikuti aspirasi masyarakat Kabupaten Karawang agar menolak film ‘Arwah Goyang Karawang’ (AGK). Pasalnya, film tersebut jelas-jelas bertentangan dengan kondisi sebenarnya budaya yang terjadi di Karawang. Hal tersebut, dikemukakan penggiat dan akademisi seni, Bucky Wikagoe, saat beraudensi dengan Ahmad Heryawan di Gedung Sate, akhir pekan (18/2). Pertemuan yang digelar untuk menerima masukan dari pakar dalam menyikapi kontroversi film yang dianggap menyinggung masyarakat Jabar, khususnya Karawang itu, dihadiri oleh seniman dan akademisi yang lain. Di antaranya, Diah Fatma, Andri Kantaprawira, Endang Caturwati, Eddy D Iskandar, Tisna Sanjaya, Herry Dim, Aat Suratin, A-ming D Rahman, dan Hawe Setiawan. “Beberapa waktu lalu, ada dialog antara dinas terkait dari Karawang, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen lainnya yang menyampaikan keberatan film AGK. Lalu saya berkomunikasi dengan penggiat seni untuk merespons permintaan masyarakat tersebut,” ujar Bucky.

Menurut Bucky, persoalan film tersebut berawal dari keberatan masyarakat terhadap isi film AGK. Bahkan, muncul reaksi keras yang bisa berujung pada ancaman aksi massa. Persoalan kontroversi film AGK, kata Bucky, harus jadi perhatian pemerintah karena telah meresahkan masyarakat Karawang. Pihaknya menduga, film itu hanya jadi komoditi tanpa mempertimbangkan aspek empati masyarakat Karawang. “Pembuat film hanya melihat aspek dagang. Katanya telah menggunakan observasi panjang, tapi seperti apa,” ucapnya. Bucky mengaku telah melakukan penelitian tentang ronggeng selama empat tahun. Selama itu pula, tegas dia, tidak menemukan perilaku menyimpang dari penggiat ronggeng. “Tidak ada pemanggilan arwah, apalagi penampilan mengundang. Ini berbeda drastis dengan kandungan film AGK. Saya lihat dicuplikan-cuplikannya,” katanya. Menurut staf ahli gubernur bidang hukum dan politik, Dede Mariana, gubernur memang meminta masukan dari para akademisi dan praktisi perfilman agar langkahnya bisa sejalan dengan aspirasi masyarakat. Terlebih, ada desakan dari masyarakat agar film tersebut tidak diputar dibioskop-bioskop se-Jabar. “Ada desakan agar Gubernur mengirim surat kepada wali kota dan bupati agar melarang pemutaran tersebut. Langkah-langkah tersebut diharapkan sejalan sambil mempertimbangkan masukan dari akademisi dan praktisi seni,” tandas Dede. ■ ed: agus

Ita Nina Winarsih

Kehidupan keluarga miskin itu tak bisa lepas dari jeratan rentenir.

KARAWANG -- Jumlah keluarga miskin di wilayah utara Kabupaten Karawang, yakni Kecamatan Pedes dan Cibuya, mencapai 15 ribu kepala keluarga (KK). Karenanya, sebagian besar mereka tak bisa mengubah perekonomiannya. Pasalnya, mereka kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang sering mengajukan pinjaman lunak ke bank, namun ditolak dengan alasan tidak adanya jaminan. Epon (28 tahun), warga Dusun Bayur RT

17/05, Desa Payungsari, Kecamatan Pedes mengatakan, karena sulitnya mendapatkan bantuan modal, maka pilihan terakhir adalah dengan meminjam ke rentenir. Dengan kata lain, kehidupan keluarga miskin di dusunnya itu, tak bisa lepas dari jeratan tangan rentenir. “Karena jeratan rentenir ini, maka kehidupan kami tak mengalami perubahan pada kebaikan,” ujar pedagang jambu air ini, kepada *Republika*, akhir pekan kemarin. Dikatakan dia, sampai saat ini, keluarga miskin jarang menerima program bantuan permodalan dari pemerintah. Kalaupun ada, sosialisasinya sangat kurang sehingga banyak yang tak mengetahuinya. Selain itu, bantuan permodalan dari pemerintah itu sering disalahartikan. Akibatnya, program bantuan itu menimbulkan kemacetan dalam hal pembayarannya. Dampaknya,

untuk pinjaman selanjutnya terkadang tak ada realisasinya karena terkena *blacklist*. Sebenarnya, kata Epon, ribuan keluarga miskin ini, berharp ada pihak yang bisa memberikan pinjaman modal. Sekaligus dengan bunga yang cukup rendah. Tak hanya itu, supaya tak ada penyelewengan, para peminjam tersebut selalu diawasi. Dengan kata lain, para peminjam terus dibina supaya pinjamannya benar-benar digunakan untuk usaha. “Selama ini, jika ada pinjaman modal, selanjutnya tak ada pengawasan apakah uang itu untuk usaha atau lainnya. Ujung-ujungnya, menunggak,” katanya. Pada akhir tahun 2010 kemarin, lanjut Epon, ribuan keluarga miskin asal Kecamatan Pedes mendapat angin segar. Pasalnya, pihak ketiga yakni Bakrie Mikro *Finance* (BMF), bersedia mengucurkan dana pinjaman dan memonitor

kegiatan para peminjam ini. Pinjaman awal, sambung dia, besarnya rata yakni Rp 1 juta per ibu rumah tangga. Kemudian, pengembaliannya cukup mudah yakni sebesar Rp 25 ribu per pekan selama 50 pekan. “Pinjaman ini, bisa meminimalisasi ruang gerak rentenir,” kata dia. Tak hanya Epon, Suhesti (50) warga setempat, juga merasa terbantu dengan pinjaman ini. Tak hanya itu, pola yang dipakai oleh BMF, lebih cenderung pada kekeluargaan. Jika ada salah seorang peminjam tak bisa membayar cicilan, maka anggota kelompok lainnya bertanggung jawab memberikan bantuan sebesar Rp 1.000 per orang. Bisnis *and Development* BMF Dahlya Desyani mengatakan, jumlah keluarga miskin di dua kecamatan ini sangat banyak. Sedangkan, pihaknya baru bisa merangkul sedikitnya tiga ribu ibu-ibu rumah

tangga di wilayah tersebut. Dahlya menilai, keberhasilan perekonomian keluarga, tergantung dari peran manajernya dalam hal ini isteri. Karena itu, BMF lebih memilih para ibu rumah tangga sebagai nasabahnya. Karena, ibu-ibu lebih bertanggung jawab dan bisa memilah-milah kebutuhan prioritasnya. “Pinjaman ini sudah berjalan tiga bulan. Sampai kini, hasilnya masih bagus,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Karawang, Teddy Rusfandi Sutisna mengatakan, lembaga sensus melansir jumlah penduduk miskin di Karawang mencapai 60 persen dari total 2,2 juta jiwa. Untuk mengentaskan kemiskinan ini, pemerintah daerah tak bisa berjalan sendiri. Kata dia, agar hasilnya maksimal, maka pemerintah dan pihak ketiga harus sinergis dalam mengentaskan kemiskinan. ■ ed: agus

Polisi Tetapkan Tersangka Penyerangan Tempat Ibadah

Lilis Sri Handayani

INDRAMAYU – Jajaran Polres Indramayu menetapkan seorang tersangka dalam aksi penyerangan terhadap tempat ibadah milik jamaah *thoriqot qodriyah naqsyabandi'yah* di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat. Muspida Indramayu pun berusaha menjaga agar kasus tersebut tidak mengganggu kondusifitas daerah. Adapun tersangka itu berinisial O, warga Kabupaten Indramayu. Hingga kini, tersangka terus diperiksa petugas kepolisian. “Tapi dia (tersangka) tidak ditahan,” ujar Kapolres Indramayu, AKBP Rudi Setiawan, di Mapolres Indramayu, akhir pekan (18/2). Selain menetapkan seorang tersangka, kepolisian juga sudah memeriksa tiga saksi dalam peristiwa itu. Rudi menjelaskan, peristiwa itu bukan dilatarbelakangi oleh masalah suku, agama, dan ras (sara). Menurut dia, kasus tersebut

murni kriminal biasa yang bermula dari masalah utang piutang antara tersangka dengan mantan Kepala Desa Dadap, Junaedi. Tersangka merasa kesal dengan sikap Junaedi yang tak kunjung membayar utang kepadanya. Karena itu, bersama lima orang temannya, tersangka mencari Junaedi ke sejumlah tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka juga mendatangi sebuah bangunan milik jamaah *thoriqot qodriyah naqsyabandi'yah* yang biasa dikunjungi Junaedi. Namun, mereka tak berhasil menemukan Junaedi di tempat tersebut. Karena merasa kesal, tersangka lantas melakukan pengrusakan terhadap bangunan tersebut. Akibatnya, kaca-kaca jendela maupun sejumlah pot bunga yang ada di sekitar padepokan menjadi pecah. Tak hanya itu, tersangka juga melakukan penganiayaan terhadap seorang war-

ga yang ada di lokasi bernama Surboni bin Lukman. Korban yang ternyata anggota jamaah *thoriqot Qodriyah naqsyabandi'yah* itu terluka di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul. Rudi mengatakan, proses hukum dalam kasus tersebut masih berjalan. Namun, pihaknya juga berusaha mendamaikan perselisihan di antara tersangka dengan Junaedi. Diharapkan, perdamaian di antara kedua belah pihak mampu meredakan gejolak yang mengarah pada terganggunya kondusifitas daerah. “Kondusifitas daerah harus selalu kita jaga,” ucap dia. Hal senada diungkapkan Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah. Dia meminta agar semua pihak menyikapi masalah tersebut secara bijaksana. Jika tidak, maka bisa meluas dan merusak kerukunan beragama. Sementara itu, Sekretaris Yayasan Serba Bakti Ponpes Suryalaya, Mahfudin me-

ngatakan, *thoriqot qodriyah naqsyabandi'yah* di Desa Dadap merupakan bagian dari jamaahnya. Dia menegaskan, ajaran *thoriqot* tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Menurut Mahfudin, bangunan di Desa Dadap yang diserang itu merupakan tempat ibadah yang biasa digunakan para jamaah *thoriqot qodriyah naqsyabandi'yah* belajar mengenal ajaran Islam. Diharapkan, para jamaah dapat berperilaku baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Di Kabupaten Indramayu, tambah Mahfudin, jumlah jamaah *thoriqot qodriyah naqsyabandi'yah* mencapai sekitar 10 ribu orang. Meski menyedalkan kasus penyerangan tersebut, namun pihaknya menjamin para jamaah tidak akan melancarkan aksi balas dendam. “Untuk masalah hukum, kami serahkan pada aparat kepolisian,” tandas Mahfudin. ■ ed: agus

MAHAKA MEDIA
HARIAN REPUBLIKA

Bimbingan Belajar
Membaca Al-Qur'an
untuk Dewasa dan Keluarga

Dengan Metode Islami

“Sesungguhnya Kami memudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran” (Q.S. Ad-Dukhaan : 58)

Biaya Rp. 475.000
Peserta akan mendapatkan
❖ Al-Qur'an
❖ Buku Teori
❖ Makan Siang
❖ Coffee Break

TEMPAT TERBATAS
Hanya 40 Orang/ Angkatan

Peserta diharapkan membawa perlengkapan sholat.

Keterangan lebih lanjut hubungi :
022 - 4204691, 4207672

Pelaksanaan : Sabtu & Minggu
5 - 6 MARET 2011
Pukul : 09.00 - 16.00 WIB
Tempat : BIRO REPUBLIKA BANDUNG
Jl. L.L. RE Martadinata No. 126 Bandung

Setelah 30 menit / 1 jam belajar, anda benar-benar langsung bisa praktek membaca Al-Qur'an. Metode Islami telah berhasil membimbing ribuan Umat Islam dalam membaca Al-Qur'an meskipun dari nol/belum kenal huruf.

Selama 10 tahun dipraktekkan. Metode Islami sudah pernah diikuti oleh orang Indonesia, Malaysia, China, Australia, Jepang, Singapura, Philipina, India, Pakistan dan mereka berhasil.

08122051805 (Sdr. Yusuf Supriatna)

BNI Syariah
DOMPET DHUAFa
alifTV
REPUBLIKA

Mencairnya Friksi di Balik Rencana Perluasan Tahura

Sandy Ferdiana

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menjamin kehidupan petani hutan tak akan terganggu.

Awal tahun lalu, diam-diam Dinas Kehutanan Jawa Barat mengusulkan perluasan lahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ir H Djuanda (Dago). Lahan yang di dalamnya ada objek wisata Gua Belanda dan Jepang itu memiliki luas 526,98 hektare. Usulan perluasan itu pun bergulir ke meja gubernur Jabar.

Dari usulan itu, gubernur Jabar langsung menindaklanjutinya dengan membuat surat no 522/1209 tertanggal 26 Maret 2010, yang dikirimkan ke menteri kehutanan. Semula, gubernur memahami bila rencana perluasan itu bertujuan untuk memperluas wilayah lindung atau konservasi.

Seperti kita ketahui, Tahura terletak di Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU merupakan salah satu lahan yang menjadi perhatian khusus semua pihak, mengingat kebanyakan lahannya ber kondisi kritis. Bisa jadi, anggapan itu yang terbersit di benak Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan.

Dengan diluaskannya lahan Tahura menjadi 3.276 hektare, dipastikan lahan konservasi di cekungan Bandung akan bertambah. Sekian bulan berjalan, ternyata rencana itu menuai protes dari berbagai kalangan. Kebanyakan protes itu berasal dari belasan ribu petani desa hutan, termasuk kepala desanya.

Pemprov Jabar, khususnya gubernur

Jabar, nyaris tidak mengetahui adanya aksi protes atas rencana perluasan itu. Usulan perluasan pun terus digodok oleh Menteri Kehutanan. Tepat Januari 2011, suara protes itu sampai ke telinga gubernur.

Dari aspirasi itu, akhirnya gubernur mencoba menelusuri alasan protes tersebut. Ternyata, rencana perluasan itu tidak seperti yang dibayangkannya. Lahan yang akan termakan perluasan Tahura, tidak lain adalah kawasan yang selama ini dikelola oleh petani desa hutan. Yang lebih mengagetkan lagi, kondisi lahan itu berkondisi hijau.

Sudah bertahun-tahun, petani desa hutan itu hidup di sekitaran hutan. Mereka sengaja menjadikan hutan sebagai mata pencahariannya, tanpa harus menebang pohon. Konkretnya, mereka berbudi daya pohon kopi, buah-buahan, dan lainnya di sela-sela pohon hutan. Dengan perluasan Tahura, maka kegiatan perekonomian itu akan raib.

Saat ini, ceritanya menjadi berbeda. Belasan ribu petani di kawasan hutan Manglayang dan Pulosari itu tidak lagi resah. Pasalnya, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan tengah mengurungkan niat perluasan lahan itu.

Bahkan, pihaknya meminta seluruh pihak mengkaji ulang rencana tersebut. Pembatalan perluasan Tahura itu disampaikan Heryawan dalam kegiatan ‘Gubernur Ngariksa Leuweung’ di Wana Wisata Oray Tapa, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, pekan lalu.

Ribuan petani hutan asal Kawasan Gunung Manglayang dan Pulosari begitu antusias menyambut kedatangan gubernur di daerahnya. Hadir pula Wakil Bupati Bandung, Deden Rumadji dan Kepala Unit Perum Perhutani Jabar-Banten, Bambang Setiabudi dalam kegiatan tersebut.

Seluruh kepala desa, petani, termasuk ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan



● Menikmati asrinya hutan Tahura

EDI YUSUF/REPUBLIKA

(LMDH) serempak menyampaikan apresiasi terhadap langkah gubernur. Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Dindin Suhaya, yang hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan terima kasihnya kepada Pemprov Jabar. Selama ini, papar Dindin, hutan negara di Kawasan Bandung Utara (KBU) hingga Manglayang relatif ber kondisi baik.

Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), Thio Setiowekti menyebutkan, andai saja kran komunikasi an-

tara petani dan gubernur tidak terbuka, dipastikan Tahura akan tetap diperluas. Perluasan Tahura itu akan memicu reaksi sosial.

“Bila urusan ‘perut’ mereka terganggu, khawatir terjadi konflik vertikal,” ujar Thio. *Alhamdulillah*, kekhawatiran itu tidak terjadi. Gubernur lebih dulu peka dan menyapa petani hutan. Yang lebih penting lagi, keberpihakan gubernur dibuktikan dengan mengurungkan rencana perluasan Tahura.

Ke depannya, pihaknya berharap, kran

komunikasi antara kepala daerah dan petani hutan tidak lagi tersumbat pihak tak bertanggung jawab. *Ngariksa Leuweung* merupakan solusi ideal bagi kepala daerah dalam menyerap aspirasi warganya yang tinggal di hutan.

Dirinya sangat mengapresiasi upaya gubernur dalam mengajak petani desa hutan untuk meningkatkan kerja sama pelestarian hutan. Bahkan, Pemprov Jabar pun siap menyuplai bantuan benih pohon buah-buahan (Mpts) kepada petani desa hutan. ■

Gubernur Ngariksa Leuweung

Wujud Kepekaan Pemprov Jabar Terhadap Petani Hutan



Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (kanan) menyalami tokoh petani hutan Manglayang dan Pulosari, belum lama ini.

Komunikasi antara kepala daerah dengan masyarakat menjadi penting. Terkadang, tanpa terjalannya komunikasi, bisa jadi kebijakan atau program pembangunan yang digulirkan pemerintah daerah akan berdampak pada kehidupan masyarakatnya.

Gubernur Ngariksa Leuweung merupakan model dalam membuka kran komunikasi antara gubernur Jabar dengan masyarakat desa hutan. Masyarakat desa hutan adalah warga yang sehari-harinya berpencaharian di kawasan hutan. Selain mencari nafkah di hutan, mereka pun berfungsi sebagai penjaga hutan negara.

Hutan merupakan aset negara yang kerap terancam dirusak oleh pelaku *illegal logging* (pembalakan liar). Dalam mencegahnya, pemerintah pun nyaris angkat tangan. Keterlibatan masyarakat desa hutan dalam menjaga hutan merupakan cara untuk mengantisipasi terjadinya pem-

balakan liar.

Program pengelolaan hutan itu diberi nama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Saat ini, DPRD Jabar tengah menggodok rancangan perda tentang PHBM.

Di Jawa Barat, tidak kurang dari satu juta warga yang berpencaharian di sekitaran hutan. Oleh tangan mereka lah, hutan di Jabar bisa tetap hijau. Karena memang, mereka yang menjadi garda terdepan dalam menghadang pelaku pembalakan liar.

Begitu penting keberadaan mereka pada hutan-hutan di Jabar. Meski pola PHBM sudah berjalan hampir 10 tahun, bukan berarti bebas hambatan. Perum Perhutani yang menjadi mitra strategisnya, belum tentu bisa menjawab seluruh persoalan yang dialami masyarakat desa hutan.

Gubernur Ngariksa Leuweung merupakan forum yang bisa dimanfaatkan oleh

masyarakat desa hutan dalam menyampaikan keluhannya. Belum lama ini, tepatnya 16 Februari 2011, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan merealisasikan kegiatan Gubernur Ngariksa Leuweung perdana di Wana Wisata Oray Tapa, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung.

Gubernur Ngariksa Leuweung merupakan buah hikmah dari friksi yang muncul akibat bergulirnya rencana perluasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Djuanda (Dago) dari 526,98 hektare menjadi 3.276 hektare. Masyarakat desa hutan yang berdomisili di kawasan hutan Manglayang dan Pulosari (Bandung Utara) sempat resah dengan rencana itu.

Pasalnya, perluasan Tahura akan mengganggu mata pencaharian masyarakat desa hutan. Ujung ceritanya, gubernur mengurungkan rencana perluasan Tahura karena disadari akan

mengganggu keberadaan masyarakat desa hutan.

Langkah Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan tidak berakhir hanya dengan mengurungkan rencana perluasan Tahura. Heryawan bersama tokoh masyarakat hutan, LSM lingkungan, dan Perum Perhutani merancang forum dialog dengan masyarakat desa hutan yang diberi nama Gubernur Ngariksa Leuweung.

Untuk pertama kali, Gubernur Ngariksa Leuweung berlangsung Wana Wisata Oray Tapa, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Ribuan petani hutan yang selama ini berdomisili di 12 desa dekat kawasan Gunung Manglayang dan Pulosari, hadir dalam acara Gubernur Ngariksa Leuweung perdana.

Dalam dialog antara gubernur dan masyarakat desa hutan, terungkap berbagai permasalahan. Di antaranya, tingginya kebutuhan bantuan bibit pohon buah-buahan, perbaikan jalan, suplai pupuk, hingga

kendala pemasaran produk kehutanan (non kayu).

Andai saja, Gubernur Ngariksa Leuweung tidak ada, besar kemungkinan Heryawan tidak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi masyarakat desa hutan. Menyikapi persoalan-persoalan masyarakat desa hutan, Heryawan berkewajiban untuk tanggap.

Seluruh keluhan itu ditindaklanjuti oleh Heryawan sesuai proposinya. Heryawan dipastikan menindaklanjuti seluruh persoalan mereka sesuai batasan kewenangannya. Khusus persoalan infrastruktur jalan, Heryawan meminta Pemkab Bandung untuk segera mengatasinya. Karena memang, Pemprov Jabar tidak dibolehkan mengatasi permasalahan infrastruktur jalan yang bukan kewenangannya.

Dari kegiatan Gubernur Ngariksa Leuweung, Heryawan menggarisbawahi salah satu aspirasi soal kebutuhan bantuan bibit pohon. Tahun ini juga, pihaknya meminta Dinas Kehutanan untuk menyiapkan bantuan bibit pohon untuk petani hutan.

“Kalau memang kapasitas APBD tidak memadai, tidak ada salahnya kita menggandeng dana *corporate social responsibility* (CSR),” tutur Heryawan optimis. Dengan cara berdialog seperti ini, pihaknya

bisa mengetahui secara akurat keluhan masyarakat. Dengan mendengar aspirasi itu, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBD Jabar akan lebih akurat.

Sebagai gubernur, pihaknya berkewajiban menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Kata dia, tidak boleh ada program Pemprov Jabar yang berdampak pada kemaslahatan warga.

“Saya hadir ke Jabar untuk membawa perbaikan di Jabar,” tegasnya. Kalau memang ke depannya masih ada keluhan, pihaknya meminta masyarakat desa hutan untuk menyampaikannya ke Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, atau Pemkab setempat. Pihaknya optimistis, keluhan itu akan sampai ke meja kerjanya.

Menurut Heryawan, kegiatan Gubernur Ngariksa Leuweung tidak berhenti di Oray Tapa. Masih banyak masyarakat desa hutan yang perlu disapa oleh kepala daerahnya. Di Jabar saja, tidak kurang dari sekitar 300 ribu hektare hutan negara yang dijadikan lokasi budi daya oleh masyarakat desa hutan. Diakui Heryawan, keberadaan masyarakat desa hutan harus dipertahankan untuk menjaga keseimbangan alam Jawa Barat.

● kik

